PANDANGAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT PERIODE 2005-2010 TERHADAP KONSEP *HIGH POLITICS*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh :

Mhd.Nofriyanda Falayati

BP. 07993026

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2013

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Tulis Saya, Skripsi Dengan Judul "Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Periode 2005-2010 Terhadap Konsep *High Politics*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Andalas maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyatan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta saksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.

Padang, 1Juni 2013

Yang membuat pernyataan,

Muh. Nofriyanda Falayati

BP. 07 993 026

HALAMAN PENGESAHAN

Nama	:	**Mhd. Nofriyanda Falayati**
Bp	:	**07 9930 26**
Judul Skripsi	:	**Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Periode 2005-2010 Terhadap Konsep *High Politics***

"Skripsi ini telah disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan oleh Ketua Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas".

Pembimbing I

Dr. Asrinaldi, M.Si.
NIP. 197309132000121002

Pembimbing II

Sadri, S.IP, M.Soc.sc.
NIP. 197911162005011006

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Drs. Syaiful, M.Si.
NIP.196609281999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan sidang ujian skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas
dan dinyatakan Lulus pada

Hari/Tanggal	**: Senin/ 22 April 2013**
Pukul	**: 10.00 Wib**
Tempat	**: Ruang Sidang Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Dengan Tim Penguji

TIM PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
Drs. Thamrin, M.Si.	Ketua	
Tengku Rika Valentina, S.IP., M.A.	Sekretaris	
Dewi Anggraini, S.IP., M.PP.	Anggota	
Drs. Syaiful, M.Si.	Anggota	
Dr. Asrinaldi, M.Si.	Anggota	
Sadri, S.IP, M.Soc.sc.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Andalas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS ANDALAS FISIP

Prof. Dr. rer. soz. Nursyirwan Effendi
NIP. 196406241990011002

ABSTRAK

Mhd.Nofriyanda Falayati, 07993026. Skripsi. Judul Pemahaman Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Periode 2005-2010 Terhadap Konsep High Politics. Dibimbing Oleh Dr. Asrinaldi, M.Si dan Sadri S.IP., M.Soc.sc. Skripsi Terdiri Dari X+82 Halaman Dengan Referensi 12 Buku Teori Dan Rujukan, 5 Buku Metodelogi, 1 Jurnal, 2 Skripsi, Dan 5 Situs Internet.

Penelitian ini berangkat dari fenomena Muhammadiyah sebagai gerakan ke Islaman bukan partai politik yang terbesar di Indonesia tetapi tidak melarang elit dan warganya untuk terjun ke dalam dunia politik oleh karena itu Amien Rais memformulalisasikan suatu konsep politik yang bernama *high politics* yang merupakan suatu hasil pemikiran Amien Rais yang digabungkan dengan jiwa atau roh Muhammadiyah agar elit-elit atau warga Muhammadiyah yang terjun kedalam dunia politik berpolitik secara adiluhung atau tinggi bukan berpolitik praktis(*low politics*) adanya contoh-contoh kasus yang menjelaskan adanya beberapa elit Muhammadiyah Sumatera Barat yang terjerumus dalam politik praktis seperti Arwan Kasridan HasanYunus. Sehingga yang menjadi perumusan masalahnya adalah"Bagaimana pemahaman pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat terhadap konsep *high politics*?" penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat terhadap konsep *high politics* periode 2005-2010.

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Triangulasi data adalah ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat. Informan dipilih secara *purposive sampling*.

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah para pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat memahami *high politics* sebagai salah satu cara berpolitik berjangka panjang dan tidak jatuh kedalam politik praktis (*low politics*) yang bertujuan untuk memakmurkan orang banyak dengan berlandaskan etika dan moral yang bersumber dari ajaran Tauhid dan dipraktekkan dengan cara jabatan yang didapat tersebut dianggap betul-betul amanah dari masyarakat dengan tidak mudah terbujuk oleh sesuatu yang menguntungkan tokoh politik tersebut seperti saling sogok dan mengambil keuntunggan lainnya yang akan merugikan orang banyak dan tidak berpolitik praktis (*low politics*) yang hanya berjangka pendek.

Kata Kunci : Pemahaman, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Sumatera Barat dan *High Politics*.

ABSTRACT

Mhd. Nofriyanda Falayati. 07993026. Thesis. Understanding Local State Muhammadiyah West Sumatera 2005-2010 toward High Politics. The Supervisors Are Dr. Asrinaldi, M.Si and Sadri, S.IP., M.Soc.sc. This Thesis consist of x+82 pages with references; 12 Book of theory, 5 book of metodelogy, a journals, 2 thesis and 5 internet site

The observation starts from phenomena Muhammadiyah as Islamic movement in Indonesia and refuses the elites and the people to politics as Amien Rais not forbid elites screwed up the people of the formulized the concept high politics of spirit Muhammadiyah elites into high politics of Amien Rais, not instead of low politics as there example case explain some elite Muhammadiyah Sumatra Barat fall somewhat into politic practice like as of Arwan Kasridan Hasan Yunus. As formula of problem is How Leader somehow Muhammadiyah West Sumatra High Politcs? This paper is to identify to fap a lot as many as to understand high politics in particularly Sumatra Barat Muhammadiyah high politics 2005-2010.

The research thesisi use qualitativeappoach with type of phenomenology. Technique is qualitative data collection interview and craps. Triangulation data is leader of Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat. Informant is purposive sampling.

Everything thesis research is Muhammadyah Sumatra Barat high Politics understand as politics long time and not fall into low politics is to rich many people ethic and moral from Tauhid and tried from people fabulous and amanah trusted people tempted by politics people and bribes and take of as many people somewhat low politic while short time.

Key Word: Understand, Leader of Local Muhammadiyah, Sumatera Barat and High Politics

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr. wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat ALLAH S.W.T atas segala kekuatan dan kemudaha yang telah diberikan sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Periode 2005-2010 Terhadap Konsep *High Politics*.** Salawat dan salam disampaikan kepada Rassulullah Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah memberikan tuntunan kepada kita semua baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Bapak Drs.Syaiful M.Si sebagai ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas beserta seluruh staf jurusan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr.Asrinaldi,S.Sos,M.Si sebagai pembimbing I yang telah memberikan banyak bantuan,arahan,bimbingan serta memperkaya khasanah penulisan ilmiah dalam proses penulisan hingga pada akhirnya penulis bias menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Sadri,S.IP,M.Soc.Sc sebagai pembimbing II yang telah bersedia menluangkan waktuya dalam memberikan arahan, bimbingan dan batuan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh tim penguji skripsi ini : Drs.Tamrin, M.Si sebagai tim ketua penguji beserta Tengku Rika Valentina, S.IP,MA selaku sekretaris dalam pengujian skripsi selanjutnya Dewi Anggraini, S.IP,MA dan Drs.Syaiful, M.Si selaku anggota tim penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kapada penulis selama mengikuti proses belajar mengajar pada perkuliahan di jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
6. Seluruh kepengurusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Sumatera Barat perioderisasi 2005-2010 dan 2010-2015.

Penulis juga menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dari pihak lainnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta Rizal Efendi (papa) dan Nedrawita SH (mama) yang telah sabar selama ini menunggu ananda menyelesaikan study di Jurusan Ilmu Politik ini. Hanya gelar sarjana pada saat ini yang bisa ananda banggakan dan semoga ALLAH S.W.T yang memberikan balasan kepada kedua orang tua atas jerih payah dan kesabaran mereka selama ini.

2. Teritimewa juga kepada ketiga orang adik-adikku Febri Niko Vernando (Alm) semoga tenang di alam sana yaaa, Yuri Aini Qalbia (nanti kalau kuliah jangan lama-lama yaaa...) Putra Oktaviandra (rajin-rajin sekolah).
3. Teristimewa kepada keluarga besar Erizal Mustafa SE (om eri) dan Drs.Zirmalini (tante lin) yang telah membantu penulis selama dari awal kuliah yang telah memberikan bantuan dan doronggan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Teristimewa juga kepada "..... "(*u are special*) yang telah sabar selama ini mengahadapi saya selama penulisan skripsi ini yang sering saya lupakan karna fokus dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh sepupu saya tanpa terkecuali terutama kepada Della Lineri yang sangat teramat sering bertanya kapan sarjananya bang.....? (capek-capek wisuda yo della, abang lah sarjana kini hahaha.....)
6. Kepada seluruh teman-teman kos Irigasi 50 yaitu: terutama Hidayatul Fadjri/Tajik (makasih telah menemani dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, jan sibuk jo samo organisasi tu lae ndan, salasaian lah skripsi tu lae wak samo masuak di unand ko dapek yo samo lo wak tamat dari Unand ko), Efrinaldi S.Hum (mokasi yo ndan sajana jo wak akhirnyo lae dan mokasi alah manggawanan mancari informan ndan), Rio Putra Satria (ang kajaan lah lae yokk jan sibuk jo cewek jo lae dan mokasi alah manggawanan mancari data yooo...), Doni permana, Vebto, Uwo, Sanus mak itam, Ibot, Kulai, abang acep wardana, Pian, Bang Acid, Adlim, Glory, Osli, Adik bilo wak harlem

shake lae, Tofik butar-butar yang telah mengakhiri masa homonya, ika laweh kawan bagosip di kos, Eka ano, Hua-hua samo Amal, Feby si tukang ken, Winda si cuwin, RDM, dan seluruh keluarga IR 5O tanpa terkecuali.

7. Sangat teristimewa juga kepada keluarga besar Pakek Family yaitu : si Metal (lah salasai skema pemikiran kawan, #Forza Milan, semanggat yo kawan salasaikan skripsi tu kawan paliang acok samo jo awak kama c wak pai indak hujan indak paneh salju se yang menghalanggi laenyo kok ka pai nyo, dan mangawanan mancari data-data), si Botak (jadian minum-minum, putus makan-makan mpok, semoga rambut ompok kembali tumbuh ya Tuhan) si Naziamen (bilo wak pai malawak lae kawan di kos si Metal, mokasi yo kawan alah mangawanan wak ka tampek informan), si Ojik (ndak wak lupoan do kejadian waktu kawan manalepon wak setelah lulus Toefel do), Antos (Toefel wak lae ntos), Yudi (kawan nikah ndak undang-undang do), Kuntet (kakak ipar ndak jadi) Patai (bilo wak pai maciang taiii) Aqil (malawak tu tolong di kurangi kawan) Hendra si Comting kelas IP NR 07 YANG SELALU TERDEPAN KING OF DANGDUT), Ajul (salasaikan lah lae yat), Isap, Rio, Mheyang si Anhar, Juliando Pitopang, Anggie yang sadang S2, Ifa, Liza, sawitri safira#metal, Rossa, Parim, dedek babang si Rara Deza semanggat ya skripsinya (Ra, ada tukang bakso tu), dan seluruh keluarga IP NR 07 yang banyak hilang di tenggah perjalanan.
8. Kepada IP 07 lainya Adhe (kuranji atau pauah), tio, eki kitiang yang alah punyo pacar, adzam, cawiak, hendro. Selanjutnya kepada teman-teman di HI

si om beni yang tukang rusuah di twetter, si novand (jadi wak jua si beni tem),si nesa kawan mancari makan tanggah malam, Intan tempang yang sering nanya kapan ujian bang dan bantuin selama ujian skripsi, selanjutnya kepada Rian teman Toefel. SELANJUTNYA kepada para fans yang masih setia ryn moelya makasi atas bantuannya yang sempat ngambok bagaimanapun jasa ryn tak akan pernah bang lupakan , yiyien, Novi dkk.

Akhirnya karena keterbatasan penulis, penulis menyadari akan adanya kekuranggan-kekuranggan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima saran atau kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaannya,. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang,1 Juni 2013

Mhd.Nofriyanda Falayati

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i
ABSTRACT ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR SKEMA xi
DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 11
1.4 Manfaat Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan 13
2.2 Pendekatan Teoritis yang Digunakan 16
2.2.1 Etika Politik 16
2.2.2 Moralitas Politik 21
2.3 Skema Pemikiran 28

BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 30
3.2 Unit Analisis 32
3.3 Lokasi Peneliti 33
3.4 Peranan Peneliti 33
3.5 Pemilihan Informan 33
3.6 Teknik Pengumpulan Data 35
3.7 Uji Keabsahan Data 37
3.8 Analisis Data 37
3.9 Struktur Penelitian 39

BAB IV SEJARAH MUHAMMADIYAH DAN PERKEMBANGANYA DI SUMATERA BARAT

4.1 Berdirinya Muhammadiyah 40
4.2 Maksud dan Tujuan Muhammadiyah 43
4.3 Muhammadiyah di Sumatera Barat 44

BAB III TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat 2005-2010 terhadap konsep *high politics* dan bentuk praktek terbaik (*best practices*) 52

BAB IV PENUTUP

6.1 Kesimpulan 79
6.2 Saran 81

DAFTAR KEPUSTAKAAN 82
LAMPIRAN PENELITIAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian 15

Tabel 3.1 Informan Penelitian 34

DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Skema Pemikiran.....28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan No: 966/SP.X.FISIP.2012 tentang penunjukan dosen pembimbing dan skripsi mahasiswa.

Lampiran 2 Surat Keputusan No: 203/UN.16.09/PP/2012 tentang survei awal.

Lampiran 3 Surat Keputusan No: 890/SP.X.FISIP.2012 tentang tim penguji proposal.

Lampiran 4 Surat Keputusan No: 2550/UN.16.09/PP/2012 tentang izin penelitian.

Lampiran 5 Surat keterangan No. 105/KET/II.0/F/2013 yang menerangkan telah melakukan penelitian lapanggan untuk kepentinggan skripsi di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat.

Lampiran 6 Rekomendasi No.B.070/345/WAS-BKPL/2012 tentang izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Lampiran 7 Surat Keputusan No: 65/UN.08.D/PP/2013 tentang tim penguji ujian skripsi.

Lampiran 8 Gambar pelaksanaan penelitian.

Lampiran 9 Pedoman wawancara penelitian.

Lampiran 10 Pedoman wawancara trianggulasi data.

Lampiran 11 Perubahan susunan dan personalia Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat masa jabatan 2005-2010 No: 88/KEP/II.0/D2007.

Lampiran 12 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 101/KEP/I.0/B/2007 tentang ketentuan jabatan di lingkungan persyerikatan yang tidak bisa dirangkap dengan jabatan lain.

Lampiran 13 Muqaddimah Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah Sumatera Barat.

Lampiran 14 Surat Keterangan Wawancara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis) di kampung Kauman Yogyakarta tanggal 18 November 1912 (18 Dzulhijjah 1330 H). Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk memajukan usaha KH.Ahmad Dahlan dalam memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi oleh hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki sarana dakwah bagi wanita dan kaum muda berupa pengajian *Sidratul Muntaha.* Selain itu peran di dalam pendidikan juga dilakukan dengan mendirikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal dengan nama *Hooge School* Muhammadiyah yang kemudian berganti nama menjadi *Kweek School Muhammadiyah.*[1]

Pada awal kepemimpinan KH.Ahmad Dahlan (1913-1923), pengaruh Muhammadiyah hanya terbatas pada daerah-daerah di Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan dan Pekajangan. Pada tahun 1925 Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah (inyiak deer) membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang Agam. Dalam tempo yang relatif singkat Muhammadiyah telah menyebar keseluruh Sumatera Barat, Sulawesi dan

[1] Hamdan Hambali, *Idiologi dan Strategi Muhammadiyah.*, (Yokyakarta: Suara Muhammadiyah,2007), hlm. 4.

Kalimantan. Kemudian pada tahun 1938 Muhammadiyah telah menyebar sampai ke seluruh Indonesia.[2]

Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan ke Islaman merupakan organisasi yang tidak bersifat partai politik, melainkan sebuah gerakan ke Islaman reformis yang memiliki misi pembaruan keagamaan.[3] Dalam pengertian mengusung ide-ide pembaruan keagamaan. Sejarah kebangkitan Islam di Indonesia bermula di Minangkabau yaitu ketika Muhammadiyah itu sendiri telah mulai berkembang di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sampai pada saat sekarang ini dapat dilihat bagaimana berkembangnya Muhammadiyah di Indonesia.

Di dalam tubuh Muhammadiyah itu sendiri telah banyak terjadi perubahan kepemimpinan, salah seorang tokoh yang paling fenomenal dalam Muhammadiyah sejak zaman reformasi dan juga menjadi salah satu dari sedemikian banyak motor pengerak refomasi pada tahun 1998 adalah M. Amien Rais, yang pernah menjabat sebagai ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan penasihat pimpinan pusat Muhammadiyah periode 2005-2010. Di saat itu M. Amien Rais memiliki kontribusi dalam membesarkan Muhammadiyah dan juga memiliki kontribusi dalam memperkenalkan *high politics*[4] di dalam Muhammadiyah yang merupakan lawan kata dari *low politics.*[5]

---

[2] Ibid.1

[3] Ibid.18

[4] *High politics* adalah politik yang didasarkan kepada konsep Tauhid sebagai prinsip utamanya. Menurut Amien Rais politisi tersebut haruslah bersandar pada moralitas dan etika yang bersumber dari ajaran tauhid. Apabila moralitas dan etika ini dilepaskan dari politik, maka politik tersebut akan berjalan tanpa arah, dan bermuara pada kesengsaraan banyak orang. Dalam konsep Tauhid, politik haruslah mengindahkan nilai-nilai agama dan fungsional terhadap tujuan dakwah. Politik

Gagasan *high politics* Amien Rais pertama kali muncul saat Amien Rais menjadi kader Muhammadiyah, yaitu pada tanggal 13 Oktober 1986 yang berawal dari analisis Amien Rais mengenai perkembangan kehidupan politik Nasional dalam seminar bulanan yang diadakan oleh laboratorium dakwah yayasan Solahudin, Yogyakarta yang dilatar belakangi oleh analisisnya tentang keadaan kultural dan struktural dari kehidupan politik nasional yang diwarnai politik praktis yang termasuk kedalam bingkai *low politics.*[6] Kemudian pada tahun 1994 defenisi *high politics* terus berkembang dan diartikan Amien Rais sebagai politik yang luhur, adiluhung dan berdimensi moral serta etis. Sedangan *low politics* diartikan sebagai politik yang terlalu praktis dan seringkali cenderung nista.[7]

Doktrin *high politics* ini amat terkenal pada Pemilu 1997, dimana pada waktu itu Amien Rais dengan gencar mengkampanyekan tentang perlunya suksesi kepemimpian nasional. Saat itu, Soeharto hendak dipilih kembali menjadi presiden oleh MPR. Jargon *high politics* dalam Muhammadiyah ini ada yang menerima dan ada yang menolak. Menerima karena jargon politik ini sesuai dengan jati diri Muhammadiyah, dan yang menolak karena Amien Rais bersama

---

yang fungsional terhadap tujuan dakwah adalah politik yang sepenhnya mengindahkan nilai-nilai Islam. Sumber (M.Amien Rais, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah*, Bandung, Mujjahid Press, 2004).

[5] *Low politics* adalah Politik yang terlalu praktis dan seringkali malah cenderung nista. Pendek kata, *low politics* adalah penerjemahan dari nafsu Machiavellian yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan (*the end justifying the means*), baik untuk merebut kekuasaan maupun melanggengkan kekuasaan, dan sering terjerumus didalam korupsi. Politik yang terlalu praktis yang sering bermuatan politik uang (*money politics*) manipulasi suara pada PEMILU, pembunuhan karakter (*character assassination*) kongkalikong atau persekongkolan yang dibungkus dengan kualisi atas nama bangsa dan bernegara dll. Sumber (M.Amien Rais, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah*, Mujjahid Press,Bandung, 2004).

[6] ,Muhammadiyah sebagai oposisi, (Yogyakarta: UII Press,2001) hlm 86.

[7] Ibid. hal87

kawan-kawanya mendirikan Partai Amanat Nasioal (PAN) pada tahun 1998, kemudian pencalonan Amien Rais sebagai presiden pada pemilu 1999. Orang-orang Muhammadiyah yang menolak jargon tersebut menganggap Amien Rais telah beralih dari *high politics* ke *low politics* karena manuver politik Amin Rais tersebut.[8] Oleh karena itu *high politics* dilengkapi oleh defenisi A.Syafii Maarif bahwa *high politics* adalah politik yang mengabdi kepada tujuan-tujuan moral yang luhur, anggun dan sesuai dengan martabat dan harkat manusia yang beriman. Arah dari *high politics* ini sesungguhnya *adalah how to save the nation*, yaitu bagaimana menyelamatkan bangsa dari kehancuran dan kehilangan diri sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka[9] dan konsep ini terus berkembang dalam Muhammadiyah.

Pada bulan Mei 1998 Amien Rais dan Muhammadiyah menggunakan politik *adiluhung* bersama rakyat untuk mendobrak gerbong reformasi mengadakan perubahan politik bangsa Indonesia.[10] Politik *adiluhung* atau *high politics* digunakan untuk menghindari terjadinya *low politics* dan mengubah pola pikir bangsa pada waktu itu. Gagasan *high politics* yang dikumandangkan oleh Amien Rais tidak dapat dilepaskan dari latar belakang keluarga Muhammadiyah. *High politics* yang diperkenalkan oleh Amien Rais merupakan lawan dari *low politics*, didalam kegiatan politik. Karena itu Amien Rais menganggap *high politics* tersebut sesuai dengan ajaran tauhid yang ada dalam diri Muhammadiyah.

---

[8] Ibid. hal 88

[9] Ibid. hal 89

[10] M.Najib dkk. *Suara Amien Rais Suara Rakyat*. Jakarta: Gema Insani Press.1998.hlm 32.

Gagasan Amien Rais tentang *high politics* disambut hangat oleh Muhmmadiyah dan juga elit-elit Muhammadiyah. *High politics* adalah politik yang luhur, adiluhung dan berdimensi moral etis, *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar*[11] yang bukan berpolitik praktis (*low politics*) diterima dengan mulus oleh elit-elit Muhmammadiyah.

Gagasan dasar *high politics* yang dikumandangkan oleh Amien Rais tujuannya ingin melandasi semua tindakan politik dengan moralitas dan etika pandangan yang luhur. Secara organitoris *high politics* yang dikumandangkan oleh Amien Rais ke dalam Muhammadiyah adalah pilihan yang bagus. Amien Rais mengingginkan elit-elit Muhammadiyah berpolitik secara tinggi yang berlandaskan tauhid yang sesuai dengan ajaran Muhammadiyah untuk itulah gagasan *high politics* tersebut dikumandangkan oleh Amien Rais, dan supaya elit-elit Muhammadiyah tersebut tidak terjerumus ke dalam *low politics*.[12] Politik yang hanya berjangka pendek yang ditandai dengan tindakan saling dukung-mendukung dalam memperoleh kekuasaan dan dukung-mendukung calon tertentu.

High politics memiliki sandaranya yaitu moralitas dan etika yang berasalkan ajaran tauhid. *High politics* tersebut ingin melandasi semua kegiatan dan tindakan dari elit-elit Muhammadiyah berasalkan moralitas dan etika yang bersumber dari tauhid. Tindakan elit yang berlandaskan moral keagamaan dan

[11] *Ma'ruf* adalah sesuatu yang dianggap baik apabila sesuai dengan ajaran islam dan akal, sehingga ukuran kebaikan ini tidak terletak kepada subjektivitas perseorangan. Sedangkan *al-mungkar* adalah sesuatu yang di ingkari oleh akal dan Islam. Sumber (Ari Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), hlm. 325).

[12] M.Amien Rais, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah*, Bandung, Mujjahid Press, 2004 hlm.34

bukan moral sekuler yang tidak berasalkan agama dan hanya mementingkan duniawi saja.

Menurut Amien Rais, seorang politisi haruslah bersandar pada moralitas dan etika yang bersumber pada ajaran tauhid. Bila moralitas dan etika tauhid ini dilepaskan dari politik maka politik itu akan berjalan tanpa arah dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak. Maka untuk itu perlunya moralitas dalam hal ini yaitu moralitas politik keagaamaan yang diformulasikan dalam *high politics* yaitu untuk melandasi semua kegiatan politik Muhammadiyah dengan moralitas keagamaan bukan moralitas sekuler.

Muhammadiyah memang bukan merupakan sebuah partai politik, tetapi Muhammadiyah juga tidak melarang elit-elit, dan warga Muhammadiyah untuk terjun ke dalam partai politik. Mereka boleh terjun ke dalam partai politik dan melakukan kegiatan politik tersebut secara tinggi dan sesuai dengan ajaran tauhid. Tetapi bagi elit-elit Muhammadiyah mereka dilarang untuk merangkap jabatan dengan sebuah partai politik, itu sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 101/KEP/I.0/B/2007 (lihat lampiran 9) tentang ketentuan jabatan di lingkungan persyarikatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain.[13]

Keterlibatan Muhammadiyah tingkat nasional dalam politik praktis atau *low politics* dapat dilihat pada kasus berikut ini:[14]. *Pertama*: Melalui rekomendasi

[13] Dokumen dari Pimpinan pusat Muhammadiyah tentang Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 101/KEP/I.0/B/2007 mengenai ketentuan jabatan dilingkungan persyarikatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain.

[14] Meraba arah politik Muhammadiyah. Dapat diakses pada (*http://jabarkita.com/2011/04/meraba-arah-politik-praktis-muhammadiyah-dari-masa-ke-masa/*) diakses pada tanggal 9 juli 2012.

Tanwir Semarang 1998, Muhammadiyah juga ikut membidani lahirnya PAN. Pada waktu itu banyak kader-kader dari Muhammadiyah masuk kedalam PAN dan menjadi kader politik PAN tersebut. *Kedua*: Menjelang Pemilu 2009, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dicalonkan sebagai presiden oleh Partai Matahari Bangsa (PMB) yang mengklaim sebagai "anak ideologis dan biologis Muhammadiyah". Ia pun disebut-sebut mendorong dan mendukung sejumlah kader muda Muhammadiyah untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PMB. *Ketiga*: Pada Pemilihan Umum 2009, Din Syamsuddin secara terang-terangan mendukung pasangan Jusuf Kalla dengan Wiranto sebagai calon Presiden dan wakil President namun, kekalahan pasangan ini seolah membawa Muhammadiyah beroposisi dengan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemenang Pemilu 2009. Melihat adanya proses mendukung tersebut mengidentifikasikan adanya *low politics*, karena didalam *high politics* tidak ada yang namanya saling dukung mendukung dalam politik.

Keterlibatan Muhammadiyah tingkat lokal dalam kegiatan politik, juga dapat dilihat pada keterlibatan Muhammadiyah di Sumatera Barat dalam kegiatan politik yaitu sebagai berikut:[15] *Pertama*: Kemenangan Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat pada pemilu legislatif tahun 2004 tidak terlepas dari anggota Muhammadiyah yang berada pada PAN Sumatera Barat. Karena pada saat itu banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat terjun ke dalam politik dengan masuk PAN. *Kedua*: Kemenangan Amien Rais pada pemilu legislatif tahun 2004 atas dukungan penuh dari Muhammadiyah. Terlebih pada

[15] Hadi Putra Wirman, Menakar peran politik organisasi sosial keagamaan di Sumatera Barat pasca orde baru. Artikel ini dapat di akses (*http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/Hardi Putra Wirman.pdf*) di akses pada : 28 Februari 2012

saat itu PAN pada pemilu tahun 2004 tersebut menang di Sumatera Barat dan dalam *high politics* tidak ada proses dukung mendukung dalam meraih kekuasaan didalam pemerintahan. *Ketiga*: Pencalonan Irman Gusman sebagai anggota DPD dari Sumatera Barat pada tahun 2009 tidak lepas dari Muhammadiyah. Karena pada waktu itu Muhammadiyah Sumatera Barat memberikan dukungan pada Irman Gusman sebagai anggota DPD Sumatera Barat. *Keempat*: Pencalonan Jeffri Geovani dan Dasman Lanin sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2005 yang sebelum terjun kepada pencalonan tersebut, Jeffri Geovani berlatar belakang Muhammadiyah dengan menjadi kader Muhammadiyah.

Namun faktanya ada sebagian dari elit Muhammadiyah Sumatera Barat yang terjerumus ke dalam kasus korupsi seperti Arwan Kasri dan M.Hasan Yunus yang berasalkan dari partai PAN dan berlatar belakang Muhammadiyah yang terlibat ke dalam korupsi massal di DPRD Sumatera Barat pada tahun 2002, dan telah selesai menjalankan hukumanya.[16] Dan ada juga Mirwan Pulungan yang terlibat ke dalam kasus korupsi BAPPEDA Sumatera Barat tahun 2009 sebesar Rp 150 juta yang putusannya telah di keluarkan oleh Pengadilan Negeri(PN) Padang, dan mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung (MA) dan di MA dijatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Dari dua kasus di atas dapat peneliti lihat bahwa masih ada beberapa elit Muhammadiyah yang terlibat ke dalam *low politics,* yang merupakan lawan dari *high politics* yang dikumandangkan oleh Amien Rais. Dengan adanya kasus tersebut mengidentifikasikan pengetahuan dan pandangan elit Muhammadiyah

[16]Kasus Korupsi Masal DPRD Sumatera Barat, (*http://www.infoanda.com/linksfollow.php ?lh= AgEBV1RaAVUA*) di akses pada : 29 februari 2012. Dan setelah diselidiki orang-orang tersebut pada saat ini berada pada jajaran elit Muhammadiyah tingkat daerah.

tersebut tentang *high politics* yang digagas oleh Amien Rais belum dipahami secara penuh, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana *high politics* tersebut yang jarang disentuh di dalam politik dan dipraktekkan dalam tindakan politik yang nyata.

1.2 Rumusan Masalah

High politics yang dikumandangkan oleh Amien Rais sejak menjadi ketua PP Muhammadiyah yang menekankan kepada berpolitik secara politik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral serta etis: politik *amal makruf nahi munkar.* Muhammadiyah tidak melarang elit-elit dan warganya untuk anti dalam politik dan tidak boleh terjun ke dalam politik. Maka untuk itu timbullah slogan Muhammadiyah tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana. Tetapi Muhammadiyah menyerukan kepada seluruh elit dan warganya agar berpolitik secara adiluhung, yang berdimensi moral serta etis dan berpolitik yang berlandaskan tauhid.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, agar Muhammadiyah serta elit-elitnya tidak terjerumus ke dalam *low politics* maka Amien Rais memperkenalkan suatu jargon untuk berpolitik yaitu *high politics*, yang diterima dengan mulus oleh elit Muhammadiyah. Namun pada praktek pelaksanaan dari *high politics* tersebut, menunjukkan bahwasanya jargon yang digadang-gadangkan oleh Amien Rais tersebut belum bisa dapat dimengerti dan dicerna oleh sebagian elit-elit Muhammadiyah. Hal itu dapat dilihat dari elit-elit Muhammadiyah di Sumatera Barat yang terlibat ke dalam tindakan-tindakan korupsi, seperti

M.Hasan Yunus dan Arwan Kasri yang terlibat dalam kasus korupsi massal di DPRD Sumatera Barat tahun 2002. Selain itu juga ada kasus Mirwan Pulungan yang terlibat kasus korupsi di BAPPEDA Sumatera Barat tahun 2009.[17]

Dengan melihat kasus-kasus yang telah dijelaskan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa *high politics* yang dikumandangkan oleh Amien Rais belum tepat tujuannya, serta adanya kecendrungan mengambil keuntungan dari jabatan yang diraihnya. Karena hal tersebut konsep tersebut dikeluarkan oleh Amien Rais untuk menghindari Muhammadiyah dan elit-elitnya agar tidak terjatuh ke dalam *low politics* yang cenderung nista serta mengambil keuntungan dari apa yang dimilikinya.

Adanya kasus dari Muhammadiyah Sumatera Barat di atas, maka peneliti melihat *high politics* yang diperkenalkan oleh Amien Rais belum berjalan dengan baik dan pandangan dari elit-elit Muhammadiyah terhadap konsep tersebut belum dapat mereka pahami dengan baik. Bagaimana cara berpolitik yang berlandaskan secara Tauhid telah diatur didalam *high politics* tersebut. Bagaimana seseorang dalam berpolitik dan kehidupan politiknya telah diatur dalam konsep tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya kecendrungan belum tepat sasaranya *high politics* yang dikumandangkan oleh Amien Rais. Elit-elit Muhammadiyah semestinya paham dan mengetahui benar bagaimana itu sebenarnya bentuk *high politics* dan bagaimana elit tersebut mengimplementasikannya. Penelitian ini akan mencoba melihat bagimana pandangan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat didalam

[17] Putusan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 475/Pid.Sus/2009. Tentang putusan terhadap Mirwan Pulunggan.

memahami *high politics* yang pernah dikumandangkan oleh Amien Rais tersebut. Dengan melihat adanya sebagian elit-elit Muhammadiyah yang terlibat ke dalam kasus korupsi yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa korupsi adalah bagian dari *low politics* karena mengambil keuntungan dari jabatan yang elit tersebut miliki.

Elit-elit tersebut seperti yang telah peneliti sebutkan terlibat ke dalam kasus korupsi masal di DPRD Sumatera Barat tahun 2002 dalam hal ini adalah Arwan Kasri dan M.Hasan Yunus yang berasal dari PAN. Sedangkan PAN itu sendiri memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah. Elit tersebut yang berasalkan dari PAN juga memiliki latar belakang Muhammadiyah. Dengan melihat hal tersebut peneliti dapat melihat bahwasanya masih ada kekurang pahaman elit-elit yang terlibat tersebut ke dalam *high politics* yang dikumandangkan oleh Amien Rais. Oleh adanya fenomena di atas, maka penulis mengajukan pertanyaaan. Bagaimanakah pandangan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat terhadap *high politics* dan implementasi *high politics* tersebut dalam realita politik yang ada?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian tentang konsep *high politics* ini adalah untuk mengidentifikasi pandangan elit pada pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat tentang konsep *high politics* dan menjelaskan *best practices* (praktik terbaik) dari *high politics* menurut pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat dalam politik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara akademik adalah menambah wawasan tentang pandangan tentang pemikiran politik Islam dalam hal ini yaitu tentang *high politics* yang jarang disentuh oleh tokoh-tokoh politik ataupun ilmuan-ilmuan politik pada saat sekarang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu yang relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang *high politics*, kajian terdahulu yang peneliti uraikan di bawah ini, antara lain:

1. Dhanil Septian.[18] Konsep yang digunakan di dalam penelitiannya yaitu Konsep politik, etika politik, *high politics* dan Negara sebagai faktor pendukungnya, dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitianya yaitu Rumusan Amien Rais tentang tauhid sosial-nya yang kemudian direduksikanya menjadi politik adiluhung atau *high politics*. Penerapan *high politics* pada Muhammadiyah merupakan suatu sikap yang teguh yang dilakukan oleh Amien Rais untuk menghindari elit-elit Muhammadiyah terjerumus ke dalam *low politics*. Kelebihan dari penelitian ini lebih kepada bagaimana proses lahirnya pemikiran politik adiluhung Amien Rais yang berasakan konsep tauhid di dalam Islam.

[18] Septian, Daniel.2009,"*Pemikiran Politik Amien Rais (High Politics dan Aplikasinya di Indonesia)*".Skripsi untuk tidak di terbitkan. Medan: Depertement Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara

2. Suwarno.[19] Dengan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Dengan hasil penelitianya "Paradigma politik Muhammadiyah mengacu pada paradigma kultural. Muhammadiyah meyakini bahwa politik merupakan bagian dari kehidupan umat manusia yang harus diwarnai oleh ajaran Islam. Karena Muhammadiyah bukan merupakan kekuatan politik praktis (seperti parpol, misalnya), Muhammadiyah berupaya mempengaruhi kekuasaan (sebagai bagian terpenting dari perjuangan politik) melalui sarana pemberdayaan masyarakat. Berhadapan dengan negara (yang diwakili oleh pemerintah sebagai pemangku negara), posisi Muhammadiyah adalah sebagai kelompok kepentingan (*interest group*) seraya menjalankan dakwah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Paradigma politik Muhammadiyah dari masa ke masa menunjukkan perubahan istilah tapi tetap berdasarkan Kultural. Dan pada masa Amien Rais (1995-2000) paradigma politik Muhammadiyah dengan istilah *high politics* yang dipraktikkan Amien Rais dengan kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan (KKN). Dan Amien Rais dengan *high politics*, mengantarkanya sebagai salah satu tokoh kunci pengerak reformasi". Kelebihan dari penelitian ini yaitu melihatkan bagaimana paradigma politik yang dilakukan Muhammadiyah dalam era refomasi dan pada era kepemimpinan Amien Rais di kenal dengan *high politics*.

[19] Suwarno.2004. *political behavior of Muhammadiyah and its Relation to The State During The Reformation Era"*, FKIP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Vol. 6, No. 2, 2005 : 189-206

Untuk melihat perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti	Teori & konsep	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Dhanil Septian	Konsep politik, etika politik, high politics dan Negara sebagai faktor pendukungnya	Jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian tokoh	Rumusan Amien Rais tentang tauhid sosial-nya yang kemudian direduksikanya menjadi politik adiluhung atau high politics. Penerapan high politics pada Muhammadiyah merupakan suatu sikap yang teguh yang dilakukan oleh Amien Rais.
2	Suwarno	Teori Perilaku politik	Metode penelitian kualitatif-deskriptif	Dalam era reformasi pola perilaku politik Muhammadiyah dengan paradigma kultural. Walaupun banyak terjadi pergantian pemimpin paradigma kultutal tersebut tetap dijaga dan dipelihara. Yang membedakannya hanya pada istilah penyebutannya saja dari pimpinan Muhammadiyah. Dan pada masa Amien Rais (1995-2000) diperkenal dengan nama high politics.

Dari tabel di atas dapat terlihat perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian Dhanil Septian misalnya, hasil penelitian tersebut dia menceritakan

bagaimana pemikiran Amien Rais sehingga melahirkan jargon *high politics*, untuk diterapkan oleh elit-elit Muhammadiyah di dalam kehidupan politik. Dalam penelitian tersebut implementasi dari *high politics* tersebut belum tampak penerapannya karena dalam penelitian tersebut dia lebih menjelaskan kepada pemikiran Amin Rais. Maka dalam penelitian ini penulis ingin melihat implementasi dari *high politics* tersebut dengan adanya kasus yang mengidentifikasikan pengetahuan dan pandangan elit Muhammadiyah tentang konsep *high politics* yang digagas Amien Rais belum tepat sasaran. Selain itu perbedaanya juga dalam bentuk teknik pengumpulan data, karena penelitian tersebut bertemakan tentang pemikiran politik seorang tokoh maka memakai metode penelitian kepustakaan. Dan dalam penelitian ini penulis memakai teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan dokumentasi.

Selain itu dalam bukunya Suwarno, dalam penelitiannya tersebut menjelaskan bagaimana paradigma politik Muhammadiyah dalam era reformasi. Bagaimana perilaku politik yang di tunjukkan Muhammadiyah dari zaman presiden BJ.Habibie sampai zaman Megawati. Bagaimana *high politics* diperkenalkan Amien Rais. Belum jelasnya bagaimana *high politics* tersebut di implementasikan Amien Rais terhadap elit-elit Muhammadiyah.

2.2 Pendekatan teori yang digunakan

2.2.1 Etika politik

Dalam bahasa inggris, etika disebut *ethic* yang berarti suatu sistem, prinsip moral, atau aturan berprilaku. Akan tetapi terkadang *ethics* (dengan tambahan

hurus S) dapat berarti singular yang berarti cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. Jika yang dimaksud dengan *plural* (jamak), *ethics* berarti prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi perilaku individu.[20] Dalam bahasa yunani, etika (ethikos) mengandung arti penggunaan karakter, kebiasaan, kecendrungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar-salah, mengandung pencarian kedalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral.[21] Dan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (1995) Etika adalah Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Menurut Franz Magnis Suseno etika merupakan ilmu atau refleksi sistematik berkaitan dengan pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilahistilah moral. Dalam arti yang lebih luas etika diartikan keseluruhan mengenai norma dan penelitian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Franz yang menganggap bahwa etika merupakan ilmu yang sistematis. Frans berpendapat bahwa etika bukanlah suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiaran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Karena etika merupakan pemikiran secara filsafat itu mempunyai lima ciri khas yaitu bersifat rasional, kritis, mendasar, sistematik dan normatif.

Dengan cara pandang dan berfikir di atas, etika disini yang dimaksudkan adalah merupakan filsafat moral, atau suatu pemikiran secara rasional, kritis,

---

[20] Jhonathan Crowther (Ed). *Oxford Advanced Learner's Dictonary*, (London: Oxford University Press,1995), hlm.393

[21] Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat*, (bandung, remaja rosdakarya, 1995) hal 100-101

mendasar dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral. Etika memberikan pengertian mengapa seseorang mengikuti moralitas tertentu, atau bagaimana seseorang dapat mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan berbagai moralitas. Menurut Franz etika tidak menghasilkan secara langsung tentang kebaikan, akan tetapi menghasilkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Etika tidak mempunyai pretensi untuk secara langsung membuat manusia menjadi baik, namun memberikan pengertian tentang berbuat baik. Tujuan dalam mempelajari etika adalah membuat mereka lebih dewasa dan kritis mengenai bidang moral.[22] Menurut Franz ada empat alasan mengapa pada zaman sekarang etika sangat diperlukan.[23] *Pertama*, kehidupan dalam masyarakat yang semakin pluralistik, termasuk juga dalam bidang moralitas. Setiap hari manusia saling bertemu, mereka dari suku, daerah dan agama yang berbeda-beda sehingga menimbulkan sekian banyak pandangan moral yang saling bertentangan, karena mereka menganggap bahwa faham mereka yang paling benar. *Kedua*, manusia hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan terjadi di bawah hantaman kekuatan mengenai semua segi kehidupan, yaitu gelombang modernisasi. Gelombang ini telah melanda sampai ke segala penjuru tanah air, sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Rasionalisme, individualisme, kepercayaan akan kemajuan, konsumerisme, sekulerisme, pluralisme religius, serta pendidikan moderen secara hakiki mengubah lingkungan budaya dan rohani di Indonesia. *Ketiga,* proses perubahan sosial budaya dan moral telah dipergunakan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-

[22] Franz Magnis Suseno, *Berfilsafat dari Konteks* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1992),hlm. 9

[23] Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar, loc. cit,* hlm. 15

menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan obyektif dan untuk membentuk penilaian sendiri, agar tidak mudah terpancing, tidak ekstrim, tidak cepat-cepat memeluk segala pandangan baru, tetapi juga tidak menolak nilai-nilai hanya karena baru dan belum biasa. *Kempat*, etika juga diperlukan oleh kaum agama yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah.

Di dalam bukunya Frans Magnis mengatakan bahwa etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia.[24] Sedangkan etika itu sendiri terbagi ke dalam etika umum yang mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia dan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Tugas etika politik bersifat subsidair dan contoh dari etika politik ini adalah larangan di dalam mengambil yang bukan hak kita di dalam jabatan politis yang diemban. Dalam hal ini, membantu agar pembahasan masalah ideologi dijalankan secara objektif melalui argument-argument yang dapat dipahami oleh semua orang yang mengerti masalah etika politik memberi patokan dan norma penilaian mutu politik dan penyelenggaraan Negara dengan tolak ukur martabat manusia. Tujuan etika politik adalah mengarahkan manusia pada hidup yang lebih baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Etika politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warga Negara. etika politik

---

[24] Franz magnis suseno, *Etika politik ,prinsip-prinsip ketatanegaraan modern.* (PT.gramedia pustaka utama,Jakarta,2003) hlm.13

tidak hanya menyangkut etika individual saja tetapi berkaitan dengan tindakan kolektif (etika sosial).

Etika berarti adat istiadat, jika digunakan dalam berpolitik etika politik merupakan cara-cara berpolitik yang baik seperti seorang tokoh politik yang etika politiknya haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah atau adat-istiadat dalam berpolitik yaitu dengan mengunakan jabatan politiknya dengan sungguh-sungguh dengan menghargai pendapat orang lain dan tidak mudah menerima bujuk rayu yang akan merusak etika politiknya, selalu bersikap adil dalam mengambil sebuah keputusan politik yang tidak merugikan sebelah pihak dan tidak menguntungkan pihak atau golonggan tertentu tetapi menguntungkan berbagai pihak dalam keputusan politik yang diambil oleh tokoh politik tersebut dan betul-betul berpolitik secara rasional.

Etika diperlukan dalam *high politics* karena etika merupakan salah satu sandaran dalam *high politics*. Apabila tokoh politik tersebut bisa memakai adat istiadat yang baik dalam berpolitik, maka akan terciptalah suatu suasana politik yang betul-betul adil dalam sebuah putusan politik karena adanya adat istiadat dalam berpolitik yang dipakai oleh tokoh politik tersebut yang tidak akan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu etika diperlukan dalam *high politics* karena jika adat istiadat seseorang dalam berpolitik baik maka akan tercipta suatu suasana politik yang kondusif yang akan menguntungkan banyak pihak. Berpolitik betul-betul secara rasional bukan irasional.

2.2.2 Moralitas politik

Membahas etika politik tidak dapat dipisahkan dari moral politik, karena sesuai dengan yeng telah disebutkan sebelumnya moral politik adalah praktik dari etika politik. Moral merupakan aturan-aturan normatif yang berlaku dalam masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu. Moral lebih dekat dengan akhlak, meskipun tidak sepenuhnya ketimbang dengan etika. Sedangkan akhlak lebih merupakan sebagai suatu paket atau barang jadi yang bersifat normatif mengikat, tanpa mempertanyakan secara kritis, sehingga akhlak dapat disebut dengan moralitas Islami. Studi kritis terhadap moralitas itulah wilayah etika, sehingga moral dapat dikatakan sebagai objek kajian dari etika. Moral lebih kepada perbuatan kongkret realisasi dari perbuatan jiwa. Moral menunjuk pada perbuatan dengan sesama manusia karena bersifat antroposentris, dan tujuannya hanya sebatas untuk kepentingan manusia.[25]

Dalam bidang moral Franz Magnis Suseno mengatakan bahwa kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari kebaikanya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Menurut Frans Magnis Suseno (2003: 14) kata moral selalu menunjuk pada manusia sebagai manusia. Kewajiban moral adalah kewajiban manusia sebagai manusia., selanjutnya frans magnis suseno mencontohkan moral seperti seorang pegawai sering memakai uang kantor, tetapi

[25] Ari Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), hlm.41

tidak pernah mengantinya atau melunasinya. Perilaku tersebut terus berlanjut tidak pernah ada upaya memperbaikinya. Sedangkan norma moral adalah untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dilihat dari sumber dan sifatnya, ada moral agama dan ada moral sekuler. Moral keagamaan telah dipahami jelas oleh semua orang sebab untuk ini seseorang tinggal mempelajari ajaran-ajaran agama mengenai moral. Adapun moral sekuler merupakan moral yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya bersifat duniawi. Bagi umat beragama moral agama harus dianut dibandingkan dengan moral sekuler.[25]

Moral diartikan mengenai apa yang dinilai seharusnya oleh masyarakat dan etik dapat diartikan pula sebagai moral yang ditujukan kepada profesi. Dengan demikian setiap profesi didalam politik harus berdasarkan kepada moralitas politik, sehingga politik tersebut bisa berjalan dengan baik dan bermuara dengan kesejahteraan banyak orang. Sebagai bentuk aktivitas moral politik tersebut, seorang elit didalam jabatanya memanfaatkan jabatan yang didapat tersebut dalam mensejahterakan banyak orang dibawahnya, tidak terlibat dalam politik uang, berjuang dijalan yang baik dalam jabatanya tersebut.

Menurut Amien Rais, politik kepartaian, proses rekrutmen pejabat atau pegawai, proses agregasi dan artikulasi kepentingan, proses pemecahan konflik kepentingan antar golongan dalam masyarakat, proses pembuatan keputusan politik domestik maupun luar negeri dan lain sebagainya, adalah contoh-contoh kegiatan politik yang tidak dapat dilepaskan dari pondasi moral dan etik yang dianut. Begitu penting dan bergunanya moral di dalam sebuah aktivitas politik.,

[25] *Op.Cit* hlm. 63-64

high politics mustahil di jalani apabila moral tidak ada. Karena moral adalah sandaran *high politics.*

Moralitas sangat penting ada di dalam setiap tindakan politik. Dengan adanya moral yang tinggi pada diri seorang pejabat maka dia telah mempraktekan konsep *high politics* tersebut. *High politics* menuntut adanya moralitas yang tinggi dari para penganut konsep tersebut, karena moral menjadi sandaran bagi setiap penganut konsep *high politics* di dalam melaksanakan semua aktivitas politik yang telah disebutkan Amien Rais di atas. Moral bukan menjadi perkara mengetahui prinsip-prinsip yang benar, melainkan lebih merupakan masalah watak yang benar. Jika moral seseorang benar maka wataknya tentu juga benar dan orang itu dalam aktivitas politiknya sudah bisa melakukan konsep *high politics.*

High politics yang diperkenalakan Amien Rais dibangun untuk menghindarkan moralitas politik elit Muhammadiyah agar tidak terjatuh ke dalam moralitas sekuler, yaitu moralitas yang tidak berdasarkan pada ajaran agama dan hanya bersifat duniawi, dalam hal ini yaitu *low politics.* Oleh karena itu *high politics* tersebut diperkenalkan oleh Amien Rais. Menurut Amien Rais, seorang politisi haruslah bersandar pada moralitas dan etika yang bersumber pada ajaran tauhid. Bila moralitas dan etika tauhid ini dilepaskan dari politik, maka politik itu akan berjalan tanpa arah dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak.

Moral yang merupakan praktik dari etika politik dalam moral ada prinsip dalam bersikap baik dalam berpolitik dan prinsip keadilan dalam berpolitik di dalam *high politics* harus adanya moral yang luhur karena selain etika moral juga

merupakan sandaran dalam *high politics* tersebut. Seseorang yang ber-*high politics* harus selalu bisa bersikap baik, baik kepada kawan maupun lawan dalam berpolitik, berbaik sangka kepada lawan maupun kawan dalam berpolitik serta menghormati kebebasan orang lain sehingga tidak akan merugikan suatu pihak atau kelompok tertentu nantinya. Sedangkan prinsip keadilan dalam high politics seorang tokoh politik yaitu selalu bersikap baik kepada siapa saja dan memperlakukan semua orang dalam berpolitik itu sama tanpa membedakan. Tuntutan keadilan yang paling umum dan mendasar adalah agar semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan dengan sama.[27] Dengan dasar seperti itu Franz menegaskan bahwa keadilan mengungkapkan sikap hormat terhadap martabat dan kesamaan antara semua orang sebagai manusia. Secara lebih kongkrit, keadilan menuntut agar kepada siapa saja diberikan apa yang menjadi haknya yang dalam hal ini yaitu putusan politik.

Dalam pandangan Amien Rais, *high politics* adalah politik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral serta etis dan menjadikan tauhid sebagai prinsip utamanya. Maksudnya disini adalah seorang politisi dalam berpolitik haruslah bersandar pada moralitas dan etika yang bersumber dari ajaran tauhid, dan ajaran tauhid itu sendiri adalah ajaran dalam islam yang dipakai Muhammadiyah di dalam gerakan keagamaan. Jadi inti itu semua adalah warga dan elit-elit Muhammadiyah di dalam berpolitik harus bersandar kepada ajaran tauhid yang merupakan ajaran di dalam islam dan pondasi di dalam gerakan ke islaman Muhammadiyah.

---

[27] Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial, loc. cit*, hlm. 130

High politics yang konseptualisasinya mengenai tauhid sebagai prinsip utamanya dapat di lihat kepada 5(lima) prisip kesatuan, yaitu :[28] kesatuan penciptaan (*unity of creation*), kesatuan kemanusiaan (*unity of mankind*), kesatuan ketuhanan (*unity of godhead*), kesatuan alam semesta, jiwa raga, imanen-trasenden (*unity of whole universe*), kesatuan tujuan (*unity of quidence*) Sedangkan *high politics* itu sendiri memiliki 3 (tiga) macam ciri-ciri utama, yaitu :[29] *Pertama*, Politik berupa amanah (*trust*) dari masyarakat yang harus dipelihara baik-baik. Politik yang diamanahkan masyarakat dalam hal ini yaitu suara yang masyarakat berikan kepada seorang politikus melalui pemilu harus di pelihara, karena suara yang mereka berikan tersebut merupakan aspirasi yang diberikan masyarakat kepada seorang politikus untuk diwujudkan oleh politikus yang dipercaya oleh masyarakat tersebut. Dalam amanah ini tentu adanya prinsip keadilan dan prinsip sikap baik yang merupakan ajaran moral dengan adanya keadilan maka akan terciptalah amanah nantinya. *Kedua*, Setiap jabatan politik mengandung di dalamnya *mas'ulliyah* atau pertanggung jawaban (*Accountability*). Politik yang dilakukan oleh seorang politikus tersebut harus dipertanggung jawabkan kembali kepada masyarakat. Tentu jabatan politik tersebut akan dibertanggung jawabkan nantinya karena tokoh politik tersebut sudah bersikap baik pada orang lain dan bersikap adil pula. *Ketiga*, Kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwah (*Brother hood*), yakni persaudaraan diantara sesama umat manusia. Di dalam berpolitik seorang politikus harus dijalankan dengan baik dan berdasarkan persaudaraan antara

[28]Ahmat Bahar, *Biografi Anak Cendikiawan Amien Rais: Gagasan dan Pemikiran Masa Depan Indonesia Baru*, (Yokyakarta: Pena Cendikia) hlm. 32.
[29] DR.M.Amien Rais, *Hubungan antara Politik dan Dakwah*, (Bandung, 2004), hlm.10.

sesama umat manusia, sehingga tidak menyakiti seseorang atau kelompok lainya. Adat istiadat yang terjaga dalam bepolitik akan menciptakan kebaikan dan keadilan bagi semua orang nantinya.

Ciri-ciri tentang *high politics* di atas sangat kondusif bagi pelaksanaan *Amal Makruf Nahi Mungkar* yang merupakan ajaran Muhammadiyah, inilah antara lain yang dimaksudkan oleh surat *al-hajj* ayat 41, yang berbunyi :

> "Mereka adalah orang-orang yang bila kami beri kekuasaan yang teguh di muka bumi niscaya menegakkan shalat,membayar zakat dan menyuruh (manusia) berbuat kebaikan serta mencegah kejahatan dan bagi Allah sajalah kembalilah segala macam urusan"

Untuk melakukan konsep *high politics*, sebuah organisasi memerlukan prasyarat yang tidak ringan yaitu, antara lain, organisasi tersebut harus di perkuat dengan kepemimpinan yang kuat pula, yakni kepemimpinan yang tinggi (*high leadership*), adanya kelompok tenaga *lobbyist* yang andal (*high diplomacy*), dan perlu memiliki lembaga pengkajian yang bermutu. *High leadership* mutlak diperlukan, yaitu kepemimpinan yang mengayomi kader-kadernya secara arif. Kepemimpinan yang ingklusif (merangkup semua potensi yang ada), bukan yang eksekutif (yang menyingkirkan kader-kader terbaiknya karena faktor (*like and dislike*).[30]

Dengan melihat pengertian dan latar belakang lahirnya konsep *high politics* tersebut tentu sangat ideal untuk dilaksanakan oleh elit-elit Muhammadiyah dalam berpolitik karena *high politics* tersebut sangat singkron dengan pelaksanaan *Amal Makruf Nahi Mungkar* yang merupakan ajaran

[30] Hajriyanto Y.Thohari, *Muhammadiyah dan pergulatan Politik Islam Modernis*, (Jakarta,2005) hlm. 221.

Muhammadiyah itu sendiri. Dan prasyarat yang di tuntut oleh pelaksanaan konsep *high politics* tersebut, sudah ada pada Muhammadiyah. Dan tinggal kepada Muhammadiyah bagaimana menjalankan konsep tersebut di dalam diri Muhammadiyah itu sendiri dan bagaimana elit-elit Muhmmadiyah tersebut dapat mempraktekkan konsep *high politics* tersebut di dalam kehidupan berpolitiknya.

Etika dan moral diperlukan dalam berpolitik dalam etika adanya adat istiadat dan cara-cara dalam berpolitik sehingga moral dalam politik yang dijalankan tokoh tersebut akan menciptakan kebaikan kepada semua orang dengan memandang semua orang itu sama dalam berpolitik dengan menghargai semua orang itu sama dalam berpolitik dengan tidak mengecilkan golonggan tertentu yang akan menciptakan suatu keadailan dalam berpolitik karena adanya sikap hormat dalam berpolitik. Dengan adanya etika dan moral yang luhur tersebut ciri-ciri dari *high politics* tersebut akan terbentuk, amanah (*trust*) akan jabatan politik tersebut dengan adat istiadat dalam berpolitik yang luhur tokoh tersebut akan mengunakan jabatan politiknya untuk kepentingan banyak orang karena didukung dengan prinsip berbuat baik dan prinsip keadilan dalam berpolitik, dari amanah tersebut akan menciptakan pertanggung jawaban (*accountability*) tentunya jabatan tersebut akan bisa dipertanggung jawabkan karena tokoh politik tersebut menjalankan jabatan politik dengan sebetul-betulnya sesuai dengan prinsip kebaikan dan keadilan, dari *trust* dan *accountability* tersebut akan tejalin sebuah persaudaraan (*brother hood*) yang luhur dengan tata karma berpolitik yang berlandaskan prinsip perbuatan baik dan keadilan.

2.3 Skema Pemikiran

Skema 2.1
Skema Pemikiran

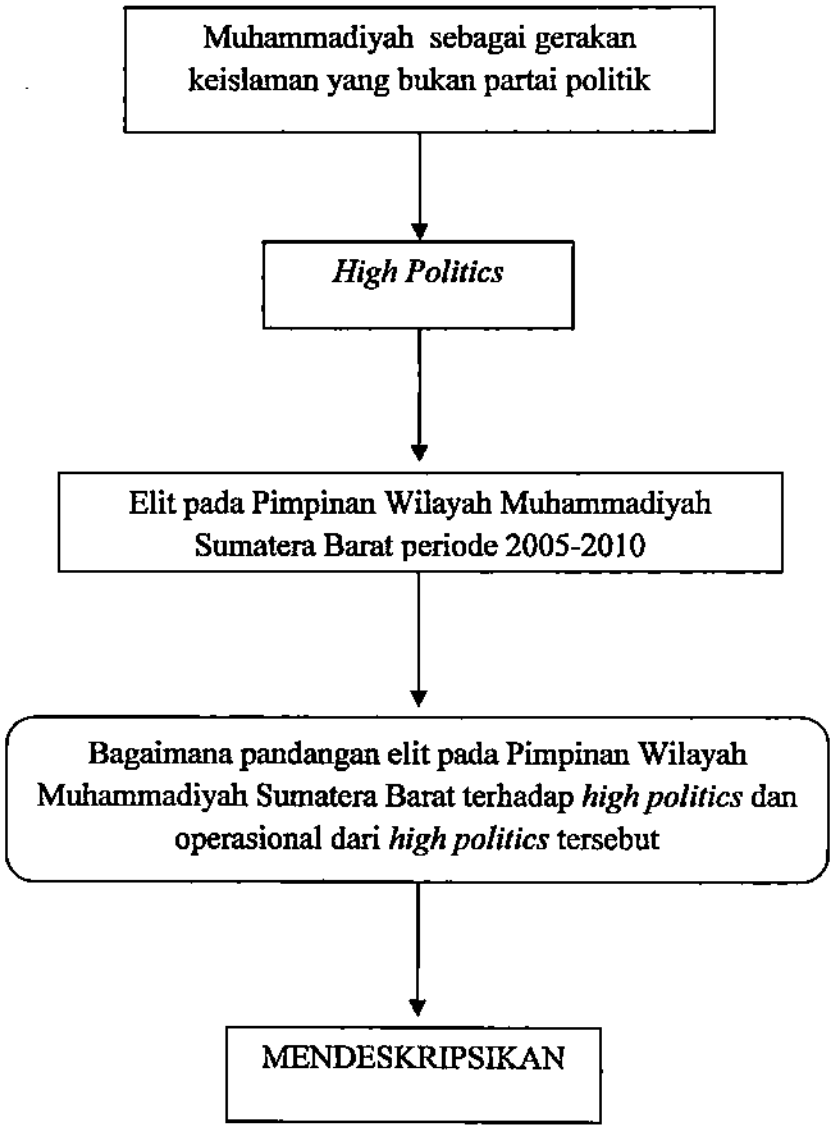

Keterangan :

Penelitian ini berangkat dari Muhammadiyah sebagai gerakan ke Islaman yang bukan partai politik tetapi tidak melarang elit-elit dan warganya untuk terjun dalam dunia politik, melihat hal tersebut maka Amien Rais yang merupakan salah satu tokoh besar dalam Muhammadiyah memformulalisasikan suatu konsep politik yang merupakan pengabunggan pemikiran Amien Rais dengan jiwa atau roh Muhammadiyah yang diberi nama konsep *high politics* yang tujuannya untuk menghindari Muhammadiyah yang terjun ke dunia politik untuk tidak terjerumus dalam politik praktis (*low politics*). Selanjutnya penelitian ini melihat bagaimana konsep high politics tersebut dipahami dan dipraktekkan oleh elit-elit yang berada pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2005-2010 kenapa pemilihan wilayahnya Sumatera Barat, karena peneliti melihat sejarah dan perkembanggan pesat Muhammadiyah di Sumatera Barat sejak Muhammadiyah berdiri dan berkembang di luar pulau Jawa. Selanjutnya penelitian ini melihat Bagaimana pandangan elit pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat terhadap *high politics* dan operasional dari *high politics* tersebut semua itu peneliti deskripsikan secara jelas dalam penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berguna untuk menjelaskan fenomena sosial yang ingin diteliti secara mendalam. Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interfretif dan naturalistik terhadap subjek kajian. Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, intruspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, interaksional dan visual yang mengambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.[31]

Pemilihan pendekatan ini, yaitu untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang pandangan elit-elit Muhammadiyah tentang *high politics*. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti menggali data-data yang ada secara lebih bebas dan mendalam sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat unik ataupun khas.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atas apa yang diteliti yang merupakan jalan praktis untuk melakukan penelitian terhadap fenomena tersebut. Penelitian deskriptif bertujuan untuk

[31] Norman K Denzin & Yvonna S Lincoln, *Hand Book Of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 2.

membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta itu.[32] Dengan tipe penelitian deskriptif ini peneliti dapat mengambarkan secara mendalam tentang *high politics* di dalam elit Muhammadiyah Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metodologi kualitatif dengan metode fenomenologi. Fenomenologi dicirikan oleh *desciptive phenomenology,* yakni pembuktian secara deskriptif atas dua bentuk temuan :

1. Permasalahan
2. Objek sebagai permasalahan.

Pada pembagian ini dilihat cukup berpengaruh pada terbentuknya empat percabangan besar dalam fenomenologi. Pencabangan besar itu terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

a) *Realistic Phenomenology.* Percabangan ini menekankan pencarian persoalan universal manusia ditinjau dari berbagai objek, yang meliputi tindakan, motif tindakan, serta nilai kepribadian.

b) *Constitutive Phenomenology.* Gambaran tentang cabang ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Husserl melalui *ideen zu einer reiven phanomenologie und phanomenologischen philosophie* sekitar tahun 1913. Pendapat ini merupakan pengembangan dari pandangan Husserl yang meliputi filsafat ilmu pengetahuan alam.

c) *Existential Phenomenology.* Percabangan ini bermula dari pemikiran Heidegger yang menggunakan kehidupan manusia sebagai cara dalam

[32] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta, PT.Raja Gravindo Persada,1983), hlm.18.

ontologi fundamental yang bergerak melampaui ontologi regional yang disampaikan oleh Husserl.

d) *Hermeneutical Phenomenology.* Fenomenogi hermeuntik bertolak dari pemikiran Heidger, bahwa suatu metode menginterpretasikan eksistensi manusia. Arti kata hermeneutic adalah *the art of understanding*, yaitu metoda dan prinsip untuk memahami text. Misch dan Spranger sudah memandang phenomenologi husserl sebagai phenomenologi hermeneutikal, karena telah menggunakan phenomenologi sebagai metode untuk mengungkap makna dibalik struktur dan pengalaman

Penelitian fenomelogi ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memakai metode *Realistic Phenomenology*. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Realistic Phenomenology* untuk mencari persoalan universal manusia ditinjau dari berbagai objek yang meliputi tindakan, motif tindakan, serta nilai kepribadian.

3.2 Unit Analisis

Dalam penelitian tentang pandangan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2005-2010 unit analisis yang dipakai yaitu kelompok, dimana subjek penelitian adalah penggurus harian pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat yang mengerti tentang *high politics.*

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Padang, karena Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat dan Pengurus tahun 2005-2010 berdomisili di kota Padang.

3.4 Peranan Peneliti

Peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai alat untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian atau instrument penelitian. Peneliti harus memiliki ciri-ciri umum yakni responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, memproses data secepatnya, memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan, memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim dan idiosinkratik. Idiosinkratik maksudnya peneliti sebagai instrumen memiliki pula kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga terlebih dahulu atau yang tidak lazim terjadi.[33]

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Maksudnya, informan yang dianggap paling tahu dan yang memudahkan peneliti

[33] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), hlm. 169.

menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.[34] Informan yang dimaksudkan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atau informasi mengenai apa yang menjadi objek penelitian.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah elit-elit Muhammadiyah yang berada pada PWM Sumatera Barat yaitu orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan pada lokasi penelitian pada periode jabatan 2005-2010. Adapun kriteria informanya adalah :

a) Berasal dari Muhammadiyah Sumatera Barat.

b) Merupakan bagian elit Muhammadiyah Sumatera Barat dalam hal ini yaitu kepengurusan harian pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat perioderisasi tahun 2005-2010.

Tabel 3.1
Tabel Informan

No	NAMA	JABATAN	TANGGAL dan TEMPAT WAWANCARA
1	Drs.H.RB.Khatib Pahlawan Kayo	Ketua PWM Sumatera Barat 2005-2010.	8 November 2012 di rumah informan
2	Drs.H.Mirwan Pulungan, M.Pd	Wakil Ketua PWM Sumatera barat 2005-2010.	10 November 2012 di kantor PWM Sumatera Barat
3	Drs.H.Adrian Muis Ch. Saripado	Sekretaris PWM Sumatera Barat 2005-2010.	21 November 2012 di rumah informan
4	Drs.Salman M.Noer, M.Pd	Bendahara PWM Sumatera Barat 2005-2010.	16 November 2012 di kantor PWM Sumatera Barat
5	Prof. Dasman Lanin PhD	Anggota PWM Sumatera Barat	30 November 2012 di FIS UNP

[34] Sugiyono,2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta), hlm. 54.

		2005-2010.	
6	Drs. Marhadi Effendi	Pemuda Muhammadiyah 2005-2010.	1 Desember 2012 di kantor DPW NASDEM Sumatera Barat
7	M.Hasan Junus	Penasehat PDM Pariaman 2005-2010.	1 November 2012 di rumah informan

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data kalau digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua:[35] (1) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau informan, (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Dalam penelitian ini peneliti memakai data primer dan data sekunder. Data-data dalam penelitian ini peneliti peroleh melalui :

1) Wawancara Mendalam (*In-dept Interview*)

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti maka dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan, biasanya wawancara mendalam ini dilakukan kepada sejumlah informan yang jumlahnya terbatas atau telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini informanya telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti secara garis besar dan sifatnya tidak mengikat.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara tak terstruktur yang bisa secara leluasa melacak berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin. Wawancara dalam penelitian ini dengan tipe wawancara *open-ended.* Di mana peneliti dapat bertanya kepada respondent kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa di samping opini mereka mengenai peristiwa yang ada.

[35] Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan,* (Jakarta : Prenada Media Group,2005), hlm. 55.

Pada beberapa situasi peneliti bisa meminta responden untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri terhadap penelitian ini.

2) Dokumentasi (Data Sekunder)

Lebih menguatkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam (*In-dept Interview*) diperlukan data-data sekunder dimana data diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, baik yang peneliti dapatkan dari perpustakaan labor Ilmu Politik, dan sebagainya serta dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang penting dan bahan-bahan yang di akses internet yang relevan dengan penelitian ini yang peneliti dapatkan selama di lapangan. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah :

a) Perubahan susunan dan personalia Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat masa jabatan 2005-2010 No: 88/KEP/II.0/D2007.

b) Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 101/KEP/I.0/B/2007 tentang ketentuan jabatan di lingkungan persyerikatan yang tidak bisa dirangkap dengan jabatan lain.

c) Muqaddimah Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah Sumatera Barat.

d) Data-data pada situs resmi Muhammadiyah yaitu *www.*muhammadiyah*.or.id*

3.7 Uji Keabsahan Data

Untuk lebih menguatkan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam (*In-dept Interview*), juga diperlukan data-data sekunder dimana data diperoleh dari buku-buku, baik yang peneliti dapatkan dari perpustakaan labor Ilmu Politik, dan sebagainya serta dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang penting dan relevan dengan penelitian ini yang peneliti dapatkan selama dilapangan.[36] Data yang peneliti sajikan adalah data yang paling relevan, setelah dilakukan triangulasi teknik pengumpulan data dan sumber data, yakni informasi yang didapat melalui wawancara dibandingkan dengan dokumen yang ada. Peneliti juga melaku cek kebenaran suatu informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain.

Dalam penelitian ini triangulasi data yang penulis pakai adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Prof Dr Syamsul Bahri Khatib. Beliau merupakan guru besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang. Dia aktif menjadi narasumber dan memberikan tausiah-tausiah tentang Islam dan Pemerintahan, karena itu menurut penulis MUI cocok dijadikan triangulasi data penelitian ini pada tanggal 3 Desember 2012. Selain itu konsep *high politics* juga berasalkan konsep Tauhid di dalam Islam.

3.8 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengaturan secara sistematis, transkrip wawancara, dokumentasi dan bahan lainnya dalam meningkatkan pandangan atau

[36] Lexy J. Moleong, Op. Cit., hal. 53.

menjelaskan sesuatu sehingga mudah untuk dipahami. Data yang didapat baik dari hasil wawancara dan dokumentasi dikumpulkan dan dipelajari sebagai satu kesatuan utuh untuk kemudian dianalisa berdasarkan teori yang digunakan. Seluruh data dianalisa secara kualitatif dengan interpretasi emik dan etik. Dalam penelitian kualitatif, informasi emik dan etik.

Menutut Koentjaraningrat (1982), menyatakan bahwa pandangan etik adalah pandangan yang dikuasai oleh nilai-nilai, norma-norma, dan teori ilmiah yang merupakan pandangan dari luar atau dalam hal ini pandangan dari peneliti. Sebaliknya pandangan emik adalah pandangan tentang kebudayaan sendiri dari warga masyarakat yang bersangkutan yang merupakan pandangan dari dalam atau pandangan dari sumber data. Langkah-langkah di dalam analisis data-data tersebut adalah :

1) Mengumpulkan semua data-data yang diperoleh di lapangan baik itu wawancara, dokument-dokument serta data-data lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini.
2) Mengumpulkan data-data tersebut menjadi sebuah kerangka penelitian.
3) Kerangka penelitian tersebut, peneliti mendeskripsikan dari data-data yang telah dijadikan penelitian tersebut.
4) Terakhir membuat kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut.

3.9 Struktur Penulisan

Sistematika di dalam penulisan skripsi ini yaitu pada bab I penulis dalam bab ini akan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian tentang pandangan elit Muhammadiyah di Sumatera Barat tentang *high politic*. Selanjutnya pada bab II penulis akan menjelaskan tinjauan kepustakaan yang berisikan penelitian terdahulu yang di anggap relevan, konsep-konsep yang digunakan untuk menjelakan fenomena yang akan diteliti.

Setelah itu pada bab III menjelaskan jenis dan metode penelitian yang akan dipakai, yaitu penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi supaya penelitian ini dapat digambarkan secara sistematis, faktual dan akurat akan suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian dalam bab IV akan berisi tentang deskripsi lokasi penelitian ini yaitu deskripsi tentang Muhammadiyah.

Di dalam bab V akan memaparkan temuan dan analisis data yaitu data-data yang telah diperoleh dari informan melalui wawancara dan data-data yang telah didapatkan dari buku-buku dan dokumen lainnya dianalisis sehingga mendapatkan hasil dari penelitian itu sendirinya. Kemudian penutup dalam bab VI yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB 1V

SEJARAH MUHAMMADIYAH DAN PERKEMBANGANYA DI SUMATERA BARAT

4.1 Berdirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah gerakan keislaman yang bukan partai politik yang didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan (M.Darwis) tanggal 18 November 1912 (18 Dzulhijjah 1330 H) di Kampung Kauman, Yokyakarta. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan *tajdid* terbesar yang ada di Indonesia. Muhammadiyah ingin memurnikan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist dan Muhhamdiyah melakukan gerakan ke Islamannya dengan semangat *Amar Makruf Nahi Mungkar*. Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad dahlan juga diilhami oleh gerakan pembaharuan di Timur Tengah yang dipelopori oleh Jamalludin Al Afgani (1838-1897), Muhammad Abduh (1848-1905) dan Muhammad Raasyid Ridha yang pada intinya mengajak umat Islam untuk memahami hakekat ajaran Islam yang sebenarnya dan hanya berpedoman pada Al-Quran dan Hadist.[37]

Secara estimologis Muhammadiyah berasal dari kata bahasa arab "*Muhammad*" yaitu nama Nabi atau Rasul yang terakhir. Kemudian mendapatkan "*ya nisbiyah* "yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umatnya Muhammad atau pengikut Muhammad. Yaitu semua orang yang menyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir.[38]

---

[37] Syaiful. 1996."Organisasi Islam Muhammadiyah DI Kurai Taji Padang Pariaman (1929-1976)". Skripsi untuk tidak diterbitkan. Padang: jurusan Sejarah Fakultas Humaniora Universitas Andalas.

[38] Musthafa Kamal Pasha, *Muhammadiyah sebagai gerakan Islam*, (Yokyakarta, Perpustakaan Freedom, 2002). him 36.

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita-cita. Muhammadiyah didirikan di atas (berlandaskan) dan untuk mewujudkan pokok pikiran yang merupakan prinsip-prinsip atau pendirian-pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara idiologis. Pokok pikiran/ prinsip/ pendirian yang dimaksud itu telah diuraikan dalam Muqadddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus Hadikusuma (ketua pengurus besar Muhammadiyah tahun. 1942-1953) dengan bantuan beberapa sahabatnya. Dimulai penyusunan pada tahun 1945 dan disahkan pada siding Tanwir 1951. Muqaddimah anggaran dasar tersebut menyoroti kembali pemikiran almarhum KH.Ahmad Dahlan yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya, yang antara lain adalah berdirinya persyerikatan Muhammadiyah.[39]

Menurut Mustafa Kemal Pasha dalam bukunya "Muhammadiyah sebagai gerakan islam" berdirinya Muhhamdiyah berasalkan dua macam faktor yaitu :

1) Faktor Subyektif

   Merupakan sebuah faktor utama dalam berdirinya Muhammadiyah hasil pendalaman KH. \Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, mengkaji, kandungan isinya. Dia telah sedemikian teliti, yang mempertanyakan sebab-sebab suatu turunnya ayat (*asbabun nuzul*), dipertanyakan apakah mesti dilakukan. Sikap KH. Ahamd Dahlan ini

[39] *Ibid.I* hlm.8-9

sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 82 dan surat Muhhammad ayat 24.

2) Faktor Obyektif

Dalam faktor ini dibagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu sebagai berikut :

a) Ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikan Al-Quran dan Hadist sebagai satu-satunya rujukan bagi umat Islam.

b) Lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang mengemban misi "Khalifah Allah dimuka bumi".

Sedangkan faktor obyektif yang bersifat eksternal adalah :

a) Semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Banyaknya koloni-koloni bangsa eropa yang masuk ke Indonesia yang menyebarkan kristenisasi.

b) Pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam, yang mencoba memberi nafas baru dalam gerakan islam.

c) Penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia yang membawa dampak dan pengaruh buruk terhadap bangsa Indonesia .

4.2 Maksud dan Tujuan Muhammadiyah

Maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan keislaman dapat dilihat pada anggaran dasar Muhammadiyah, yaitu :[40]

a) Menegakkan, berarti berupaya dan membuatnya tetap tegak dan tidak condong apalagi rubuh. Dan semua itu dapat di realisasikan manakala sesuatu yang ditegakkan tersebut berada pada fondasinya, landasan, atau azas-azas yang kokoh dan solid, dipegang erat-erat dan dipertahankan.

b) Menjunjung tinggi, menjunjung di atas segalanya dan menghormati sesuatu.

c) Agama islam, yaitu agama yang diwahyukan Allah S.W.T kepada Rasul, sejak Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammada S.W.T. serta hidayah Allah kepada umat manusia sepanjang masa. Serta senantiasa menjamin hakikat dunia maupun akhirat.

d) Terwujud, berarti menjadi satu kenyataan akan adanya atau akan wujudnya.

e) Masyarakat utama, yaitu masyarakat yang senantiasa mencari kemaslahatan dan keutamaan umat manusia, masyarakat dan selalu bersikap takzim kepada Allah. Mengindahkan dan selalu penuh ikhlas terhadap ajaran-ajaran-NYA.

f) Adil dan makmur, yaitu suatu kondisi masyarakat yang di dalamnya terpenuhi dua kebutuhan hidup yang polok, yaitu:

---

[40] Hamdan Hambali, *Idiologi dan Strategi Muhammadiyah.*, (Yokyakarta: Suara Muhammadiyah,2007), hlm.5

1. Makmur, yaitu suatu kondisi yang positif dari aspek batiniah, dimana keadaan ini bila mana dapat diwujudkan dengan kongkret riel atau nyata maka terciptalah suatu masyarakat yang makmur. Aman dan tentram, sepi dari perasaan ancaman dan ketakutan.
2. Yang diredhai Allah S.W.T artinya dalam rangka menciptakan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Maka jalan yang ditempuh haruslah semata-mata mencari keridhoan Allah S.W.T belaka. Rumusan tujuan persyerikatan yang disebutkan di atas sesungguhnya searti sejiwa atau sama dan sebangun dengan gambaran masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam surat as-saba' ayat 15 " *balladun tayyibatun wa rabbun ghafur*"

4.3 Muhammadiyah di Sumatera Barat

Pembaharuan Islam di Minangkabau berlangsung semenjak abad ke-19 (1803) yang diprakarsai oleh tiga orang ulama yaitu Haji Sumanik, Haji Piobang dan Haji Miskin. Setelah itu disusul oleh pendidikan ke Islaman oleh Syekh Abdul Karim Amrullah (ayahanda Buya Hamka) yang mendirikan Madrasah Tawalib Padang Panjang. Abdullah Ahmat yang mendirikan norma Islam di Padang dan Djamil Djambek yang mendirikan perguruan Parabek di Bukittinggi. Mereka dan pengikutnya disebut dengan kaum muda.[41]

Tokoh lain yang cukup memiliki andil di dalam perkembangan Muhammadiyah di Sumatera Barat adalah Buya Yuo, hampir seluruh hidupnya

[41] Zairi Asril dkk. Menyemangati kembali peran Muhammadiyah di Minangkabau (YATJG,Padang,200) hal 31

disumbangkan untuk Muhammadiyah bersama dengan beberapa temannya yang pulang dari Jawa dan membawa mandat dari pengurus besar Muhammadiyah di pusat untuk mendirikan Muhammadiyah di Padang Panjang, yang menjadi konsulad Muhammadiyah di Sumatera Barat. Kemudian organisasi dirasa telah mantap konsolidasi dan musyawarah untuk meningkatkan amal dan perjuangan selalu diadakan. Kemudian menyusul di Simabur, Batu Sangkar (27 Juli 1927), Bukittinggi (27 Juli 1928), Kurai Taji Pariaman (25 Oktober 1929) dan Kubang, Payakumbuh (25 Desember 1929).[42]

Sejumlah tokoh besar Muhammadiyah juga tampil dalam kepemimpinan Muhammadiyah secara nasional, walaupun tidak berarti menjadi pucuk pimpinan Muhammadiyah. Baru pada tahun 1953, putra Minangkabau Ahmad Rasyid menjadi ketua PP Muhammadiyah.[43] Tak hanya peran kesejahteraan, dalam kenyataan sekarang komponen masyarakat Sumatera Barat adalah warga Muhammadiyah, mereka tersebar ke pelosok nagari dan perantauan, dan kader-kadernya disemua lapisan pemerintahan dan masyarakat. Termasuk kalangan eksekutif swasta Muhammadiyah sangat memiliki aset yang besar dari jaringan pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai perguruan tinggi.

Sekarang dengan perangkat organisasi yang terstruktur, Muhammadiyah telah berhasil merintis usahanya dalam berbagai bidang. Seperti bidang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) sampai perguruan tinggi, bidang sosial seperti panti asuhan, bimbingan keagamaan seperti bimbingan haji dan

---

[42] *Ibid* 2 hal.32

[43] *Ibid* 2 hal.2

dakwah, bidang kesehatan membangun rumah sakit dan poliklinik, bidang ekonomi dengan membangun koperasi. Tidak kalah pentingnya adalah bidang kaderisasi Nasyiatul Aisyiah, pemuda dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah, ikatan remaja Muhammadiyah (IRM) dan ikatan mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Semuanya telah mendapat di hati masyarakat Sumatera Barat. Hal ini terbukti dengan perhatian dan kepercayaan masyarakat yang ditujukan kepada Muhammadiyah baik sokongan dana maupun sambutan yang mengembirakan.

Persyerikatan Muhammadiyah membentuk organisasi otonom (ORTOM) sebagai wadah organisasi yang membantu persyerikatan dalam rangka mencapai tujuanya :[44]

1. Aisyiyah didirikan pada tanggal 22 april 1917, yang merupakan gerakan kaum ibu dalam Muhammadiyah yang ikut berjuang bersama-sama untuk menyampaikan ajaran Islam ke masyarakat, serta meneladeni perkehidupan dan perjuangan Aisyah RA (isteri Rasulullah).
2. Nasyiatul Aisyiah (NA) adalah perkumpulam bagi para puteri Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 16 mei 1931.
3. Pemuda Muhammadiyah. Cikal bakal pemuda Muhammadiyah adalah pandu Hizbul Wathan (HW), yang didirikan pada 2 mei 1932 tujuannya membina dan mengerakkan potensi pemuda Islam untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.

[44] Sekretariat PWM Sumatera Barat

4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) didirikan tanggal 14 Mei 1964 untuk menyatukan segenap organisasi mahasiswa Muhammadiyah dalam rangka membentuk akademisi Islam guna mencapai tujuan Muhammadiyah.
5. Ikatan pelajar Muhammadiyah (IPM) didirikan 18 juni 1961 dengan maksud untuk menampung kegiatan pelajar dari warga Muhammadiyah, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan jiwa angkatan muda.
6. Tapak Suci Putera Muhammadiyah.
7. Hizbul Wathan (HW).

Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Barat bergerak dalam beberapa tingkatan sebagai berikut:[45]

1. Ranting adalah kesatuan anggota dalam suatu tempat, jumlahnya 577 ranting.
2. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting dalam satu tempat, jumlahnya 112 cabang.
3. Daerah adalah kesatuan cabang-cabang dalam satu Kabupaten/Kota, jumlahnya 13 daerah.

Secara umum amal usaha Muhammadiyah mencakup dalam beberapa bidang, antara lain yaitu :[46]

1. Bidang keagamaan

[45] Sekretariat PWM Sumatera Barat

[46] Sekretariat PWM Sumatera Barat

a) Memberi tuntutan dan pedoman dalam aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah berdasarkan Al-Quran dan Hadist.

b) Mendirikan mesjid dan mushala sebagai sarana ibadah.

c) Menciptakan kader-kader ulama melalui pesantren-pesantren.

d) Menelaah berbagai kajian keIslaman dan perkembangan umat Islam melaui majelis tahrir.

e) Memberikan fatwa dan tuntutan dalam bidang ke agamaan, mensejahterakan keluarga dan masyarakat.

f) Melakukan dakwah ke daerah transmigrasi.

2. Bidang sosial masyarakat

a) Mendirikan rumah sakit, poliklinik dan balai kesehatan.

b) Mendirikan panti asuhan.

c) Menghimpun dan menyalurkan dana-dana bagi korban bencana alam dan bantuan solidaritas lainya.

d) Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai hidup islami.

3. Bidang partisipasi politik.

Muhammadiyah bukan partai politik dan juga bukan pergerakan bawah tanah (*underbow)* partai politik tertentu, sebagai gerakan dakwah partisipasi politik Muhammadiyah bertujuan untuk *amar makruf nahi mungkar* memberi panduan moral, etika dan akhlakul karimah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masyarakat.

4. Bidang pendidikan

Pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada dua pijakan, yakni perpaduan antara sistem pendidikan umum dan system pesantren. Perpaduan antara kedua system tersebut adalah pertama mendirikan madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren dengan memasukkan kurikulum pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan umum atau modern. Kedua mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan kurikulum ke-Islaman dan ke-Muhammadiyah.

Amal usaha Muhammadiyah Sumatera Barat terdiri dari :[47]

1. Universitas 1 buah (UMSB) dengan 9 fakultas, 1 akademi, S1 PGSD dan PGTK Aisyiah dan progam pasca sarjana :
   - Fakultas ekonomi
   - Fakultas agama islam
   - Fakultas hukum
   - Fakultas teknik
   - Fakultas pertanian
   - Fakultas kehutanan
   - Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan
   - Fakultas pariwisata
   - Fakultas kesehatan dan MIPA
   - Progam pasca sarjana, kosentrasi magister hukum Islam dan magister pendidikan Islam

[47] Sekretariat PWM Sumatera Barat

- Akademi perawat kesehatan (AKPER) Aisyiah
- Progam S1 PGTK Aisyiah
- Progam S1 PGSD Aisyiah

2. Baitul Mal wat-Tanwil (BMT) : 5 buah
3. Rumah sakit umum : 2 buah
4. Poliklinik : 2 buah, rumah bersalin 1 buah
5. Balai pengobatan : 2 buah
6. Badan pengelola ekonomi Islam (BPEI) at-Taqwa : 3 unit usaha, toko buku, pangkas rambut, wartel dan foto copy
7. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah : 2 buah
8. Mesjid dan mushala
9. Mesjid dan mushala : 291 buah
10. Koperasi : 1 buah
11. Panti asuhan : 42 buah
12. Apotek : 2 buah
13. LAZISMU : 2
14. Badan pengelola gerakan wakaf uang Muhammadiyah Sumatera Barat : 1

Aset Muhammadiyah Sumatera Barat jumlah tanah:[48]

1. 612 persil
2. 2.237.818 M

[48] Sekretariat PWM Sumatera Barat

Jumlah sekolah atau madrasah:[49]

1.	TK Bustanul Athal	: 79 buah
2.	MIM	: 6 buah
3.	SD Muhammadiyah	: 33 buah
4.	MTsM	: 44 buah
5.	SLTPM	: 17 buah
6.	MAM	: 16 buah
7.	SMUM	: 12 buah
8.	SMKM	: 5 buah
9.	Pondok Pesantren	: 6 buah
10.	Mualimin/mualimat	: 1 buah

[49] Sekretariat PWM Sumatera Barat

BAB V

TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN

5.1 Pandangan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat 2005-2010 terhadap konsep *high politics* dan bentuk praktek terbaik (*best practices*)

Strategi *high politics* merupakan strategi reformulasi dakwah Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika politik yang dipelopori oleh Amien Rais ketika masih aktif dalam kepemimpinan Muhammadiyah, strategi reformulasi ini analisis Amien Rais yang menjelaskan keadaan kultural dan struktural dari kehidupan politik nasional. Keadaan struktural dimata Amien Rais ditopang oleh kenyataan bahwa kehidupan politik nasional dipenuhi oleh politik praktis (*low politics*) yang penuh dengan kepentingan dan politik jangka pendek.

Dalam kondisi tersebut jika Muhammadiyah terjebak dalam politik praktis maka dikawatirkan bahwa Muhammadiyah akan terseret kedalam konflik kepentingan, oleh karena itu Muhammadiyah ingin membuat wacana baru dan segar, dimana politik didekati dengan cara baru yaitu dengan muatan moral dan keagamaan serta bertujuan untuk kepentingan jangka panjang, kemudian keadaan struktural, Amien Rais melihat kehidupan pada masa Orde Baru yang bersifat sentralistis dimana rakyat berada pada posisi marjinal. Untuk menghindari itu Muhammadiyah menghendaki terciptanya suatu kekuasaan yang teduh, demokratis dapat dikontrol dan dikoreksi[50].

[50] Suwarno , Muhammadiyah sebagai oposisi, Yokyakarta: UII Pres, 2001.

High politics yang memakai tauhid sebagai payung yang melindunginya supaya Muhammadiyah tidak terjebak dalam politik praktis (*low politics*) seperti yang dijelaskan oleh Khatib Pahlawan Kayo yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua PWM Sumatera Barat 2005-2010 dia mengatakan bahwa *high politic* sebagai :

> ....Muhammadiyah sebagai organisasi ke Islaman terbesar di Indonesia untuk tidak ikut campur ke dalam politik praktis (*low politics*), tapi walaupun demikian bukan berarti Muhammadiyah tidak tahu politik tetapi Muhammadiyah mengajak kader-kadernya yang terlibat politik dengan tidak terjun ke dalam politik praktis tersebut dalam merebut kekuasaan pada eksekutif, legislatif maupun yudikatif tetapi berpolitik dengan betul-betul mengemban amanat rakyat dan tidak mengambil keuntunggan dari jabatan yang dimliki dengan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam (Tauhid) yang bersandarkan pada moralitas yang tinggi.....[51]

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa *high politics* dipahami sebagai tindakan politik yang tidak jatuh ke dalam politik praktis (*low politics*). Muhammadiyah memang merupakan organisasi ke Islaman tapi Muhmammadiyah tidak melarang elit-elitnya untuk terjun dalam politik, politik bukan menjadi barang yang dihindari. Jabatan politik yang merupakan amanah menunjukkan bahwa etika dan moral yang baik karena informan menganggap amanah tersebut merupakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan masyarakat, jika etika dan moral tersebut rusak tentunya jabatan politik yang didapat tersebut akan digunakan untuk mengambil keuntunggan, tetapi informan tersebut memahami bahwasanya jabatan politik tersebut merupakan amanat masyarakat yang dijalankan dengan penuh kebaikan dan keadilan kepada semua orang.

[51] Wawancara dengan Khatib Pahlawan Kayo, Ketua PWM Sumatera Barat 2005-2010, pada tanggal 8 November 2012 di rumahnya.

Pertanggung jawaban dari amanah tersebut nantinya akan di pertanggung jawabkan pada masyarakat jika amanah dan pertanggung jawaban tersebut berjalan beriringgan maka akan terjalinlah persaudaraan yang kuat antara tokoh politik tersebut dengan masyarakat banyak.Selanjutnya Khatib Pahlawan Kayo menjelaskan bagaimana bentuk operasional dari *high politics* tersebut :

> *High politics* tersebut tidak masuk ke dalam sebuah progam yang mendesak, ajaran-ajaran Muhammadiyah mengarahkan kepada *high politics.* Dan membuat sebuah aturan tidak adanya jabatan ganda dalam muhammadiyah maksudnya seseorang yang memiliki jabatan elit di PWM maka tidak boleh memiliki jabatan penting dalam partai politik. Dia boleh terjun ke dalam dunia politik tetapi tidak melupakan *high politics* betul-betul mensejahterakan banyak orang dalam jabatan politik yang dimilikinya tersebut karena jabatan yang ada tersebut amanah yang ada pertanggung jawabanya kepada semua orang serta harus memandang keadilan dalam sebuah keputusan/kebijakan dalam politik misalnya dan tidak terlibat kedalam korupsi yang akan merusak segalanya dan bersikap jujur dalam jabatan politik untuk menghindari nepotisme.....[52]

High politics tersebut dipraktekkan dengan anggapan amanah akan jabatan tersebut yang dalam amanah tersebut jabatan politik dijalankan dengan adat istiadat berpolitik yang di iringi keadilan pada semua orang dan tidak merugikan orang atau pihak tertentu, bertanggungjawab terhadap jabatan politik yang dimiliki dengan tidak mau jatuh pada korupsi. Tokoh yang tejun dalam politik dalam membuat suatu putusan politik misalnya harus memperhatikan baik dan buruknya, serta tidak merugikan dalam putusan politik yang telah diambil tersebut serta bersikap jujur dalam jabatan politiknya. Apabila jabatan yang amanah tersebut dijalankan dengan keadilan tentu nantinya pertanggung jawaban atas jabatannya tersebut akan bisa diterima oleh orang banyak yang akan membuat

[52] Wawancara dengan Khatīb Pahlawan Kayo, tanggal 8 November 2012.

orang yang mempercayai tokoh politik tersebut akan semakin percaya kepada tokoh politik tersebut.

Dari penjelasan Khatib Pahlawan Kayo diatas tentang *high politics* dan bentuk operasional *high politics* tersebut Muhammadiyah memang merupakan organisasi ke Islaman tapi Muhmammadiyah tidak melarang elit-elitnya untuk terjun dalam politik, politik bukan menjadi barang yang dihindari. Jabatan politik yang merupakan amanah menunjukkan bahwa etika dan moral yang baik karena informan menganggap amanah tersebut merupakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dan masyarakat, jika etika dan moral tersebut rusak tentunya jabatan politik yang didapat tersebut akan digunakan untuk mengambil keuntunggan, tetapi informan tersebut memahami bahwasanya jabatan politik tersebut merupakan amanat masyarakat. Penjelasan dari Khatib Pahlawan Kayo tersebut juga didukung oleh elit Pimpinan Wilayah Muhammadiyah(PWM) Sumatera Barat pada masa perioderisasi 2005-2010 tersebut seperti yang diungkapkan oleh wakil ketua PWM sumbar 2005-2010 Mirwan Pulungan, M.Pd :

> Berpolitik dengan tidak terjatuh kedalam politik praktis (*low politics*), berpolitik berdasarkan kepentingan rakyat dengan tidak menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu di dalam jabatan politik tersebut, dengan berdasarkan Tauhid sebagai landasanya dan diiringgi oleh moral dan etika yang baik yang bersumber dari Tauhid tersebut.....[53]

Dari penjelasan di atas jelas dijelaskan bahwa Muhammadiyah mengarahkan kadernya untuk tidak jatuh kedalam politik praktis dan berpolitik berdasarkan aspirasi rakyat dan prinsip *High politics* yang diperkenalkan oleh Amien Rais dalam Muhammadiyah memang bertujuan untuk menghindari Muhammadiyah tidak terjerumus ke dalam politik praktis atau *low politics* yang

[53] Wawancara dengan Mirwan Pulungan, tanggal 10 November 2012.

penuh dengan pemenuhan kepentingan dan tidak mementingkan kepentingan masyarakat atau umat yang banyak tetapi lebih kepada kepentingan individu atau kelompok dari jabatan politik yang dimiliki oleh tokoh politik dalam partai maupun dalam jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lebih mementingkan kepentingan masyarakat atau umat. Dengan mementingkan kepentingan masyarakat berarti etika dan moral tokoh tersebut baik karena dia tahu bagaimana harus bertindak dengan jabatan politik yang dimiliki oleh tokoh tersebut.

High politics tersebut di implementasikan dengan cara yang dijelaskan oleh Mirwan Pulunggan adalah:

> Cara implementasikannya yaitu setiap orang atau elit muhammadiyah yang terjun dalam politik tidak mengindahkan atau melupakan *high politics* dengan cara betul-betul berpolitik berdasarkan keingginan rakyat karena merekalah yang mempercayai tokoh tersebut untuk mengemban jabatan politik tersebut dan menghindari politik praktis yang hanya berjangka pendek dan saling dukung mendukung untuk meraih sesuatu, dengan menghindari ajakan dari rekan-rekan politik lainya yang ingin mengambil keuntunggan lebih atau lebih singkatnya korupsi.....[54]

Mempraktekkan *high politics* dengan cara berpolitik dengan sungguh-sungguh dan menganggap jabatan politik tersebut merupakan amanah banyak orang dan menghindari politik praktis yang hanya berjangka pendek maksudnya disini adalah moral dan etika diperlukan dalam *high politics* dalam moral dan etika tersebut jika politik dijalankan dengan sungguh-sungguh maka akan membuat politik yang dijalani tersebut akan bisa mensejahterakan orang bukan hanya untuk saat sekarang ini, tetapi untuk jangka waktu ke depannya. Berpolitik

[54] Wawancara dengan Mirwan Pulungan, tanggal 10 November 2012.

atas dasar keingginan rakyat melihat apa yang dibutuhkan oleh rakyat pada saat sekarang ini yang bisa dituangkan dalam sebuah putusan politik. Dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh rakyat secara tidak langsung tokoh politik tersebut akan menciptakan suatu keadilan karena memperhatikan keingginan orang banyak bukan golonggan tertentu saja untuk menciptakan suatu persaudaraan nantinya. *High politics* tersebut di implementasikan dengan menghindari ajakan dari rekan-rekan politik lainya yang ingin mengambil keuntunggan dari jabatan yang mereka miliki atau lebih singkatnya korupsi. Dengan menghindari korupsi tersebut berarti telah menjalankan amanat rakyat dengan sunguh-sunguh.

High politics yang dikenalkan Amien Rais dalam Muhammadiyah tersebut yang mementingkan kepentingan orang banyak dengan tidak jatuh dalam politik praktis juga didukung oleh penjelasan Salman M. Noer yang pada periode tersebut menjabat sebagai bendahara PWM Sumatera Barat:

> Berpolitik betul-betul berdasarkan aspirasi rakyat, dengan berpolitik untuk rakyat, mementingkan kepentingan banyak orang dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok dengan berpegang teguh dengan agama dan tidak terjatuh dalam politik praktis (*low politics*) yang sarat dengan perebutan kekuasaan yang saling menjatuhkan satu sama lain yang berlandaskan etika dan moral yang luhur dalam berpolitik.....[55]

Informan melihat bahwa berpolitik yang mementingkan kepentingan orang banyak dan tidak jatuh pada politik praktis dengan berpegang teguh kepada agama, di situ dapat dilihat bahwasanya dengan berpegang teguh kepada agama berarti tokoh politik tersebut juga berpegang teguh kepada tauhid dengan dia berpegang teguh kepada tauhid berarti dia juga memiliki etika dan moral, karena sesuai yang dikatakan oleh Amien Rais bahwasanya etika dan moral merupakan

[55] Wawancara dengan Salman M.Noer, , tanggal 16 November 2012.

sandaran dalam *high politics*. Dengan menganggap bahwa dalam politik tidak boleh jatuh dalam perebutan kekuasaan yang saling menjatuhkan menujukkan bahwasanya dia tahu bagaimana harus bertindak dalam politik dalam hal ini yaitu etikanya dalam berpolitik. Selanjutnya Salman M.Noer menjelaskan tentang operasional dari *high politics* tersebut adalah:

> *High politics* dapat dilaksanakan sesuai dengan jabatan politik yang didapat oleh masing-masing tokoh Muhammadiyah tersebut dalam politik, jika dia mendapat jabatan sebagai ketua partai maka tokoh tersebut harus betul-betul menjalankan amanahnya sebagai ketua partai dengan mengambil keuntunggan untuk dia sendiri atau kelompok tertentu, dan tokoh tersebut tidak boleh terlibat dalam politik praktis dengan saling sikut-menyikut dalam pencalonan sebuah jabatan lebih tinggi tentunya.....[56]

High politics yang dipahami sebagai tindakan politik yang bertujuan untuk mensejahterakan bangsa berpolitik betul-betul dengan keinginan rakyat yang memberikan amanah tersebut. Kepercayaan tersebut betul-betul dipelihara dengan baik jangan sampai merusak amanah tersebut dan kembali ditekankan bahwa etika dan moral telah menunjukkan bagaimana manusia tersebut harus bertindak dengan jabatan politik yang dimilikinya tersebut. Menjalankan jabatan politik tersebut sebagai amanah yang bertujuan untuk mensejahterakan banyak orang dari jabatan politik yang diemban tersebut membuktikan bahwasannya etika dan moral mereka telah baik dalam berpolitik. Karena jika etika dan moral mereka rusak maka mereka akan mudah terjerumus dalam bujuk rayu sehingga akan merugikan orang banyak nantinya. Etika dan moral yang merupakan sandaran dalam *high politics,* etika dan moral mereka yang telah bagus dengan menjalankan jabatan politik

[56] Wawancara dengan Salman M.Noer, tanggal 16 November 2012.

tersebut dengan sunguh-sunguh dapat diartikan bahwasannya *high politics* tersebut sudah dipraktekkan dengan baik oleh elit-elit tersebut.

Dengan tidak mengambil keuntunggan dalam hal ini bisa diartikan tidak korupsi dari jabatan politik tersebut maka prinsip kebaikan yang merupakan ajaran dalam moral sudah diterapkan oleh elit tersebut. Karena apabila tokoh politik tersebut tidak mengambil keuntunggan dari jabatannya maka amanah tersebut betul-betul diemban oleh tokoh politik tersebut karena dia memiliki sikap adil dan kebaikan dalam dirinya itu semua dikarenakan adat istiadat dari tokoh tersebut dalam berpolitik baik yang dari itu semua akan menghasilkan kesejahteraan banyak orang (*brother hood*) karena tokoh politik dan masyarakat sama-sama telah tercipta keadilan bersama.

Pendapat diatas senada dengan yang diungkapkan oleh pendapat dari Adrian Muis CH. Saripado yang pada waktu itu menjabat sebagai sekretaris PWM Sumatera Barat 2005-2010 tentang *high politics*:

> Politik yang berdasarkan moral dan etika yang baik dan memakai tauhid sebagai payungnya, serta melakukan kegiatan politik yang mensejahterakan banyak orang dan tidak berpolitik praktis (*low politics*) dengan mengutamakan kepentingan banyak orang.....[57]

Informan yang menganggap bahwa *high politics* merupakan politik yang berdasarkan moral dan etika pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan Amien Rais bahwa dalam *high politics* diperlukan etika dan moral sebagai landasanya yang bersumber dari ajaran tauhid jika tanpa adanya etika dan moral berarti tokoh politik tersebut akan terjatuh dalam politik praktis (*low politics*). Jika jatuh dalam politik praktis maka etika dan moral tokoh politik

[57] Wawancara de ngan.Adrian Muis CH. Saripado, tanggal 21 November 2012.

tersebut akan buruk karena itu informan tersebut beranggapan perlunya etika dan moral dalam berpolitik supaya bisa memakmurkan banyak orang, informan tersebut memahami bagaimana seseorang bisa berbuat lebih baik dalam berpolitik dengan tidak jatuh dalam politik praktis dan berpolitik yang berdasarkan etika dan moral yang baik pula sehingga tidak jatuh dalam politik praktis.

Dengan menghindari adanya politik praktis maka pelaksanaan *high politics* tersebut akan bisa dilaksanakan sesuai yang di utarakan oleh Adrian Muis CH Saripado :

> Untuk mempraktekkan *high politics* tersebut bisa dilakukan dengan cara elit-elit Muhammadiyah yang terjun ke dalam dunia politik untuk tidak mudah terjebak bujuk rayu yang akan merusak akhlak elit tersebut karena jabatan tersebut merupakan amanah dari orang banyak dan tidak melupakan *high politics* yang dia dapat sewaktu di Muhammadiyah dan menghindari politik praktis dengan tidak mengambil keuntunggan dari jabatan politik yang didapat oleh elit-elit tersebut yang bisa merugikan banyak orang serta mengajak teman-teman politik lainya untuk memberantas semua tindakan korupsi yang ada.....[58]

Pernyataan informan di atas yang menganggap bahwa *high politics* merupakan politik yang berdasarkan moral dan etika pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan Amien Rais bahwa dalam *high politics* diperlukan etika dan moral sebagai landasanya yang bersumber dari ajaran tauhid jika tanpa adanya etika dan moral berarti tokoh politik tersebut akan terjatuh dalam politik praktis (*low politics*). Jika jatuh dalam politik praktis maka etika dan moral tokoh politik tersebut akan buruk karena itu informan tersebut beranggapan perlunya etika dan moral dalam berpolitik supaya bisa memakmurkan banyak orang, informan tersebut memahami bagaimana seseorang bisa berbuat lebih baik dalam

[58] Wawancara dengan Adrian Muis CH. Saripado, tanggal 21 November 2012.

berpolitik dengan tidak jatuh dalam politik praktis dan berpolitik yang berdasarkan etika dan moral yang baik pula sehingga tidak jatuh dalam politik praktis. Seperti yang diungkapkan oleh Dasman Lanin yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota PWM Sumatera Barat 2005-2010:

> Gerakan moral bangsa dengan berpolitik dalam jangka panjang yang tidak mementingkan kepentingan individu dan kelompok atau kepentingan sesaat, serta berlandaskan etika dan moral, serta melakukan perubahan pada tatanan moralitas pada tatanan Negara, tidak berdasarkan tatanan praktis dalam hal ini yaitu politik praktis....."[59]

Pendapat informan tersebut yang mengatakan bahwa berpolitik tidak berdasarkan tatanan praktis atau dalam politik praktis menunjukkan pandangan elit tersebut bahwa high politics tersebut adalah tidak jatuh ke dalam politik praktis dengan mementingkan kepentingan orang banyak dengan berlandaskan etika dan moral. Tahu bagaimana harus bertindak dalam berpolitik yaitu dengan tidak jatuh pada politik praktis, berpolitik dengan jangka panjang berarti informan tersebut secara tidak langsung telah menghindari politik praktis karena politik praktis tersebut hanya berjangka pendek dengan melandasi tindakan politiknya dengan etika dan moral bagaiman tata karma dalam berpolitik dan menghargai hak orang lain dalam berpolitik tersebut sehingga tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Selanjutnya informan menjelaskan bagaimana cara mengoperasionalkan *high politics* tersebut yaitu :

> Orang-orang Muhammadiyah boleh melakukan kegiatan politik, tetapi tidak boleh mengindahkan *high politics* yang dia pahami sejak berada dalam Muhammadiyah dulu dengan cara tidak termakan bujuk rayu yang akan merusak akhlak orang tersebut dalam politik sehingga akan

[59] Wawancara dengan.Dasman Lanin ,tanggal 30 November 2012.

> merugikan orang tersebut dan dengan saling mengawasi dan mengingati tindakan yang akan memicu korupsi dari jabatan politik yang dimiliki.....[60]

Dari pernyataan tersebut peneliti melihat bahwasannya Muhammadiyah walaupun sebagai sebuah organisasi gerakan kelslaman tetapi tidak melarang elit-elit Muhammadiyah tersebut untuk terjun ke dalam dunia politik. Walaupun dia terjun ke dalam dunia politik elit-elit tersebut tidak boleh melupakan *high politics* yang pernah dia dapat selama berada pada Muhammadiyah karena dengan *high politics* tersebut elit-elit Muhammadiyah yang terjun ke dalam dunia politik tersebut tidak akan terjerumus ke dalam politik praktis (*low politics*). Informan menganggap dengan tidak mudah terjerumus bujuk rayu dan menganggap jabatan politik tersebut amanah, amanah yang diberikan Tuhan dan masyarakat. Dengan anggapan jabatan politik tersebut amanah maka etika dan moral tokoh politik tersebut baik karena secara konsep apabila etika dan moral dilepaskan dari *high politics* dalam hal ini yaitu politik tersebut akan berjalan tanpa arah dan berujung pada *low politics.* Menghindari tindakan korupsi dan praktek yang akan memicu korupsi dengan saling mengawasi antar tokoh politik yang ada.

Pernyataan dari Dasman Lanin tentang *high politcs* dan operasionalnya tersebut juga didukung oleh pernyataan yang sama dari Marhadi Effendi yang pada waktu itu menjadi pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat 2005-2010 tentang *high politics* yang mementingkan kepentingan banyak orang dibandingkan kelompok dan mensejahterakan rakyat dari jabatan politik tersebut sehingga tidak terjebak dalam politik praktis yang lebih banyak bertujuan untuk memuaskan

[60] Wawancara dengan Dasman Lanin,tanggal 30 November 2012.

kepentingan individu dan kelompok seperti yang dijelaskan oleh Marhadi effendi tentang *high politics* :

> Berpolitik dengan tidak jatuh ke dalam politik praktis yang penuh dengan intrik dan kepentingan sesaat atau lebih dikenal dengan nama *low politics* dan berpolitik untuk bangsa demi kepentingan rakyat dan mensejahterakan rakyat dengan jabatan politik yang dimiliki tokoh politik tersebut dengan tauhid sebagai payungnya.....[61]

Berpolitik dengan tidak terjatuh ke dalam politik praktis, berpolitik dengan cara mensejahterakan banyak orang bukan kelompok atau individu tertentu dengan berpegang teguh kepada tauhid sebagai pondasi atau payung dalam berpolitik. Informan jugaa mengatakan bahwasanya jabatan politik tersebut merupakan amanah yang diberikan rakyat kepada tokoh politik tersebut, sesuai dengan penjelasan Marhadi Effendi :

> Jabatan politik yang dimiki tersebut yang merupakan amanah rakyat yang betul-betul harus kita jalani dengan sungguh-sungguh , dan adanya kontrol dalam jabatan politik yang kita miliki tersebut supaya terhindar dari politik praktis(*low politics*) kontrol dari semua pihak dan tidak merusak akhlaknya sendiri dan menghindari bersikap tidak jujur dalam menjalankan jabatan (nepotisme).....[62]

Jabatan tersebut merupakan amanah dari banyak orang yang di jalani dengan sungguh-sungguh dan menjaga akhlak dalam berpolitik sehingga tidak terjatuh ke dalam politik praktis. Dalam pelaksanaan *high politics* tersebut peneliti melihat bahwasannya jabatan politik tersebut merupakan amanah dari rakyat yang mempercayakan amanah mereka tersebut kepada seseorang yang memiliki jabatan politik agar tokoh politik tersebut bisa mensejahterakan orang banyak pelaksanaan

---

[61] Wawancara dengan Marhadi Effendi, tanggal 1 Desember 2012.

[62] Wawancara dengan Marhadi Effendi, tanggal 1 Desember 2012.

high politics tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan jabatan politik yang dimiliki.

Pendapat dari ke enam elit pada PWM Sumatera Barat tersebut juga didukung oleh pernyataan dari M.Hasan Yunus yang menjabat sebagai penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah kota Pariaman pada masa periode 2005-2010 yaitu :

> Berpolitik secara tinggi, baik dalam penataan politik sesuai dengan kebutuhan yang mengakar kepada rakyat, yang tauhid sebagai dasarnya, etika dan moral sangat di perlukan oleh tokoh politik yang menganut *high politics* tersebut sehingga *high politics* dapat berjalan dengan baik dengan mementingkan kepentingan banyak orang di bandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu .....[63]

Penjelasan yang diberikan oleh elit-elit tersebut tentang *high politics* bisa disimpulkan bahwa *high politics* yang pernah diperkenalkan oleh Amien Rais pada Muhammadiyah merupakan suatu cara berpolitik dengan mengutamakan kepentingan banyak orang dibandingkan dengan kepentingan individu serta mensejahterakan banyak orang dan itu berdurasi jangka panjang bukan berdurasi jangka pendek yang penuh dengan kepentingan sesaat dalam meraih atau memuaskan kepentingan individu atau kelompok (politik praktis), dengan memakai ajaran agama (Tauhid) sebagai prinsip utamanya dan bersandar pada etika dan moralitas yang tinggi dalam pelaksanaan *high politics* tersebut. Informan tersebut juga menjelaskan bagaimana cara mempraktekkan *high politics* tersebut yaitu :

> Cara implementasinya jika seorang elit Muhammadiyah terlibat ke dalam partai politik maka dia tidak boleh melupakan atau

[63] Wawancara dengan M.Hassan Junus, tanggal 1 November 2012.

> mengindahkan *high politics* dengan cara tidak mudah terpengaruhi dengan orang lain dan jatuh kedalam politik praktis yang hanya berjangka pendek seperti lebih memilih orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam jabatan tertentu dibanding memilih anggota keluarga yang belum memiliki skil dan kemampuan yang mumpuni atau lebih disingkat dengan praktek KKN.....[64]

Pendapat elit-elit Muhammadiyah tersebut tentang *high politics* dikuatkan oleh pendapat ketua MUI Sumatera Barat tahun 2010-2015 Syamsul Bahri Khatib:

> Cara Muhammadiyah dalam berpolitik secara tinggi (*adiluhung*) sehingga tidak jatuh dalam politik praktis yang pada saat ini sering terjadi di Indonesia, dengan berpolitik untuk bangsa dan Negara, itu semua bergantung pada moralitas dan etika dari tokoh politik tersebut yang bersumber dari agama atau Tauhid.....[65]

Adanya singkronisasi antara pendapat elit-elit tersebut dengan pernyataan yang disampaikan oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat yang berpolitik dengan menghindari terjadinya politik praktis (*low politics*). *High politics* tersebut dijalankan dengan moralitas dan etika yang luhur dalam berpolitik yang bersumber dari Tauhid.

Dalam bukunya yang berjudul hubungan antara politik dan dakwah, Amien Rais menjelaskan bahwa *high politics* adalah politik yang didasarkan kepada konsep Tauhid sebagai prinsip utamanya, dan politisi tersebut haruslah bersandar pada moralitas dan etika yang bersumber dari ajaran Tauhid, jika moralitas tersebut dilepaskan dari politik maka politik tersebut akan berjalan tanpa arah dan bermuara pada kesengsaraan banyak orang. Karakteristik pemikiran Amien Rais lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan nya tentang tauhid oleh

---

[64] Wawancara dengan M.Hassan Junus, tanggal 1 November 2012.

[65] Wawancara dengan Syamsul Bahri Khatib tanggal 3 Desember 2012.

karena itu *high politics* yang di formuasikan oleh Amien Rais tersebut tidak lepas dari tauhid.

Moral dan politik ibaratkan air dan minyak keduanya sulit untuk dipertemukan dalam wadah yang sama, moral diibaratkan sesuatu yang mewakili keserba-baikan, keserba-sucian dan keserba-murnian, moral identik dengan agama dan ketuhanan sementara politik mewakili kotor, intrik, manipulasi dan sejenisnya untuk menciptakan suatu kebaikan dalam politik tersebut maka diperlukanlah moral dalam tindakan politik tersebut. *High politics* tersebut dilahirkan untuk mengikis praktek-praktek moral dan etika politik yang tidak terpuji dan menjadikan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.[66]

Moral dan etika diperlukan dalam *high politics*, etika yang merupakan suatu sistem, prinsip moral atau perilaku dalam berpolitik etika yang mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak dalam berpolitik tersebut sedangkan moral merupakan implementasi atau praktik dari moral tersebut bagaimana manusia kedepanya. Moral dan etika yang diperlukan dalam pelaksanaan *high politics*, karena menurut Amien Rais apabila moralitas dan etika dilepaskan dari politik maka politik tersebut akan berjalan tanpa arah dan akan berujung pada politik praktis (*low politics*) yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu karena tidak adanya etika dan moral politik tersebut, karena itu Amien Rais mengatakan bahwa pentingnya etika dan moral dalam semua tindakan politik, Seperti yang dijelaskan oleh Mirwan Pulungan :

---

[66] Septian, Daniel. 2009," *Pemikiran Politik Amien Rais (High politics dan Aplikasinya di Indonesia)*". Skripsi untuk tidak di terbitkan. Medan: Depertement Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara hal-85.

> Etika merupakan aturan maka moral adalah sikap dalam berpolitik. Etika dan moral tersebut mengarahkan bagaimana seseorang yang menganut *high politics* di dalam bertindak dalam semua kegiatan politiknya, jika moral dan etika tersebut rusak maka tokoh politik tersebut akan bisa terjerumus dalam politik praktis...."[67]

High politics yang dilaksanakan dengan moral dan etika yang tinggi akan menciptakan suatu tindakan politik yang akan mensejahterakan banyak orang. Karena dengan moral dan etika yang tinggi politik tersebut akan berjalan dengan baik dan akan mensejahterakan banyak orang karena adanya aturan berprilaku oleh tokoh politik tersebut dalam hal ini etika berpolitik yang dipraktikkan dalam bentuk moral yang tinggi, etika yang mempersoalkan bagaimana manusia tersebut harus bertindak dalam tindakan politik[68]. Lebih dekatnya *high politics* tersebut lebih dekat pada etika politik Islam yang memakai agama dan dalam agama tersebut sudah ada tauhid di dalamnya. Seperti yang di jelaskan oleh Khatib Pahlawan Kayo :

> Politik yang berdasarkan etika adalah sikap perilaku budi luhur dan moral politik yang diperoleh dengan cara-cara yang baik. Etika dan moral yang luhur yang didasarkan kepada Tauhid sangat diperlukan dalam pelaksanaan *high politics* dengan tujuan untuk mengarahkan *high politics* tersebut dalam politik yang mensejahterakan banyak orang....[69]

Begitu pentingnya etika dan moral dalam pelaksanaan *high politics*, etika dan moral tersebut menentukan manusia kedepannya dalam mengemban sesuatu kepercayaan yang telah diberikan, perilaku manusia menentukan dalam kepercayaan yang telah didapat tersebut. Etika dan moral sangat penting dalam

---

[67] Wawancara dengan Mirwan Pulungan, tanggal 10 November 2012.

[68] Ari Sofyan, Etika Politik Islam. (Bandung. CV. Pustaka Setia). Hal 63.

[69] Wawancara dengan Khatib Pahlawan Kayo, tanggal 8 November 2012.

tindakan politik karena ini akan menentukan dari jabatan politik yang diemban tersebut kedepanya, seperti yang dijelaskan oleh Syamsul Bahri Khatib :

> .....Jelas sangat diperlukan, seperti yang disebutkan sebelumnya *high politics* bergantung pada moralitas dan etika.[70]

Dalam membicarakan tentang etika maka tidak bisa dilepaskan dari moral, jika etika merupakan teorinya maka moral adalah sesuatu yang bersifat perintah langsung atau kata lain implementasinya. Franz Magnis mengatakan kewajiban moral adalah kewajiban manusia sebagai manusia dia mencontohkan moral seperti seorang pegawai sering memakai uang kantor tetapi tidak pernah mengantinya atau melunasinya. Moral sangat penting di dalam setiap tindakan politik *high politics* menuntut adanya moralitas yang tinggi dari setiap penganut konsep tersebut.

Jika etikanya jabatan politik tersebut merupakan amanah maka moralitasnya dalam menjalankan amanah tersebut seseorang tokoh politik harus mensejahterakan banyak orang dengan jabatan politik yang diemban tersebut bukan mensejahterakan individu atau kelompok tertentu. Kenyataan tersebut sesuai adanya dengan yang disampaikan Amien Rais bahwa etika dan moral diperlukan dalam pelaksanaan *high politics.* Dari hal tersebut peneliti bisa menyimpulkan bahwasanya pandangan mereka tentang *high politics* sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Amien Rais dengan adanya kesamaan pentingnya etika dan moral dalam *high politics* yang bersumber dari Tauhid yang merupakan ajaran Islam. Tauhid tersebut yang menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan *high politics* seperti yang diutarakan oleh Amien Rais, dalam konsep

[70] Wawancara dengan Syamsul Bahri Khatib, tanggal 3 Desember 2012.

Tauhid, politik haruslah mengindahkan nilai-nilai agama dan fungsional terhadap tujuan dakwah dalam politik tersebut. Tauhid harus integral dan terefleksi dalam sikap, tindakan dan pemikiran termasuk dalam gagasan dan manifestasi dalam *high politics* tersebut yang akan menjadi pondasi dalam *high politics*. Seperti yang diutarakan oleh Salman M, Noer :

> Tauhid sebagai alat kontrol dalam berpolitik atau sebagai pondasi dasar dalam *high politics*.....[71]

Moral dan etika yang bersumber dari tauhid yang merupakan ajaran agama Islam juga akan menciptakan suatu suasana yang akan membuat tokoh politik tersebut akan menjalankan tugas politiknya demi kemakmuran banyak orang. Tauhid yang merupakan barometer dalam pelaksanaan *high politics* karena Tauhid tersebut mengajarkan nilai-nilai yang baik dalam bertindak dan berbuat dala kehidupan baik dunia maupun akhirat dalam berpolitik, tauhid dipakai untuk menunjukkan bagaimana manusia bersikap dalam berpolitik seperti yang diungkapkan oleh anggota PWM Sumatera Barat 2005-2010 Dasman Lanin :

> Dalam *high politics* perlunya sebuah payung yang melindunggi dalam hal ini yaitu Tauhid, yang merupakan bagian agama. Jika agamanya kuat maka orang tersebut akan berpolitik dengan baik.....[72]

Walaupun Tauhid merupakan masalah agama yang tidak bisa disatukan dengan politik tetapi dengan Tauhid tersebut politik bisa berjalan dengan baik karena dengan agama yang tinggi maka tokoh politik tersebut akan menjalankan jabatan politiknya dengan baik, seperti yang dijelaskan oleh M.Hasan Junus :

---

[71] Wawancara dengan Salman M.Noer, tanggal 16 November 2012.

[72] Wawancara dengan.Dasman Lanin ,tanggal 30 November 2012.

> Tauhid merupakan masalah agama yang tidak bisa disatukan dengan politik, tetapi tauhid diperlukan dalam bergerak / berjuang seseorang dalam ber *high politics*, atau sebagai dasar perjuangan seseorang dalam hal ini *high politics*.....[73]

Amien Rais dalam bukunya juga mengatakan bahwa dengan Tauhid yang merupakan ajaran agama Islam digunakan sebagai payung dalam pelaksanaan *high politics* artinya melindungi dari semua tindakan moral dan etika yang jelek yang akan merusak kebaikan yang telah ada pada *high politics* tersebut, payung tersebut akan melindungi semua tindakan politik yang ada yang akan menciptakan kesejahteraan banyak orang dengan politik yang dilindungi oleh tauhid tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Marhadi Effendi

> Tauhid diperlukan dalam *high politics* karena merupakan payung dan pengontrol dalam pelaksanaan *high poltics*....[74]

Melihat pandangan-pandangan elit-elit pada PWM Sumatera Barat tersebut dan menghubungkannya dengan penjelasan Amien Rais tentang *high politics,* peneliti melihat bahwa elit-elit tersebut memahami *high politics* tersebut merupakan sebuah tindakan berpolitik dengan mengutamakan kepentingan banyak orang dibandingkan dengan kepentingan individu atau kelompok dengan mensejahterakan banyak orang dari jabatan politik tersebut dan berdasarkan aspirasi rakyat dengan berlandaskan ajaran-ajaran agama (tauhid) dalam pelaksanaanya dengan bersandar dengan etika yang merupakan sistem, prinsip moral atau aturan berperilaku dan moral yang tinggi yang bersumber dari ajaran Tahuid tersebut. Sehingga tokoh politik yang menganut *high politics* tersebut

---

[73] Wawancara dengan M.Hassan Junus, tanggal 1 November 2012.
[74] Wawancara dengan Marhadi Effendi, tanggal 1 Desember 2012.

tidak jatuh kepada politik praktis (*Low Politics*) yang penuh dengan intrik dan menghalalkan segala cara dalam memuaskan kepentingan.

Elit-elit tersebut menganggap jika berpolitik tidak berdasarkan dengan etika dan moral yang tinggi maka politik tersebut akan berjalan tanpa arah dan bermuara pada kesengsaraan banyak orang karena orang yang memiliki jabatan politik tersebut hanya mementingan kepentingan diri sendiri dan kelompok atau dalam hal ini disebut dengan politik praktis. Elit-elit yang berada pada PWM Sumatera Barat 2005-2010 memahami bahwa *high politics* adalah politik yang berjangka panjang yang tidak mementingkan kepentingan individu atau kelompok yang berdurasi sesaat yang berlandaskan etika dan moral yang tinggi. Maka pimpinan wilayah Muhammadiyah tersebut sudah bisa membedakan antara *high politics* dengan *low politics*. Khatip Pahlawan Kayo menjelaskan tentang *low politics* :

> *Low politics* merupakan politik yang nista yaitu dalam hal ini politik praktis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan dan merugikan banyak orang.....[75]

Dari penjelasan tersebut bisa kita lihat bahwa *low politics* penuh dengan intrik-intrik dalam meraih kekuasaan serta keuntunggan bagi individu atau kelompok. Sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Dasman Lanin :

> "*Low politics* atau politik praktis merupakan politik yang berjangka pendek yang penuh dengan intrik kepentingan sesaat dan kepentingan individu atau kelompok dari jabatan politik yang diemban oleh tokoh politik tersebut....[76]

---

[75] Wawancara dengan Khatib Pahlawan Kayo, tanggal 8 November 2012.

[76] Wawancara dengan Dasman Lanin ,tanggal 30 November 2012.

High politics yang dipandang oleh elit-elit tersebut sebagai sebuah gerakan politik yang mensejahterakan banyak orang dengan tidak tejatuh kedalam politik praktis yang penuh dengan intrik dan pemenuhan kebutuhan pribadi atau kelompok tidak mementingkan kepentingan banyak orang yang berjangka panjang dengan didasarkan kepada Tauhid yang bersandar pada etika dan moralitas yang bersumber dari Tauhid tersebut. Berbeda dengan *low politics* yang hanya berjangka pendek dan penuh dengan kepentingan sesaat dan cenderung terjerumus kedalam korupsi karena tidak adanya etika dan moral yang tinggi dalam *low politics* tersebut sehingga politik yang seperti itu berjalan tanpa arah dan bermuara pada kesengsaraan seperti yang diutarakan oleh Amien Rais tentang *low politics.*

High politics adalah politik yang didasarkan kepada konsep Tauhid sebagai prinsip utamanya. Menurut Amien Rais politisi tersebut haruslah bersandar pada moralitas dan etika yang bersumber dari ajaran tauhid. Apabila moralitas dan etika ini dilepaskan dari politik, maka politik tersebut akan berjalan tanpa arah, dan bermuara pada kesengsaraan banyak orang, Sedangkan *high politics* menurut informan penelitian ini dipahami sebagai suatu tindakan politik dengan tidak jatuh ke dalam politik praktis (*low politics*) yang hanya merupakan politik jangka pendek dan mengutamakan kepentingan orang banyak tidak mengutamakan kepentingan individu atau kelompok tertentu atau dengan kata lain politik jangka panjang dengan bersandar kepada etika dan moral yang luhur yang bersumber dari ajaran Tauhid yang merupakan ajaran Agama Islam.

Melihat dua macam pandangan tentang *high politics* tersebut secara konsep yang diutarakan oleh Amien Rais tentang *high politics* tidak berbeda jauh

dengan pandangan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah di Sumatera Barat tersebut. Amien Rais mengatakan bahwa *high politics* bertujuan untuk menghindari Muhammadiyah jatuh ke dalam politik praktis (*low politics*) sedangkan menurut informan penelitian *high politics* merupakan suatu tindakan dalam berpolitik dengan tidak jatuh ke dalam politik praktis (*low politics*) dengan bersandar pada etika dan moral yang luhur dan demi kepentingan banyak orang bukan individu atau kelompok tertentu. Amien Rais juga mengutarakan bahwasanya seseorang yang ber-*high politics* harus bersandar pada etika dan moral yang luhur yang bersumber dari ajaran Tauhid. Menurut informan etika dan moral menjadi hal yang penting dalam mempraktekkan *high politics* tersebut. Sedangkan menurut Amien Rais etika dan moral yang bersumber dari ajaran tauhid merupakan sandaran dalam *high politics,* jika etika dan moral tidak ada maka politik tersebut akan berjalan tanpa arah dan bermuara pada kesengsaraan banyak orang atau tidak lain akan jatuh ke dalam politik praktis (*low politics*). Adanya kecocokan tentang pentingnya etika dan moral dalam *high politics* baik itu dari pendapat Amien Rais langsung maupun pendapat informan penelitian, melihat hal tersebut peneliti melihat bahwasanya pandangan mereka tentang *high politics* tersebut sesuai adanya dengan yang disampaikan oleh Amien Rais.

Melihat dua pendapat tentang *high politics* tersebut peneliti melihat bahwasanya pentingnya etika dan moral dalam *high politics.* Etika yang memberikan bagaimana manusia harus bertindak dan moral yang menjelaskan bagaimana manusia lebih baik kedepannya sesuai yang dijelaskan oleh Frans Magnis Suseno. Etika yang bersifat *subsidair* contohnya larangan mengambil

yang bukan hak kita dalam jabatan politik yang dimiliki. Elit-elit tersebut menganggap dalam jabatan politik tersebut adanya amanah dari Tuhan dan masyarakat yang harus dijaga cara menjaganya dengan etika dan moral bagaimana dia bertindak dengan jabatannya dan berbuat lebih baik dengan jabatannya hal itu senada dengan yang diungkapkan Amien Rais yaitu etika dan moral menjadi sandaran dalam *high politics*.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada teori etika yang membicarakan bagaimana keadaan manusia dan manusia harus bertindak sedangkan moralitas membicarakan manusia sebagai manusia moral diartikan sebagai manusia lebih baik kedepannya dan keadaannya pada lapangan seseorang tokoh politik yang memiliki jabatan politik itu merupakan keadaannya dan bagaimana dia harus bertindak dengan jabatan politiknya jika dia bisa tokoh politik tersebut bisa mengunakan jabatan politiknya dengan baik maka etika politik dari tokoh tersebut juga baik karena dia tahu harus bagaimana dengan jabatan politiknya tersebut kemana dia mengarahkan jabatan politiknya tersebut kepada yang baik atau kemudaratan itu semua juga tergantung pada tauhid dari orang tersebut untuk itulah Amien Rais mengatakan bahwasannya etika dan moral menjadi sandaran *high politics* yang bersumber dari ajaran tauhid.

Dari itu semua peneliti menyimpulkan bahwasannya informan peneliti yang menganggap *high politics* merupakan suatu tindakan politik dengan tidak jatuh ke dalam politik praktis (*low politics*) yang hanya merupakan politik jangka pendek dan mengutamakan kepentingan orang banyak tidak mengutamakan kepentingan individu atau kelompok tertentu atau dengan kata lain politik jangka

panjang dengan bersandar kepada etika dan moral yang luhur yang bersumber dari ajaran tauhid yang merupakan ajaran Agama Islam. Hal tersebut hampir sama yang di ungkapkan oleh Amien Rais bahwasannya tujuan *high politics* tersebut adalah untuk menghindari Muhammadiyah jatuh ke dalam politik praktis. *High politics* memerlukan etika dan moralitas yang bersumber dari ajaran Islam dalam pelaksanaanya, informan penelitian beranggapan juga sama yaitu menganggap etika dan moral diperlukan dalam pelaksanaan *high politics.* Etika jabatan politik merupakan amanah maka moralitasnya jabatan politik tersebut dijalankan untuk mensejahterakan banyak orang.

Melihat hal tersebut, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwasannya pandangan pimpinan wilayah Muhammadiyah di Sumatera Barat terhadap *high politics* hampir sama dengan pandangan dan tujuan yang di berikan oleh Amien Rais tentang *high politics.* Secara pengutaraan lewat lisan memang berbeda tapi secara konsep yang ada dan tertulis pendapat elit-elit tersebut dengan Amien Rais sama.

Selanjutnya dalam hal mempraktekkan *high politics* tersebut dalam dunia politik elit-elit Muhammadiyah yang berada pada lingkungan pimpinan wilayah Muhammadiyah yang terjun ke dalam dunia politik untuk tidak melupakan *high politics* yang dia dapat sewaktu di Muhammadiyah. Caranya yaitu jabatan politik yang mereka anggap sebagai amanah yang nantinya akan ada pertanggung jawabanya (*accuountability*) pada Allah dan masyarakat lainya untuk dijalankan dengan sungguh-sungguh dengan mensejahterakan banyak orang dari jabatannya tersebut dan tidak merusak akhlak mereka dengan mudah terbujuk oleh rayuan

dari individu atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dan tidak jatuh ke dalam politik praktis (*low politics*). Menghindari semua ajakan, tindakan, dan hal-hal yang akan dapat memicu terjadinya korupsi dan saling mengawai satu sama lain antar pejabat politik tersebut untuk menghindari korupsi yang itu semua merupakan bagian dari politik praktis (*low politics*) . Hal tersebut merupakan cara di dalam mempraktekkan *high politics* dalam kehidupan berpolitik.

Hal tersebut senada dengan tujuan Amien Rais dalam mengenalkan *high politics* dalam Muhammadiyah yang bertujuan untuk menghindari Muhammadiyah jatuh ke dalam politik praktis. Praktek *high politics* dengan cara tidak mudah terbujuk oleh rayuan dari individu atau kelompok tertentu yang akan merusak akhlak dari tokoh politik tersebut dan menjalankan jabatan politik dengan sungguh-sungguh dengan penuh amanah berarti apa yang ingin dituju oleh Amien Rais melalui *high politics* tersebut telah tercapai karena tujuan Amien Rais memperkenalkan *high politics* adalah untuk menghindari Muhammadiyah jatuh ke dalam politik praktis (*low politics*) karena salah satu bentuk dari politik praktis adalah mudah terjerumus dalam bujuk rayu untuk memperoleh kekuasaan.

Menjalankan jabatan politik tersebut sebagai amanah yang bertujuan untuk mensejahterakan banyak orang dari jabatan politik yang diemban tersebut membuktikan bahwasanya etika dan moral mereka telah baik dalam berpolitik. Karena jika etika dan moral mereka akhlak mereka akan rusak dan akan mudah terjerumus dalam bujuk rayu sehingga akan merugikan orang banyak nantinya. Etika dan moral yang merupakan sandaran dalam *high politics*, etika dan moral mereka yang telah bagus dengan menjalankan jabatan politik tersebut dengan

sunguh-sunguh dapat diartikan bahwasannya *high politics* tersebut sudah dipraktekkan dengan baik oleh elit-elit tersebut.

Jika elit tersebut bisa menjaga amanahnya berarti etika dan moralitas yang merupakan sandaran *high politics* sudah ada pada diri masing-masing elit tersebut. Jika etika adalah aturan maka moral adalah implementasinya, jika etikanya adalah jabatan politik merupakan amanah maka moralitasnya jabatan politik tersebut digunakan untuk mensejahterakan banyak orang bukan individu atau kelompok-kelompok tertentu. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang praktek terbaik dari *high politics* tersebut *Pertama*: Jabatan politik yang merupakan amanah yang memiliki pertanggung jawaban nantinya baik itu kelak kepada Allah S.W.T dan kepada masyarakat banyak nantinya. Berpolitik dengan Tauhid yang merupakan ajaran agama. *Kedua*: Secara berkelanjutan menunjukkan sikap atau kesadaran dalam berprilaku politik yang tercermin dari ketinggian moral dalam berpolitik oleh tokoh politik tersebut.

Ada beberapa hal dalam penerapan *high politics* dalam Muhammadiyah setelah disimpulkan dari penelitian ini : *pertama*, ciri-ciri *high poltics* sudah ada dalam jati diri Muhammadiyah yaitu jabatan politik berupa amanah, adanya pertanggung jawaban dan prinsip persaudaraan ketiga ciri tersebut sudah ada dalam jati diri Muhammadiyah. *Kedua*, dengan adanya ciri-ciri tersebut elit Muhammadiyah yang betul-betul memiliki jiwa Muhammadiyah akan menganggap jabatan politik yang dia dapatkan tersebut merupakan amanah dari masyarakat yang memiliki pertanggung jawaban kepada Tuhan dan masyarakat yang jika pertanggung jawaban tersebut terpenuhi maka akan menciptakan

persaudaraan yang kuat antara tokoh politik tersebut dengan masyarakat. *Ketiga,* memajukan semua nilai-nilai tersebut atau dalam hal ini ciri-ciri *high politics* tersebut ke dalam kancah politik dengan cara tahan suap, tidak mencari celah dalam mencari keuntungan atau tidak terjatuh ke dalam politik praktis (*low politics*) yang hanya berjangka pendek.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

High politics yang merupakan suatu reformulasi konsep politik yang dikenalkan oleh Amien Rais pada Muhammadiyah, *high politics* merupakan suatu konsep yang Muhammadiyah dalam berpolitik. Konsep tersebut dikenalkan Amien Rais pada Muhammadiyah untuk menghindari Muhammadiyah jatuh ke dalam politik praktis (*low politics*). *High politics* merupakan suatu jargon politik yang berasalkan kepada tauhid sebagai pondasinya dan bersandar pada etika dan moralitas yang bersumber dari tauhid jika moral dan etika dilepaskan dari politik maka politik tersebut akan berjalan tanpa arah dan bermuara pada kesengsaraan banyak orang atau politik praktis (*low politics*). Jargon *high politics* tersebut kurang mendapat sorotan pada saat sekarang ini karena pada saat sekarang ini lebih banyak tokoh-tokoh politik yang banyak terjun langsung dalam politik praktis. Untuk itu penelitian ini telah mengukur pandangan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat tentang *high politics* dan bentuk praktek terbaiknya (*best practices*) dari *high politics* tersebut.

High politics tersebut dipahami oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat dalam hal ini pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) periode 2005-2010, elit-elit tersebut memahami *high politics* sebagai salah satu cara berpolitik yang berjangka panjang dan tidak jatuh ke dalam politik praktis (*low politics*) yang bertujuan untuk memakmurkan banyak orang dengan berlandaskan moral dan etika yang luhur yang bersumber dari ajaran Tauhid, bukan berpolitik

yang jangka pendek yang cenderung banyak mengambil keuntunggan dari jabatan politik yang dia dapatkan tersebut. Elit-elit tersebut menganggap jabatan politik itu adalah amanah dari masyarakat yang memiliki pertanggung jawaban (*accountability*) baik itu kepada Tuhan maupun kepada masyarakat, jika amanah tersebut betul-betul dijalani oleh tokoh tersebut dengan sungguh-sungguh maka tokoh tersebut bisa mempertanggung jawabkan jabatanya tersebut yang akan menciptakan persaudaraan yang kuat (*brother hood*) karena adanya saling kepercayaan antara tokoh politik tersebut dan masyarakat.

High politics dijalankan atau dipraktekkan oleh elit-elit tersebut dengan cara jabatan yang didapat tersebut dianggap betul-betul amanah dari masyarakat dengan tidak mudah terbujuk oleh sesuatu yang menguntungkan tokoh tersebut seperti saling sogok dan mengambil keuntungan lainnya tetapi merugikan orang banyak dan tidak berpolitik praktis (*low politics*) yang hanya berjangka pendek. *High politics* tersebut tidak boleh saling dukung mendukung dalam meraih sesuatu yang akan menguntungkan individu atau kelompok tertentu. Menganggap jabatan politik tersebut betul-betul amanah dari rakyat yang memiliki pertanggung jawaban kepada Tuhan dan masyarakat. Menghindari semua ajakan, tindakan, dan hal-hal yang akan dapat memicu terjadinya korupsi dan saling mengawai satu sama lain antar pejabat politik tersebut untuk menghindari korupsi yang itu semua merupakan bagian dari politik praktis (*low politics*) dan praktek korupsi kolusi dan nepotisme (KKN)

6.2 Saran

Berdasarakan penelitian yang peneliti lakukan dalam beberapa bulan ini oleh penulis, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam konteks khususnya yang lebih berorientasi pada politik Islam di Indonesia. *Pertama,* bagi kaum akademik: mahasiswa, dosen, pengajar, peneliti dan para birokrat, anggaplah penelitian ini sebagai wacana yang dapat meramaikan perbincangan metodologis dalam studi Islam terutama di Indonesia. *Kedua,* dari hasil penelitian ini, setidaknya memiliki kelayakan untuk dijadikan pertimbanggan dari peneliti lain yang akan mengkaji objek penelitian yang sama dengan penelitian ini, dengan metode dan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian kajian tentang pandangan politik akan menemukan bentuknya.

Ketiga, bagi mereka yang terlibat ke dalam dunia politik maka setidaknya kontribusi Amien Rais melalui formulasi politik adiluhung yang kemudian di konsepsikannya dalam bentuk *high politics,* dapat dijadikan referensi etis dalam berprilaku politik maupun membangun sebuah sistem nilai cita-cita Islam guna membangun sebuah masyarakat dan Negara yang adil, terbuka dan demokratis. Dan terakhir, di dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang pandangan dan praktik terbaik (*best practices*) elit Muhammadiyah Sumatera Barat tentang *high politics,* namun penulis mengakui bahwa penelitian ini sangat kurang sempurna yaitu dalam melihat pandangan dari elit-elit Muhammadyah yang berada pada daerah-daerah lainnya. Untuk itu supaya penelitian ini bisa menjadi sumber atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Asril, Zaili. Karim, Sofyan. Kayo RP B. 2000. *Menyemangati kembali peran Muhammadiyah di Minangkabau* .Padang.YATJG.

Bahar, Ahmad. 2004. *Biografi anak Cendikiawan Amien Rais: Gagassan dan pemikiran Indonesia Baru. Yokyakarta*: Pena Cendikia.

Crowther, Jhonathan (Ed).1995. *Oxford Advanced Learner's Dictonary*, London: Oxford University Press.

Hamdan, Hambali.2007. *Idiologi dan Strategi Muhammadiyah.* Yokyakarta: Suara Muhammadiyah.

Pasha, Musthafa Kamal. 2002. *Muhammadiyah sebagai gerakan Islam.* Yokyakarta: Perpustakaan Freedom.

Najib, M. 1998. *Suara Amien Rais Suara Rakyat.* Jakarta: Gema Insani Press.

Rais, M. Amien. 2004. *Hubungan Antara Politik dan Dakwah.*: Bandung.

_____ 1995. *Moralitas Politik Muhammadiyah.* Yokyakarta: Dinamika.

Sofyan, Ayi. 2012. *Etika Politik* Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.

Suseno,Frans Magnis.2003 *Etika politik ,prinsip-prinsip ketatanegaraan modern.* Jakarta.PT.gramedia pustaka utama.

Thohari, Y. Hajriyanto. 2005. *Muhammadiyah dan Pergulatan Politik Islam Modernis*. Jakarta

Tim Penulis Rosda,1995. *Kamus Filsafat*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Buku Metodologi

Denzin, K. Norman & Lincoln, S. Yvonna. 2009. *Hand Book Of Qualitative Research.* Yokyakarta: Pustaka Pelajar.

Koentjaraningrat.1982."pendahuluan : memperkenalkan aspek manusia dalam penelitian masyarakat ". Dalam Koentjaraningrat & Emerson, Donald K.1982 *aspek manusia dalam penelitian masyarakat.* Jakarta : PT Gramedia

Maleong, Lexy J .1996. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV Alfabeta.

Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan.* Jakarta: Prenada Media Group.

Jurnal dan Skripsi

Suwarno.2004. *political behavior of Muhammadiyah and its Relation to The State During The Reformation Era"*, FKIP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Vol. 6, No. 2, 2005 : 189-206.

Septian, Daniel. 2009."*Pemikiran Politik Amien Rais"*. Skripsi tidak untuk diterbitkan. Medan: Depertement Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Syaiful. 1996."*Organisasi Islam Muhammadiyah di Kurai Taji Padang Pariaman (1929-1976)*". Skripsi untuk tidak diterbitkan. Padang: jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas.

Website

Beny Utama, Afiliasi elit Muhammadiyah di Sumatera Barat. Dapat diakses pada *http://www.pasamankab.go.id/article-bupati-benny-utama muhammadiyah-harus-aktif-bangun-karakter-bangsa.html* di akses pada tanggal: 28 Februari 2012.

Burhanudin, *high politics* sebagai manual berpolitik . dapat diakses pada (*http://burhan15 .multiplay.com/journal/item/55* diakses pada tanggal 28 Februari 2012.

Hadi Putra Wirman,2006. Muhammadiyah dan gerakan tharbiyah. Dapat diakses pada*http://dualmode.kemenag.go.id/acis10/file/dokumen/HardiPutraWir man.pdf* di akses pada : 28 Februari 2012.

Meraba arah politik Muhammadiyah. Dapat diakses pada *http://jabarkita.com /2011/04/meraba-arah-politik-praktis-muhammadiyah-dari-masa-kemas/* diakses pada tanggal 9 Juli 2012.

www.muhammadiyah.*or.id*

Sumber-sumber lain

Data-data tertulis dari sekretariat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat.

LAMPIRAN PENELITIAN

LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No. : 966 /SP.X.FISIP.2012

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
A.N.: Mhd. Nofriyanda Falayati BP. 07993026

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya diwajibkan menyusun/menulis karya ilmiah berupa skripsi.
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :
a. N a m a : Mhd. Nofriyanda Falayati
b. No.BP. : 07993026
c. Jurusan : ILMU POLITIK

Dalam menyelesaikan program studinya akan menyusun/menulis skripsi.

2. Bahwa untuk kelancaran penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa tersebut perlu adanya bimbingan dan pembinaan yang intensif.

3. Berdasarkan sub a, b dan c, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980;
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990;
4. Keputusan Mendikbud RI No.0124/0/1993;
5. Keputusan Mendikbud RI No.0202/0/1993;
6. Keputusan Rektor Univ Andalas No.1033/XIV/U/-1999;
7. Keputusan Rektor Univ Andalas No.694/VII/A/U/-2002;
8. Buku Pedoman FISIP Universiatas Andalas tahun 2001.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si	Pembimbing I	Rp. 85.000,-
Sadri, S.IP, M.Soc	Pembimbing II	Rp. 65.000,-

Penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

a. N a m a : Mhd. Nofriyanda Falayati
b. No.BP. : 07993026
c. Jurusan : ILMU POLITIK
d. Judul Skripsi : Pandangan Elit Muhammadiyah terhadap Praktek Demokrasi di Indonesia Saat ini

- Kedua : Diharapkan kepada Dosen Pembimbing dapat melakukan bimbingan dan pembinaan dalam menyusun/penulisan Skripsi, mahasiswa ini dengan sebaik-baiknya

- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang.
Pada Tanggal : 04 Januari, 2012

DEKAN,

Drs. Alfan, MS
NIP. 196501061989011001

Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN 2

UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang, Telp (0751) 71266 Fax.71266

Nomor : 203 /UN.16.09/PP/2012
Lamp. : -
H a l : **Survai Awal.**

Kepada Yth:

.....

di

Tempat

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;

Nomor Bp.	:	07993026
N a m a	:	Muhammad Nofri Yanda Falayati
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Politik
Alamat	:	Padang Baru
Dengan Judul	:	Pandangan Elit Muhammadiyah di Sumatera Barat terhadap Konsep High Politics
Lokasi	:	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat

Untuk melaksanakan penelitian/survai awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi.

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengaharapkan bantuan saudara dapat memberikan *izin/rekomendasi* seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 08 Februari 2012

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Afrizal, MA
Nip.19620520 198811 1 001

Tembusan:
1.Rektor Univ.Andalas
2.Ketua Jurusan
3.Dosen Pembimbing
4.Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 3

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 890/SP.X.FISIP.2012

Tentang

Tim Penguji Proposal

A.N.: M.Nofriyanda Falayati BP. 07993026

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti seminar proposal.

b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

Nama : M.Nofriyanda Falayati
No.BP. : 07993020
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Pemahaman Elit Muhammadiyah di Sumatera Barat terhadap Konsep *High Politics*.

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Seminar Proposal.

c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo 66 Tahun 2010 tentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0196/O-1995 tentang SOTK Unand;
4. Keppres No.79/M/Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Univ. Andalas.
5. SK.Rektor Univ.Andalas :1351/III/A2008 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Unand.
6. Buku Pedoman FISIP Unand 2011/2012.
7. DIPA Unand Tahun.2011 Nomor. 0675/023-042.16/03/2011 tanggal 20 Desember 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- **Pertama** : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Drs.Tamrin,M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Indah Adi Putri,S.IP,MA	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Tengku Rika Valentina,S.IP,MA	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Dr.Asrinaldi,S.Sos,M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
5. Sadri,S.IP,M.Soc.Sc	Anggota	Rp. 15.000,-

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

Nama : M.Nofriyanda Falayati
No.BP. : 07993026
Jurusan : Ilmu Politik

- **Kedua** : seminar Proposal dilaksanakn pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 22 Juni 2012
Jam : 09.00 WIB
Tempat : R. Sidang Jurusan

- **Ketiga** : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan/pimpinan fakultas.

- **Keempat** : Syarat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PADANG.
PADA TANGGAL : 18 JUNI 2012

DEKAN,

Drs. Alfitd, MS
NIP. 19650106198901 1001

Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Universitas Andalas

LAMPIRAN 4

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang, Telp (0751) 71266 Fax.71266

Nomor : 8550 /UN.16.09/PP/2012
Lamp. : -
H a l : **Izin Penelitian.**

Kepada Yth: .....

.....

di

.....

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa kami menugaskan mahasiswa FISIP Universitas Andalas ;

Nomor Bp.	:	07993026
N a m a	:	M. Nofri Yanda Falayati
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Politik
Alamat	:	Padang Baru Padang
Dengan Judul	:	Pemahaman Elit Muhammadiyah di Sumatera Barat terhadap High Politics
Waktu	:	2 Bulan
Lokasi	:	PWM Sumatera Barat
Dalam Rangka	:	Penulisan Skripsi

Untuk melaksanakan penelitian/survai awal/studi pustaka/praktek lapangan dalam rangka persiapan penulisan skripsi..

Oleh karena itu kami mohon bantuan Saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Disamping itu kami juga mengaharapkan bantuan saudara dapat memberikan *izin/rekomendasi* seperlunya mengenai tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian Saudara, sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Padang, 10 Oktober 2012

An. Dekan
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. Afrizal, MA
NIP.19620520 198811 1 001

Tembusan:
1. Rektor Univ.Andalas
2. Ketua Jurusan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 5

PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

Jl. Bundo Kanduang No. 1 Telp. (0751) 28683 Fax. (0751) 33083 Kotak Pos 121 Padang 25118
e-mail : pwmsumbar2005@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 105/KET/II.0/F/2013

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a	:	**Muhammad Nofriyanda Falayati**
BP	:	07993026
Jurusan	:	Ilmu Politik
Fakultas	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian lapangan untuk kepentingan penulisan skripsi dengan judul ***"Pemahaman Elit Muhammadiyah di Sumatera Barat Terhadap High Politics",*** di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, dari tanggal 05 November 2012 sampai 29 Januari 2013. Adapun nama-nama yang diwawancarai sebagaimana terlampir.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 17 Rabiul Awal 1434 H
29 Januari 2013 M

Wassalam

Ketua,	Sekretaris,
Drs. H. Dasril Ilyas	**Drs. H. Nurman Agus**
NBM. 667.582	**NBM. 756.246**

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

LAMPIRAN 6

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554
PADANG

REKOMENDASI
No.B.070/134/SWAS-BKPL/2012

TENTANG IZIN PENELITIAN.

Kami Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Linmas, setelah mempelajari Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas nomor: 2550/UN.16.09/PP/2012 tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Izin penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumatera Barat yang dilakukan oleh :

Nama	: M.NOFRI YANDA FALAYATI.
Tempat/Tgl Lahir	: Bukittinggi /18-11-1988.
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Alamat	: Jl. Batang Sinamar 2 Padang Baru Padang.
No.Kartu Identitas	: 07993026.
Judul Penelitian	:"PEMAHAMAN ELIT MUHAMMADIYAH DI SUMATERA BARAT TERHADAP HIGH POLITICS"
Lokasi Penelitian	: PWM Sumatera Barat.
Waktu Penelitian	: 2 Bulan.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Oktober 2012.
An.KEPALA BADAN KESBANG POL DAN LINMAS
PROVINSI SUMATERA BARAT
KASUBID PAM DAN WASPADNAS

MUZAHAR, S.SOS,MSi.
Pembina.
NIP. 19681122 199009 1 002.

Tembusan Kpd Yth.
1.Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik di Jkt.
2.Bapak. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang (sbg laporan).
3.Sdr. Walikota Padang Cq. Kepala Kesbangpol di Padang
4. Sdr. Kepala PWM Sumatera Barat di Padang.
5.Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN 7

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
No.: 68 /UN16.08.D/PP/2013
Tentang
Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa
A.N.: Muhammad Nofriyanda Falayati BP.: 07993026

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah menyelesaikan penyusunan/penulisan skripsi dan telah memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti ujian skripsi.

b. Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas :

N a m a	:	Muhammad Nofriyanda Falayati
No. BP.	:	07993026
Jurusan/Prodi	:	Ilmu Politik
Judul	:	Pemahaman Elit Muhammadiyah di Sumatera Barat Terhadap High Politics

Telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi tersebut.

c. Berdasarkan sub .a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa dimaksud dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No. 17 Tahun 2010 jo PP No.66 Tahun 2010 tentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 25/2012 tentang OTK Universitas Andalas;
4. Keputusan Mendikbud RI No. 258/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2011-2012.
5. Keputusan Rektor No. 832/III/A/Unand-2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP
6. Keputusan Rektor No. 358/III/A/Unand-2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
7. Buku Pedoman FISIP Unand 2012/2013.
8. DIPA Unand tahun 2012 No. 0675/023-04.2.16/03/2012 tanggal 09 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan	Honor
1. Drs.Tamrin, M.Si	Ketua	Rp. 25.000,-
2. Tengku Rika Valentina, S.IP, MA	Sekretaris	Rp. 20.000,-
3. Dewi Anggraini, S.IP, M.PP	Anggota	Rp. 15.000,-
4. Drs.Syaiful, M.Si	Anggota	Rp. 15.000,-
5. Dr. Asrinaldi, S.Sos, M.Si	Pembimbing I	Rp. 15.000,-
6. Sadri, S.IP,M.Soc.sc	Pembimbing II	Rp. 15.000,-

Tim penguji ujian skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas.

N a m a	:	Muhammad Nofriyanda Falayati
No. BP.	:	07993026
Jurusan/Prodi	:	Ilmu Politik

- Kedua : Ujian dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	:	Senin / 22 April 2013
Jam	:	10.00 WIB
Tempat	:	R. Sidang Jurusan

- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.

- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG.
PADA TANGGAL : 15 April 2013

DEKAN,

Prof.Drrer.soz Nursyirwan Effendi
NIP. 196406241990011002

Tembusan :
1. Yth.Rektor Universitas Andalas
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
3. Subag. Keuangan FISIP Unand di Padang

GAMBAR PELAKSANAAN PENELITIAN

Gambar 1

Wawancara dengan Drs.H.RB. Khatib Pahlawan Kayo ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat periode 2005-2010, tanggal 8 November 2012 di Padang.

Sumber : dokumentasi peneliti

Gambar 2

Wawancara dengan M.Hassan Junus tanggal 1 November 2012 di Pariaman

Sumber : dokumentasi peneliti

NO	PERTANYAAN	INFORMAN				
		Khatip Pahlawan Kayo	**Drs.Mirwan Pulunggan, M.Pd**	**Drs.Adrian Muis Ch.Saripado**	**Drs.Salman M.Noer, M,Pd**	**Prof.Dasman Lanin P,hD**
		Ketua Umum PWM Sumbar 2005-2010	Wakil ketua PWM Sumbar 2005-2010	Sekretaris PWM Sumbar 2005-2010	Bendahara PWM Sumbar 2005-2010	Anggota PWM Sumbar 2005-2010
1	Apakah bapak pengurus pada PWM Sumbar periode 2005-2010 ?	Iya	iya	iya	iya	iya
2	Pada masa bapak berada pada periode tersebut, apakah bapak mengetahui jargon politik yang dikenal dengan nama high politics dalam Muhammadiyah yang dipopulerkan Amien Rais?	Pernah mendengar HP dari Amien Rais waktu sidang tanwir di Surabaya	Amien rais pernah mengenalkan HPdalam muhammadiyah	Pernah	pernah	Pernah mendengar HP tersebut
3	Menurut bapak apa itu high politics ?	Muhammadiyah sebagai organisasi ke Islaman terbesar di Indonesia untuk tidak ikut campur kedalam politik praktis (low politics), tapi walaupun demikian bukan berarti Muhammadiyah tidak tahu politik tetapi Muhammadiyah mengajak kader-kadernya yang terlibat politik dengan tidak terjun kedalam politik praktis tersebut dalam merebut kekuasaan pada eksekutif, legislative maupun yudikatif tetapi berpolitik dengan betul-betul mengemban amanat rakyat dan tidak mengambil keuntunggan dari jabatan yang dimliki	Berpolitik dengan tidak terjatuh kedalam politik praktis (low politics), berpolitik berdasarkan kepentingan rakyat dengan tidak menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu didalam jabatan politik tersebut, dengan berdasarakan tauhid sebagai landasanya dan diiringgi oleh moral dan etika yang baik yang bersumber dari Tauhid tersebut	Politik yang berdasarkan moral dan etika yang baik dan memakai tauhid sebagai payungnya, serta melakukan kegiatan politik yang mensejahterakan banyak orang dan tidak berpolitik praktis(low politics) dengan mengutamakan kepentinggan banyak orang	Berpolitik betul-betul berdasarkan aspirasi rakyat, dengan berpolitik untuk rakyat, mementingkan kepentingan banyak orang dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok dengan berpegang teguh dengan agama dan tidak terjatuh dalam politik praktis(low politics)yang sarat dengan perebutan kekuasaan yang saling menjatuhkan satu sama lain yang berlandakan etika dan moral yang luhur dalam berpolitik	Gerakan moral bangsa dengan berpolitik dalam jangka panjang yang tidak mementingkan kepentingan individu dan kelompok atau kepentinggan sesaat, serta berlandaskan etika dan moral, serta melakukan perubahan pada tatanan moralitas pada tatanan Negara, tidak berdasarkan tatanan praktis dalam hal ini yaitu politik praktis

		dengan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam (Tauhid) yang bersandarkan pada moralitas yang tinggi				
4	Menurut bapak apa yang membedakan high politics dengan low politics?	Low politics merupakan politik yang nista yaitu dalam hal ini politik praktis yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan dan merugikan banyak orang	Berpolitik dengan tidak terjatuh kedalam LP, berpolitik berdasarkan kepentingan rakyat dengan tidak menghalalkan segala cara untuk meraih sesuatu, dengan berdasarakan tauhid sebagai landasanya dengan moral dan etika yang baik	Politik yang cenderung nista dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan.	Kalau LP peluang atau kepentinggan rakyat di kerdilkan	Low politics atau politik praktis merupakan politik yang berjangka pendek yang penuh dengan intrik kepentinggan sesaat dan kepentinggan individu atau kelompok dari jabatan politik yang diemban oleh tokoh politik tersebut
5	Menurut bapak apa tujuan Amien Rais memperkenalkan high politics tersebut pada Muhammadiyah?	Agar muhammadiyah dan elit-elitnya tidak jatuh dalam LP.	Supaya Muhammadiyah tidak terjerumus kedalam politik praktis atau LP	Muhammadiyah sudah lama memakai HP dalam dirinya, amien Rais hanya memformulasikan HP tersebut supaya dapat dipakai oleh elit Muhammadiyah dalam berpolitik yang luhung dan tidak terjatuh dalam politik praktis	Supaya elit Muhammadiyah tidak mengkerdilkan kepentingan rakyat, tetapi supaya tokoh politik yang menganut HP tersebut memikirkan kepentingan rakyat jangka panjang dan jangka pendek	Sebenarnya HP adalah formulasi Amien Rais terhadap roh berpolitik Muhammadiyah yang tidak berpolitik praktis, jadi tujuanya untuk menghindari Muhammadiyah tersebut jatuh dalam politik praktis
6	Dalam high politics ada yang namanya etika dan moral yang diperlukan dalam pelaksanaan HP kalau menurut bapak apa itu etika ? dan kalau moral apa itu pak?seberapa pentingkah elika dan moral dalam pelaksanaan high politics	Politik yang berdasarkan etika adalah sikap perilaku budi luhur dan moral politik yang di peroleh dengan cara-cara yang baik. Etika dan moral yang luhur yang didasarkan kepada Tauhid sangat diperlukan dalam pelaksanaan high politics dengan tujuan untuk mengarahkan high politics tersebut dalam politik yang mensejahterakan banyak orang	Etika merupakan aturan maka moral adalah sikap dalam berpolitik. Etika dan moral tersebut mengarahkan bagaimana seseorang yang menganut high politics didalam bertindak dalam semua kegiatan politiknya, jika moral dan etika tersebut rusak maka tokoh politik tersebut akan bisa terjerumus dalam politik praktis	Etika adalah aturan-aturan sedangkan moral adalah implementasinya dari etika tersebut yang kedua hal tersebut tidak bisa saling dilepaskan dalam pelaksanaan HP, karena kedua hal tersebut merupakan alat penggerak seseorang yang menganut paham dan berpolitik dengan HP.	Etika merupakan sopan santun dalam berpolitik sedangkan moral merupakan implementasi dari etika tersebut yang kedua hal tersebut merupakan sandaran seseorang dalam ber-high politics.	Etika adalah sopan santun atau aturan-aturan sedangkan moral adalah implementasinya. Etika dan moral tersebut dipakai dalam pelaksanaan HP karena kedua hal tersebut merupakan alat penggerak dalam HP
7	Seperti yang kita ketahui pak,	Tauhid merupakan hal	Tauhid digunakan	Seperti yang sudah	Tauhid sebagai alat	Dalam high politics

	ajaran tauhid yang merupakan ajaran islam diperlukan dalam high politics tersebut. Menurut bapak seberapa pentingkah tauhid di dalam high politics tersebut?	yang sangat penting, karena merupakan barometer seseorang dalam berpolitik yang menganut paham atau visi HP. Serta dari Tauhid yang tinggi akan melahirkan moral dan etika yang baik pula.	sebagai paying didalam pelaksanaan HP, oleh karena itu tauhid sangat penting.	disebutkan sebelunya bahwasanya HP memerlukan sebuah payung untuk melindungginya yaitu tauhid.	control dalam berpolitik atau sebagai pondasi dasar dalam high politics	perlunya sebuah payung yang melindunggi dalam hal ini yaitu Tauhid, yang merupakan bagian agama. Jika agamanya kuat maka orang tersebut akan berpolitik dengan baik
8	Dalam high politics tersapat 3 (tiga) macam ciri utama yaitu politik berupa amanah (trust)jabatan politik yang kita dapatkan tersebut merupakan amanah masyarakat yang di berikan Allah kepada kita, setiap jabatan politik mengandung mass'uliyah atau pertanggung jawaban (accountability) maksudnya jabatan yang kita dapatkan tersebut harus di pertanggung jawabkan kepada Allah dan masyarakat dan Kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwah (Brother hood)atau kegiatan politik yang kita lakukan harus dijalankan berdasarkan prinsip persaudaraan keislaman, bagaimana pemahaman bapak terhadap 3 ciri tersebut ?	amanah dalam politik, pertanggung jawaban (accountability) dan prinsip persaudaraan sudah ada pada Muhammadiyah karena ketiga hal tersebut sudah ada pada Muhammadiyah sejak didirikan oleh Ahmad Dahlan dan di tulis dalam pembukaan Muhammadiyah	Amanah politik yang diberikan oleh rakyat dalam politik memiliki pertanggungjawaban dengan ALLAH dan Manusia yang memberikan amanah tersebut, dari itu maka akan terbentuklah sebuah persaudaraan.	Amanah merupakan kepercayaan yang di berikan dalam berpolitik, yang memiliki pertnggung jawaban terhadap amanah tersebut dan dari situ timbullah persaudaraan yang kuat yang ketiga ciri tersebut sudah ada dalam muhammadiyah.	Jabatan politik untuk mengayomi masyarakat yang memiliki amanah didalamnya, dan memiliki pertanggung jawabana kepada ALLAH dan masyarakat	etiga ciri tersebut sudah ada dalam muqaddimah muhammadiyah, maka ketiga hal tersebut memang sejalan dengan Muhammadiyah.

9	Apakah Ciri-ciri high politics di atas sangat membantu atau mempelancar bagi pelakssanaan Amal Makruf Nahi Mungkar dalam Muhammadiyah?	sangat membantu	Sangat membantu dalam pelaksanaan ajaran Muhammadiyah karena dalam ajaran tersebut ciri-ciri di atas tersebut sudah dimiliki	Sangat membantu dalam pelaksanaan amal makruf nahi mungkar dalam muhammadiyah.	Sangat membantu dalam perpolitikan elit-elit dan warga Muhammadiyah yang memiliki jabatan politik	Sangat membantu dalam pelaksanaan amal akruh nahi mungkar, karena sudah ada dalam muqaddimah Muammadiyah.
10	Untuk melakukan konsep high politics, sebuah organisasi memerlukan prasyarat yang tidak ringan yaitu, antara lain, organisasi tersebut harus di perkuat dengan kepemimpinan yang kuat pula, yakni kepemimpinan yang tinggi (high leadership), adanya kelompok tenaga lobbyist yang andal (high diplomacy), dan perlu memiliki lembaga pengkajian yang bermutu. Apakah pada saat itu Muhammadiyah sudah memilikinya ?	Muhammadiyah sudah memiliki kepemimpian yang tinggi sejak berdirinya Muhammadiyah.muhamm adiyah melahirkan tenaga lobist yang handal baik dalam melobi	Kepemimpinan yang tinggi sudah ada pada Muhammadiyah dari itu maka di bawahnya akan adanya tenaga lobbist yang handal untuk menciptakan hubungan dengan luar dan addanya lembaga pengkajian yang bermutu pada Muhammadiyah.	Ketiga syarat tersebut sudah ada dalam muhammadiyah sejak dahulu muhammadiyah berdiri.	Muhammadiyah sudah memiliki prasyarat tersebut	Muhammadiyah eudah memilki hal tersebut sejak zaman kh.ahmad dahlan.
11	Menurut bapak bagaimana sebaiknya cara terbaik mengimplementasikan atau mempraktekkan high politics tersebut dalam	*High politics* tersebut tidak masuk ke dalam sebuah progam yang mendesak, ajaran-ajaran Muhammadiyah mengarahkan kepada *high politics*. Dan membuat sebuah aturan tidak adanya	Cara implementasikannya yaitu setiap orang atau elit muhammadiyah yang terjun dalam politik tidak mengindahkan atau melupakan *high politics* dengan cara betul-betul	Untuk mempraktekkan *high politics* tersebut bisa dilakukan dengan cara elit-elit	*High politics* dapat dilaksanakan sesuai dengan jabatan politik yang didapat oleh masing-masing tokoh Muhammadiyah tersebut dalam politik, jika dia mendapat	Orang-orang Muhammadiyah boleh melakukan kegiatan politik, tetapi tidak boleh mengindahkan *high politics* yang dia pahami sejak berada dalam Muhammadiyah

	Muhammadiyah?	jabatan ganda dalam muhammadiyah maksudnya seseorang yang memiliki jabatan elit di PWM maka tidak boleh memiliki jabatan penting dalam partai politik. Dia boleh terjun ke dalam dunia politik tetapi tidak melupakan *high politics* betul-betul mensejahterakan banyak orang dalam jabatan politik yang dimilikinya tersebut karena jabatan yang ada tersebut amanah yang ada pertanggung jawabanya kepada semua orang serta harus memandang keadilan dalam sebuah keputusan/kebijakan dalam politik misalnya dan tidak terlibat kedalam korupsi yang akan merusak segalanya dan bersikap jujur dalam jabatan politik untuk menghindari nepotisme	berpolitik berdasarkan keingginan rakyat karena merekalah yang mempercayai tokoh tersebut untuk mengemban jabatan politik tersebut dan menghindari politik praktis yang hanya berjangka pendek dan saling dukung mendukung untuk meraih sesuatu, dengan menghindari ajakan dari rekan-rekan politik lainya yang ingin mengambil keuntunggan lebih atau lebih singkatnya korupsi	Muhammadiyah yang terjun ke dalam dunia politik untuk tidak mudah terjebak bujuk rayu yang akan merusak akhlak elit tersebut karena jabatan tersebut merupakan amanah dari orang banyak dan tidak melupakan *high politics* yang dia dapat sewaktu di Muhammadiyah dan menghindari politik praktis dengan tidak mengambil keuntunggan dari jabatan politik yang didapat oleh elit-elit tersebut yang bisa merugikan banyak orang serta mengajak teman-teman politik lainya untuk memberantas semua tindakan korupsi yang ada	jabatan sebagai ketua partai maka tokoh tersebut harus betul-betul menjalankan amanahnya sebagai ketua partai dengan mengambil keuntunggan untuk dia sendiri atau kelompok tertentu, dan tokoh tersebut tidak boleh terlibat dalam politik praktis dengan saling sikut-menyikut dalam pencalonan sebuah jabatan lebih tinggi tentunya	untuk dengan cara tidak termakan bujuk rayu yang akan merusak akhlak orang tersebut dalam politik sehingga akan merugikan orang tersebut dan dengan saling mengawasi dan mengingati tindakan yang akan memicu korupsi dari jabatan politik yang dimiliki
12	Apakah anda setuju dengan konsep high politics yang di perkenalkan Amien Rais tersebut, jika iya apa alasanya, jika tidak apa alasanya?	Setuju atau tidak setuju itu implementasinya dilakukan dengan mengawasi elit dan warga muhammadiyah tidak jatuh dalam LP.	Setuju karena amien rais mengenalkan konsep tersebut supaya muhammadiyah tidak terjerumus dalam politik praktis.	Secara konsep mendukung tapi dalam pelaksanaannya kurang karena masih banyak pelaksanaan dan praktek politik praktis.	Setuju dengan HP karna sesuai dengan perjuangan dan cita-cita dalam politik Muhammadiyah	Setuju, tapi pada saat ini implementasi dari HP tersebut masih belum dapat praktek terbaiknya.

NO	PERTANYAAN	INFORMAN				
		Marhadi Effendi	**M.Hasan Junus**			
		Pemuda Muhammadiyah pada PWM Sumbar 2005-2010	Penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Pariaman 2005-2010			
1	Apakah bapak pengurus pada PWM Sumbar periode 2005-2010 ?	Iya, tapi tepatnya pada pemuda Muhammadiyah	iya			
2	Pada masa bapak berada pada periode tersebut, apakah bapak mengetahui jargon politik yang dikenal dengan nama high politics dalam Muhammadiyah yang dipopulerkan Amien Rais?	Pernah	Pernah mendengar Amien Rais mengenalkan jargon politik tersebut			
3	Menurut bapak apa itu high politics ?	Berpolitik dengan tidak jatuh kedalam politik praktis yang penuh dengan intrik dan kepentinggan sesaat atau lebih dikenal dengan nama low politics dan berpolitik untuk bangsa demi kepentingan rakyat dan mensejahterakan rakyat dengan jabatan politik yang dimiliki tokoh politik tersebut dengan tauhid sebagai payungnya	Berpolitik secara tinggi, baik dalam penataan politik sesuai dengan kebutuhan yang mengakar kepada rakyat, yang tauhid sebagai dasarnya, etika dan moral sangat di perlukan oleh tokoh politik yang menganut high politics tersebut sehingga high politics dapat berjalan dengan baik dengan mementingkan kepentinggan banyak orang di bandingkan kepentinggan individu atau kelompok			
4	Menurut bapak apa yang membedakan high politics dengan low politics?	Politik yang praktis , yaitu praktis didalam memperoleh suatu jabatan politik yang di ingginkan	Politik yang buruk yang menghalalkan segala cara dan sering kali mengsengsarakan rakyat			

		oleh tokoh politik tersebut				
5	Menurut bapak apa tujuan Amien Rais memperkenalkan high politics tersebut pada Muhammadiyah?	Supaya muhammadiyah tidak terjerumus kedalam politik praktis.	Supaya Muhammadiyah tidak terjatuh ke dalam low politics			
6	Dalam high politics ada yang namanya etika dan moral yang diperlukan dalam pelaksanaan HP kalau menurut bapak apa itu etika ? dan kalau moral apa itu pak?	Dalam melaksanakan HP seseorang memerlukan etika dan morl yang tinggi supaya politik itu berjalan dengan baik. Etika merupakan aturannya dan moral merupakan implemtasinya	Etika adalah aturan-aturan dalam berpolitik sedangkan moral adalah sikap dalam berpolitik tersebut			
7	Seperti yang kita ketahui pak, ajaran tauhid yang merupakan ajaran islam diperlukan dalam high politics tersebut. Menurut bapak seberapa pentingkah tauhid di dalam high politics tersebut?	Tauhid diperlukan dalam high politics karena merupakan payung dan pengontrol dalam pelaksanaan high poltics	Tauhid merupakan masalah agama yang tidak bisa di satukan dengan politik, tetapi tauhid diperlukan dalam bergerak / berjuang seseorang dalam ber high politics, atau sebagai dasar perjuangan seseorang dalam hal ini high politics			
8	Dalam high politics tersapat 3 (tiga) macam ciri utama yaitu politik berupa amanah (trust)jabatan politik yang kita dapatkan tersebut merupakan amanah masyarakat yang di berikan Allah kepada kita, setiap jabatan politik mengandung mass'uliyah atau pertanggung jawaban		Jabatan politik merupakan kepercayaan yang di berikan masyarakat dan ALLAH kepada seorang tokoh politik, dan tentunya memiliki pertanggungjawaban (accoutabillity) kepada ALLAH dan Masyarakat, jika pertanggung jawaban itu ada maka akan terjalinlah sebuah persaudaraan (brother hood) dengan masyarakat			

	(accountability) maksudnya jabatan yang kita dapatkan tersebut harus di pertanggung jawabkan kepada Allah dan masyarakat dan Kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwah (Brother hood)atau kegiatan politik yang kita lakukan harus dijalankan berdasarkan prinsip persaudaraan keislaman, bagaimana pemahaman bapak terhadap 3 ciri tersebut ?					
9	Apakah Ciri-ciri high politics di atas sangat membantu atau mempelancar bagi pelakssanaan Amal Makruf Nahi Mungkar dalam Muhammadiyah?	Sangat membantu dalam pelaksanaan amal makruf nahi mungkar dalam muhammadiyah	Sangat membantu muhammadiyah dalam menegakkan Amal Makruf Nahi Mungkar karena sesuai dengan ajaran Muhammadiyah			

10	Untuk melakukan konsep high politics, sebuah organisasi memerlukan prasyarat yang tidak ringan yaitu, antara lain, organisasi tersebut harus di perkuat dengan kepemimpinan yang kuat pula, yakni kepemimpinan yang tinggi (high leadership), adanya kelompok tenaga lobbyist yang andal (high diplomacy), dan perlu memiliki lembaga pengkajian yang bermutu. Apakah pada saat itu Muhammadiyah sudah memilikinya ?	Secara nasional Muhammadiyah sudah memiliki hal tersebut tetapi secara internasional belum bisa dikatakan memiliki.	Muhammadiyah sudah memiliki prasyarat tersebut			
11	Menurut bapak bagaimana sebaiknya cara mengimplementasikan high politics tersebut dalam Muhammadiyah?	Jabatan politik yang dimiki tersebut yang merupakan amanah rakyat yang betul-betul harus kita jalani dengan sungguh-sungguh , dan adanya kontrol dalam jabatan politik yang kita miliki tersebut supaya terhindar dari politik praktis(*low politics*) kontrol dari semua pihak dan tidak merusak akhlaknya sendiri	Cara implementasinya jika seorang elit Muhammadiyah terlibat ke dalam partai politik maka dia tidak boleh melupakan atau mengindahkan *high politics* dengan cara tidak mudah terpengaruhi dengan orang lain dan jatuh kedalam politik praktis yang hanya berjangka pendek seperti			

		dan menghindari bersikap tidak jujur dalam menjalankan jabatan (nepotisme)	lebih memilih orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam jabatan tertentu dibanding memilih anggota keluarga yang belum memiliki skil dan kemampuan yang mumpuni atau lebih disingkat dengan praktek KKN			
12	Apakah anda setuju dengan konsep high politics yang di perkenalkan Amien Rais tersebut, jika iya apa alasanya, jika tidak apa alasanya?	Secara konsep mendukung, tetapi secara implementasi tidak kenapa demikian karena kurangnya sosialisasi tentang HP	Sangat setuju sekali karena jika seseorang Muhammadiyah ingin terlibat politik maka dia harus memiliki tauhid yang tinggi serta moral dan etikanya tidak rusak			

Tianggulasi data

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat

1. Apakah betul Amien Rais pernah memperkenalkan sebuah jargon politik yang bernama *High Politics* pada Muhammadiyah?
2. Menurut sepengetahuan bapak apakah itu *high politics*?
3. Jargon politik tersebut diperkenalakan Amien Rais pada Muhammadiyah supaya Muhammadiyah tidak terjatuh ke dalam politik praktis (*low politics*), bagaimana menurut pandanggan bapak ?
4. Dalam *high politics* tersebut adanya etika dan moral yang begitu penting dalam pelaksanaan *high politics,* apakah etika dan moral tersebut begitu penting dalam pelaksanaan *High Politics* ?
5. *High politics* juga memerlukan tauhid sebagai payungnya, yaitu sebagai pelindung dalam pelaksanaan *high politics* Muhammadiyah bagaimana pendapat bapak tentang hal tersebut?
6. *High politics* memiliki ciri-ciri yaitu jabatan politik merupakan amanah, amanah tersebut memilki pertanggung jawaban (*accountability*) dan dari itu dapat menciptakan sebuah persaudaraan yang baik. Apakah ciriciri tersebut sudah sesuai atau cocok dengan *high politics* ?
7. Apakah pada saat ini *high politics* sudah di jalankan di Muhammadiyah dengan baik dan bagaimana seharusnya elit-elit tersebut mempraktekkan *high politics* tersebut?

Jawaban

1. High politics tersebut diperkenalakan Amien Rais pada Muhammadiyah sudah sejak lama tetapi baru diperkenalkan resmi tahun 2004
2. Cara Muhammadiyah dalam berpolitik secara tinggi (adiluhung) sehingga tidak jatuh dalam politik praktis yang pada saat ini sering terjadi di Indonesia, dengan berpolitik untuk bangsa dan Negara, itu semua bergantung pada moralitas dan etika dari tokoh politik tersebut yang bersumber dari agama atau Tauhid.

3. Seperti yang dijelaskan sebelumnya kalau high politics tersebut bagaimana Muhammadiyah berpolitik secara tinggi (adiluhung) maka low politics tersebut adalah politik rendahan.
4. Jelas sangat diperlukan, seperti yang disebutkan sebelumnya high politics bergantung pada moralitas dan etika.
5. Moralitas dan etika tersebut berasalkan Tauhid, seperti yang disebutkan amien rais high politics memiliki payung dalam pelaksanaannya yaitu Tauhid yang merupakan ajaran agama.
6. Amanah, pertanggung jawaban dan persaudaraan merupakan bagian dari Muhammadiyah, maka tidaklah sulit orang-orang Muhammadiyah memahami hal-hal tersebut. Roh Muhammadiyah diambil dan di formulasikan amien rais kedalam high politics dalam bentuk ciri-ciri tersebut.
7. Dalam kaca mata saya, high politics tersebut dijalankan dengan berpedoman dengan cirri-ciri dari high politics yaitu adanya amanah inggatlah bahwa jika seseorang bisa menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh maka bisa dikatakan bahwa moral dan etika orang tersebut sangatlah baik. Jadi cara mempraktekkan high politics tersebut dengan cara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terjun kedalam politik untuk menganggap jabatannya tersebut merupakan amanah orang banyak yang ada tanggung jawabnya terutama pertanggung jawaban kepada ALLAH S.W.T

LAMPIRAN 11

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor : 88/KEP/II.0/D/2007 tanggal 10 Syawal 1429 H/10 Oktober 2008 M

PERUBAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2005 – 2010

Penasehat	: 1. Prof.H. Nur ~~Anas Djamil~~
	2. H. Hasan Byk Dt. Marajo
	3. Drs.H. Shofwan Karim Elha, MA
	4. Drs.H. Nursal Saeran, MA
	5. Prof.Dr.H. Azmi, MA
	6. H.Hasan Ahmad
	7. H.Idris Manaf
Ketua	**: Drs. H. RB. Khatib Pahlawan Kayo**
Wakil Ketua	: Prof.Dr.H. Bustanuddin Agus, MA
Wakil Ketua	: ~~Drs.H. Syamsir Roust, M.Ag~~
Wakil Ketua	: Drs.H. Dasril Ilyas
Wakil Ketua	: Drs.H. Muslim Tawakal, SH, M.Pd
Wakil Ketua	: Drs.H. Mirwan Pulungan, M.Pd
Sekretaris	**: Drs.H.Adrian Muis Ch. Saripado**
Wakil Sekretaris	: Firdaus AN, S.Ag, MHI
Bendahara	**: Drs.Salman M. Noer, M.Pd**
Wakil Bendahara	: ~~Drs.A.M. Datuk Gunung Kayo~~
Anggota	: 1. Drs.Dasman Lanin, M.Pd
	2. Prof.Dr.H.Nasrun Haroen, MA
	3. Drs.H.Afrizal Thaib

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 10 Syawal 1429 H
10 Oktober 2008 M

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Sumatera Barat

Ketua, **Sekretaris,**

Drs.H.RB. Khatib Pahlawan Kayo
NBM. 425 150

Drs.Adrian Muis Ch. Saripado
NBM. 564 440

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor : 101/KEP/I.0/B/2007
Tentang:
KETENTUAN JABATAN
DI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN
YANG TIDAK DAPAT DIRANGKAP
DENGAN JABATAN LAIN

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

Membaca : Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 20/KEP/I.0/B/2005 tanggal 13 Muharram 1426 H/22 Pebruari 2005 M tentang ketentuan jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Persyarikatan masa jabatan 2005 – 2010;

Menimbang : 1. Bahwa semangat dan jiwa keputusan Tanwir 2007 tentang Revitalisasi Organisasi dan Gerakan memerlukan adanya perubahan dan penyempurnaan dalam ketentuan-ketentuan tentang jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan di lingkungan Persyarikatan sebagaimana diatur dalam surat keputusan tersebut;

2. Bahwa jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain di luar Persyarikatan perlu diperluas;

3. Bahwa perlu ada batasan yang jelas tentang jabatan-jabatan yang tidak dapat dirangkap;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 120/KEP/I.0/2006 tanggal 09 Sya'ban 1427 H/02 September 2006 M tentang Qa'idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;

3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 53/KEP/I.0/B/2007 tentang Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H/2007 M;

Berdasar : Pembahasan dan keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 14 Juli 2007;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KETENTUAN JABATAN DI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN YANG TIDAK DAPAT DIRANGKAP DENGAN JABATAN LAIN

Pertama : Mencabut kembali Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 20/KEP/I.0/B/ 2005 tentang ketentuan jabatan yang tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Persyarikatan masa jabatan 2005 – 2010.

Kedua : Menetapkan jabatan di lingkungan Persyarikatan yang tidak dapat dirangkap dengan jabatan lain adalah sebagai berikut:

I. Anggota Pimpinan Persyarikatan dan Pimpinan Harian (Ketua/Wakil Ketua,

Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara) Unsur Pembantu Pimpinan (Majelis/Lembaga) di semua tingkat tidak dapat dirangkap dengan jabatan:

1. dalam Partai Politik:
   a. Pimpinan Partai Politik di semua tingkat.
   b. Ketua dan anggota Majelis/Dewan Penasehat/ Pertimbangan/Pembina/ Musytasyar/Syura/A'la atau badan lain yang sejenis pada partai politik di semua tingkat.
   c. Ketua dan anggota Departemen atau badan yang sejenis pada partai politik di semua tingkat.
   d. Ketua dan anggota Pimpinan organisasi massa di bawah pimpinan/ berafiliasi pada partai politik di semua tingkat.

2. dalam organisasi sejenis:
   Ketua dan anggota pimpinan organisasi yang amal usahanya sama (sebagian atau seluruhnya) dengan Muhammadiyah di semua tingkat.

3. dalam Pimpinan Persyarikatan:
   Vertikal:
   a. Pimpinan Harian Persyarikatan dibawah atau di atasnya.
   b. Pimpinan Persyarikatan dengan Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan (Majelis/Lembaga) di bawah atau di atasnya.
   c. Pimpinan Persyarikatan dan Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan dengan Pimpinan Amal Usaha yang langsung di bawahinya.

Horisontal:
Antar Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan (Majelis/Lembaga) setingkat.

II. Pimpinan Harian Organisasi Otonom (Ketua Umum/Ketua/ Wakil Ketua, Sekretaris Umum/Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara Umum/Bendahara/Wakil Bendahara) tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan keanggotaan Pimpinan Partai Politik di semua tingkat.

III. a. Pimpinan Amal Usaha (Rektor/Ketua/ Direktur/Dekan/ Kepala) beserta Pembantunya masing-masing,
b. Komisaris serta jabatan yang sejenis di lingkungan Amal Usaha Muhammadiyah,
c. Fungsionaris (Dosen/Guru/Dokter) Amal Usaha Muhammadiyah,
tidak dibenarkan merangkap dengan keanggotaan Pimpinan Partai Politik dan/ atau anggota organisasi lain yang amal usahanya sama (sebagian atau seluruhnya) dengan Muhammadiyah di semua tingkat.

IV. Pengecualian dari ketentuan I, II, dan III dalam diktum kedua di atas hanya dapat dilakukan atas keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan beserta jajaran Unsur Pembantu Pimpinan, Amal Usaha, dan Organisasi Otonom di semua tingkat.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah dengan keputusan lain.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Rajab 1428 H
30 Juli 2007 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.

Sekretaris Umum,

Drs. H. A. Rosyad Sholeh

Tembusan:
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis dan Lembaga tingkat Pusat
3. Organisasi Otonom tingkat Pusat
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah seluruh Indonesia

(nomor 4 s.d. 6 melalui Berita Resmi Muhammadiyah)

MUQADDIMAH

Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiyah. Kata Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad yaitu nama Rasulullah SAW. Yang diberi tambahan ya nisbah dan ta marbutah. Artinya bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang mengikuti jejak perjuangan nabi Muhammad SAW.

Muhammadiyah Sumatera Barat berdiri untuk pertama kalinya di Sungai Batang Maninjau pada tanggal 29 Mei 1925 di sponsori oleh Syech Dr. H. Abdul Karim Amarullah, dkk. Kemudian di Padang Panjang disponsori oleh Sa'alah Yusuf Sutan Mangkuto, dkk pada tanggal 2 Juni 1926.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Persyarikatan Muhammadiyah adalah "menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya" (Anggaran Dasar Bab III pasal 6).

PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMBAR
PERIODE 2010 – 2015

Ketua	: **Drs. H. Dasril Ilyas**
Wakil Ketua	: Prof. Dr. H. Bustanuddin Agus, MA
Wakil Ketua	: H.A. Syahrudji Tanjung
Wakil Ketua	: Drs. Mirwan Pulungan, M.Pd
Wakil Ketua	: Drs.H. Salman M.Noer, M.Pd
Wakil Ketua	: Bakhtiar, M.Ag
Wakil Ketua	: Dr. H. Muslim Tawakkal, SH,M.Pd
Wakil Ketua	: Prof.Dr.H. Rusydi AM, Lc. M.Ag
Wakil Ketua	: Drs. H. Adli Etek
Sekretaris	: **Drs. H. Nurman Agus**
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Muslim Hamid, M.HI
Bendahara	: **Drs. H. Abdurrahman S. Chan**
Wakil Bendahara	: Firdaus AN. M.HI

MAJELIS DAN LEMBAGA

1. Majelis Tarjih dan Tajdid
   Ketua : Prof. Dr. H. Edi Safri
   Sekretaris : H.M. Ridho Nur Lc. M.Ag
2. Majelis Dikdasmen
   Ketua : Zainal Akil S.Pd
   Sekretaris : Afdi Effendi S.Ag
3. Majelis Tabligh
   Ketua : Drs. Dasrizal Dahlan, SH. M.Pd
   Sekretaris : Solsafad, A.Md, S.Pd.I
4. Majelis Pembina Kesehatan Umum
   Ketua : Dr. H. Emilzon Taslim, Sp.An, M.Kes
   Sekretaris : Edi Suwirman, S.Km
5. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
   Ketua : H. Firdaus Anwar, SE
   Sekretaris : Lisendra S.Th.I
6. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan
   Ketua : Sudirman Nawawi, BE
   Sekretaris : M.Iqbal, SH
7. Majelis Pendidikan Kader
   Ketua : H. Priadi Syukur, SH
   Sekretaris : Toni Markos, M.Ag
8. Majelis Pustaka dan Informasi
   Ketua : H. Hasril Chaniago
   Sekretaris : Drs. Rustam

9. Majelis Pemberdayaan Masyarakat
   Ketua : Drs. Syahrial P
   Sekretaris : Deri Rizal S.HI

10. Majelis Hukum dan HAM
    Ketua : Dr. Kurnlawarman, SH. M.Hum
    Sekretaris : M.Ishaq SH

11. Majelis Lingkungan Hidup
    Ketua : Dr. H. Welya Roza, M.Pd
    Sekretaris : Dr.Drs. Erman Har, M.Si

12. Majelis Pelayanan Sosial
    Ketua : Drs. H. Rusdi Lubis, M.Si
    Sekretaris : Rusdin Batahan, S.Ag

13. Lembaga Seni dan Budaya
    Ketua : Drs. H. Zaitul Ikhlas Sa'ad, M.Si
    Sekretaris : Muhapril Musri S.Sos. M.Ag

14. Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan
    Ketua : DR. H. Yuskar, SE, MA, Ak Dt.Paduko Bagindo
    Sekretaris : Drs. Jonhar, SE, M.Si. Ak

15. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
    Ketua : Drs. H. Darmadi. MM
    Sekretaris : Abdul Salam, S.Ag, M.Hum

16. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
    Ketua : Drs. H. Adrian Muis Ch. Saripado
    Sekretaris : Martaon Pulungan, S.HI

17. Lembaga Penanggulangan Bencana
    Ketua : Drs. H. Yuzardi Ma'ad, Lc
    Sekretaris : Irwan Toni, S.HI

18. Lembaga Amil Zakat Infak dan Sadaqah
    Ketua : Prof. H. Nur Anas Djamil
    Sekretaris : Syamsi, MA.

19. Badan Pengelola Geraka Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar
    Ketua : Drs. H. Abdurrahman, S.Chan
    Sekretaris : Irwan Toni, S.HI
    Bendahara : Zulfakhri, SE

ORGANISASI OTONOM TINGKAT WILAYAH

Persyarikatan Muhammadiyah membentuk Organisasi Otonom (ORTOM) sebagai wadah organisasi yang membantu Persyarikatan dalam rangka mencapai tujuannya.

1.'Aisyiyah

Secara resmi didirikan tanggal 22 April 1917, yang merupakan gerakan kaum ibu dalam Muhammadiyah yang ikut berjuang bersama-sama untuk menyampaikan ajaran Islam ke masyarakat, serta meneladani perkehidupan dan perjuangan Aisyah Ra. (isteri Rasulullah).

Ketua : **Dra. Hj. Meiliarni Rusli**
Sekretaris : Yusmawati. M, BA

2.Nasylatul 'Aisyiyah (NA)

Nasylatul 'Aisyiyah adalah perkumpulan bagi para puteri Muhammadiyah yang didirikan pada tangggal 16 Mei 1931

Ketua : **Fitri Hidayati. M.Hum**
Sekretaris : Linda Fitria, S.Ag

3.Pemuda Muhammadiyah

Cikal bakal Pemuda Muhammadiyah adalah Pandu Hizbul Wathan (HW). Pemuda Muhammadiyah didirikan pada 2 Mei 1932 tujuannya membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.

Ketua : **Murisal S.Ag, M.Pd**
Sekretaris : Toni Markos, M.Ag

4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)

Didirikan pada tanggal 14 Mei 1964 untuk menyatukan segenap organisasi Mahasiswa Muhammadiyah dalam rangka membentuk akademisi Islam guna mencapai tujuan Muhammadiyah.

Ketua : **Dicky Elnanda, S.Pd.I**
Sekretaris : Ari Prima S.Psi.I

5. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)

Didirikan pada 18 Juni 1961 (IPM), dengan maksud untuk menampung kegiatan pelajar dari warga Muhammadiyah, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan jiwa angkatan muda.

Ketua : Dinil Abrar Sulthani
Sekretaris : Elvi Sukaisih

6. Tapak Suci Putera Muhammadiyah

Ketua : **M.Rafi, SE., Akt**
Sekretaris : Suyadi, SE

7. Hizbul Wathan (HW)

Ketua : **Drs. Apris Yaman**
Sekretaris : Hayatul Fikri Adnan, S.Ag, M.Pd

SUSUNAN ORGANISASI

Persyarikatan Muhammadiyah Sumatera Barat bergerak dalam Propinsi Sumatera Barat tersusun dalam tingkatan sebagai berikut :

1. Ranting adalah kesatuan anggota suatu tempat atau kawasan, jumlahnya; 784 ranting.
2. Cabang adalah kesatuan ranting di suatu tempat, jumlahnya; 141 cabang.
3. Daerah adalah kesatuan cabang di suatu Kabupaten/Kota, jumlahnya 19 daerah.
4. Wilayah adalah kesatuan daerah di Sumatera Barat.

AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SUMBAR

Secara umum amal usaha Muhammadiyah mencakup beberapa bidang, diantaranya :

1. **Bidang Keagamaan**
   a. Memberi tuntunan dan pedoman dalam bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan mu'amalah berdasarkan al-Quran dan Sunnah.
   b. Mendirikan Masjid dan Mushalla sebagai tempat sarana ibadah.
   c. Mencetak kader ulam, foqahaa lewat pendidikan pesantren dan pendidikan tinggi Muhammadiyah.
   d. Menelaah berbagai kajian ke-Islaman dan perkem-bangan umat Islam lewat majelis Tarjih dan lembaga Hikmah.
   e. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keagamaan, kesejahteraan keluarga dan persoalan kemasyarakatan lainnya.
   f. Melakukan dakwah ke daerah transmigrasi pedalaman dan tertinggal lewat Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus.

2. **Bidang Pendidikan**

Pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada dua pijakan, yakni perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren. Perpaduan kedua sistem tersebut adalah :

a. Mendirikan madrasah-madrasah/pesantren dengan memasukkan kurikulum pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan umum/modern.

b. Mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan kurikulum ke-Islaman dan ke-Muhammadiyah.

3. **Bidang Sosial Kemasyarakatan.**

Dalam bidang sosial kemasyarakatan amal usaha Muhammadiyah mencakup beberapa usaha, diantaranya:

a. Mendirikan rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, apotik dan sebagainya.

b. Mendirikan panti asuhan anak yatim, lanjut usia, santunan keluarga dan sebagainya.

c. Menghimpun dan menyalurkan dana-dana bantuan bagi korban bencana alam dan bantuan solidaritas kemanusiaan lainnya.
d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi keluarga dan masyarakat mengenai hidup islami berbangsa dan bernegara.

4. **Bidang Partisipasi Politik.**
Muhammadiyah bukan organisasi politik dan bukan underbouw dari partai politik tertentu. Sebagai gerakan dakwah, partisipasi politik Muhammadiyah bertujuan amar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan panduan etika, moral dan akhlaqul karimah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masyarakat.

Amal Usaha Muhammadiyah Sumatera Barat terdiri atas :

1. Universitas 1 buah (UMSB) dengan 9 fakultas, 1 Akademi, S 1 PGSD dan PGTK 'Aisyiyah dan Program Pasca Sarjana :
   a. Fakultas Ekonomi
   b. Fakultas Agama Islam
   c. Fakultas Hukum
   d. Fakultas Teknik
   e. Fakultas Pertanian
   f. Fakultas Kehutanan
   g. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
   h. Fakultas Pariwisata
   i. Fakultas Kesehatan dan MIPA
   j. Program Pascasarjana, Konsentrasi Magister Hukum Islam dan Magister Pendidikan Islam.
   k. Akademi Perawat Kesehatan (AKPER) 'Alsyiah
   l. Program S1 PGTK 'Aisyiah.
   m. Program S1 PGSD 'Aisyiah.
2. Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) : 5 buah
3. Rumah Sakit Umum : 2 buah
4. Poliklinik : 2 buah, rumah bersalin 1 buah
5. Balai Pengobatan : 2 buah
6. Badan Pengelola Ekonomi Islam (BPEI) at-Taqwa : 3 unit usaha, toko buku, pangkas rambut, wartel dan foto copy.
7. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari'ah : 2 buah
8. Masjid dan Mushalla : 291 buah
9. Koperasi : 1 buah
10. Panti Asuhan : 42 buah
11. Apotik : 2 Buah
12. LAZISMU: 2
13. Badan Pengelola Gerakan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat: 1

Aset Muhammadiyah Sumbar

Jumlah tanah : 1. 612 persil
2. 2.237.818 M^2

Jumlah Sekolah/Madrasah

1. TK Bustanul Athfal	: 79 buah
2. MIM	: 6 buah
3. SD Muhammadiyah	: 33 buah
4. MTsM	: 44 buah
5. SLTPM	: 17 buah
6. MAM	: 16 buah
7. SMUM	: 12 buah
8. SMKM	: 5 buah
9. Pondok Pesantren	: 6 buah
10. Mualimin/mualimat	: 1 buah

Staf Sekretariat Harian PWM Sumbar

Sekretaris Eksekutif/Kepala Kantor	: Zulfakhri, SE
Tata Usaha/Humas	: Rafiqul Amin S.Pd.I,
TU/RT/Sopir	: Hendri Novizal
Driver	: Jasrizal

DAFTAR NAMA TOKOH YANG PERNAH MENJADI KETUA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMBAR

1.	Engku Dt.Penghulu Besar *	1925	Agam
2.	Saalah Yusuf St. Mangkuto *	1926-1928	T. Datar
3.	Saalah Yusuf St. Mangkuto *	1928-1930	T. Datar
4.	AR. Sutan Mansoer *	1930-1935	Agam
5.	Prof. Dr. Hamka	1946-1949	Agam
6.	Saalah Yusuf St. Mangkuto **	1949-1956	T. Datar
7.	H. A. Malik Ahmad**	1956-1958	Tanahdatar
8.	Muhammad Yatim**	1958-1962	Payakumbuh
9.	H. Haroen El Ma'any	1962-1964	Pariaman
10.	Drs. Jam'an Saleh, M.O	1964-1966	T. Datar
11.	HAK. Dt. Gunung Hijau	1966-1969	Agam
12.	HAK. Dt. Gunung Hijau	1969-1972	Agam
13.	H. Zainoel Abidin Syuaib	1972-1975	Agam
14.	H. Zainoel Abidin Syuaib	1975-1978	Agam
15.	H. Zainoel Abidin Syuaib	1978-1983	Agam
16.	H. Zainoel Abidin Syuaib	1983-1984	Agam
17.	H. Hasan Ahmad	1984-1984	Tanahdatar
18.	H. M. Idris Manaf	1984-1986	Tanahdatar
19.	H. Amir Ali	1986-1991	50 Kota
20.	H. Radin Rahman	1991-1995	Kab. Solok
21.	Prof. Drs. Nur Anas Djamil	1995-2000	50 Kota
22.	Drs. H. Shofwan Karim Elha, MA	2000-2005	Dharmasraya
23.	Drs.H.RB. Khatib Pahlawan Kayo	2005-2010	Tanahdatar
24.	Drs.H. Dasril Ilyas	2010-2015	Pessel

* ***Periode Perintis***

** ***Ketua Sumatera Tengah***

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SE-SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2010-2015

NO.	DAERAH	JABATAN	NAMA PIMPINAN
1.	Padang	Ketua	Malgus Nasir, S.Pd
2.	Bukittinggi	Ketua	Ali Rahman, SH, MH
3.	Sawahlunto	Ketua	H. Zardinal Basyir, SE
4.	Pabasko	Ketua	Drs. Fahrizal Alwis
5.	Kota Pariaman	Ketua	Drs. Syofyan Djamal
6.	Kab. Agam	Ketua	Drs. Alwisral Imam Zaidallah, M.Pd
7.	Kab. Pd.Pariaman	Ketua	Drs. Nasrul Ilyas
8.	Kab. 50 Kota	Ketua	Drs.H. Abdul Malik Djamil
9.	Pasaman	Ketua	Ahmad Maulid Siregar
10.	Pasaman Barat	Ketua	Mizlan S.Pd.I
11.	Kab.Tanah Datar	Ketua	Drs. Fahmi Dini
12.	Kab.Solok	Ketua	Drs. Suharmen Thalb, MM
13.	Kab. Sijunjung	Ketua	Karsuli
14.	Kab.Dharmasraya	Ketua	Drs.H. Rusydi Abbas, MM
15.	Kab.Pessel	Ketua	Zamzainir, SH
16.	Kab. Mentawai	Ketua	Syofyan B. Amran B.BA
17.	Kota Solok	Ketua	Drs. Usri Efendi
18.	Kab. Solsel	Ketua	Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM
19.	Kota Payakumbuh	Ketua	Drs. H. Ashril Syamsu

LAMPIRAN 14

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu olitik, universitas andalas :

Nama : Mhd.Nofriyandra Falayati

Bp : 07993026

Jurusan : Ilmu Politik

engan melakukan wawancara dengan informan :

Nama : RB. Khalifah pahlawan tayo

Institusi / Lembaga : pcm muhammadiyah Sumbar

Jabatan : Keba pcm muhammadiyah 2005 - 2010

Waktu dan tempat : rumah Informan, Jln garuda 1 / 13 - 11 2012

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "**Pemahaman Elit uhammadiyah Sumatera Barat Terhadap *High Politics***" dalam periode 2005-2010.

Demikian surat keterangan wawancara ini, agar bisa digunakan sebagaimana gsinya.

Informan

( )

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas andalas :

Nama : Mhd.Nofriyanda Falayati

Bp : 07993026

Jurusan : Ilmu Politik

Dengan melakukan wawancara dengan informan :

Nama : Drs. H. Mirwan Palungan, M. Pd.

Institusi / Lembaga : ~~wakil~~ ketua Muhammadiyah Sumbar

Jabatan : wakil ketua PWM 2005-2010

Waktu dan tempat : kantor PWM Sumbar / 10 - 11 - 2012.

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "**Pemahaman Elit Muhammadiyah Sumatera Barat Terhadap *High Politics***". dalam periode 2005-2010.

Demikian surat keterangan wawancara ini, agar bisa digunakan sebagaimana fungsinya.

Informan

( )

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas andalas :

Nama : Mhd.Nofriyanda Falayati

Bp : 07993026

Jurusan : Ilmu Politik

Dengan melakukan wawancara dengan informan :

Nama : Drs. H. Adrian Muis CH. Saripado

Institusi / Lembaga : Sekretaris PWM 2005-2010

Jabatan : Sekretaris PWM Sumbar 2005-2010

Waktu dan tempat : 21 November 2012

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "**Pemahaman Elit Muhammadiyah Sumatera Barat Terhadap *High Politics***". dalam periode 2005-2010.

Demikian surat keterangan wawancara ini, agar bisa digunakan sebagaimana fungsinya.

Informan

( )

*SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas andalas :

Nama : Mhd.Nofriyanda Falayati

Bp : 07993026

Jurusan : Ilmu Politik

Dengan melakukan wawancara dengan informan :

Nama : Drs. Salman M. Noer, M. Pd.

Institusi / Lembaga : PWM Sumbar 2005 - 2010

Jabatan : Bendahara PWM Sumbar 2005 - 2010

Waktu dan tempat : Kantor PWM Sumbar, 16 Nov 2012.

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "**Pemahaman Elit Muhammadiyah Sumatera Barat Terhadap *High Politics***", dalam periode 2005-2010.

Demikian surat keterangan wawancara ini, agar bisa digunakan sebagaimana fungsinya.

Informan

(Salman M., Noer)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas andalas :

Nama : Mhd.Nofriyanda Falayati

Bp : 07993026

Jurusan : Ilmu Politik

Dengan melakukan wawancara dengan informan :

Nama : Drs. Dasman Lanin, M.Pd.

Institusi / Lembaga : PWM Sumatera Barat 2005-2010

Jabatan : Anggota PWM 2005-2010

Waktu dan tempat : 30 November 2012.

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "**Pemahaman Elit Muhammadiyah Sumatera Barat Terhadap *High Politics***". dalam periode 2005-2010.

Demikian surat keterangan wawancara ini, agar bisa digunakan sebagaimana fungsinya.

Informan

(Prof. Dasmir Lanin Ph.D)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas andalas :

Nama : Mhd. Nofriyandra Falayati

Bp : 07993026

Jurusan : Ilmu Politik

Dengan melakukan wawancara dengan informan :

Nama : Marhadi Efendi

Institusi / Lembaga : Kesbangpol

Jabatan : Sekretaris DPW

Waktu dan tempat : Kantor DPW Nasdem / Desember 2012

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "**Pemahaman Elit Muhammadiyah Sumatera Barat Terhadap *High Politics***". dalam periode 2005-2010.

Demikian surat keterangan wawancara ini, agar bisa digunakan sebagaimana fungsinya.

Informan

(Marhadi Efendi)

*SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas andalas :

Nama : Mhd.Nofriyanda Falayati

Bp : 07993026

Jurusan : Ilmu Politik

Dengan melakukan wawancara dengan informan :

Nama : M. Hasan Yunus.

Institusi / Lembaga : muhammadiyah.

Jabatan : penasihan pimpinan daerah muhammadiyah pariaman.

Waktu dan tempat : pariaman / 1 - 12 - 2012

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul "**Pemahaman Elit Muhammadiyah Sumatera Barat Terhadap *High Politics***", dalam periode 2005-2010.

Demikian surat keterangan wawancara ini, agar bisa digunakan sebagaimana fungsinya.

Informan

(M. Hasan Yunus)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bahwa telah dilaksanakan penelitian oleh mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas andalas :

Nama : Mhd.Nofriyanda Falayati

Bp : 07993026

Jurusan : Ilmu Politik

Dengan melakukan wawancara dengan informan :

Nama : Syamsul Bahri Khatib

Institusi / Lembaga : MUI Sumbar

Jabatan : Ketua MUI Sumbar

Waktu dan tempat : Kantor MUI, 3 Desember 2012

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **"Pemahaman Elit Muhammadiyah Sumatera Barat Terhadap *High Politics*"**. dalam periode 2005-2010.

Demikian surat keterangan wawancara ini, agar bisa digunakan sebagaimana fungsinya.

Informan

( )